



Katalog BPS :3201.32

PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000



BPS

BADAN PUSAT STATISTIK, Jakarta-Indonesia

PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000

ISBN : 979-598-980-4

No. Publikasi : 04410.0213

Naskah :

Kantor Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

CV. Nurwita Karya Indah

<https://jabar.bps.go.id>

ORGANISASI PENULISAN
PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA BARAT, TAHUN 2000

Penanggung Jawab Umum : H. Mohammad Asta, SE Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Teknis
Dan Administrator Merangkap
Editor : M. Sairi Hasbullah, MA Kepala Bid. Statistik Sosial
Provinsi Jawa Barat

Penulis : Dra. Tutty Amalia

Asisten Penulis : 1. Nano Suharno, MA
2. Drs. Agus Praptono

Pengolah Data : 1. Asim Saputra, Amd. St
2. Mas'ud Rifai, Amd. St

<https://jabar.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kegiatan penulisan Profil Kependudukan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2000. Buku Profil Kependudukan ini menyajikan ulasan secara deskriptif situasi kependudukan dan kesejahteraan berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2000, Survei Kependudukan 2000 (Modul Kependudukan SP2000), Susenas 2000 dan dari sumber data lainnya. Publikasi "Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat" ini membahas aspek kependudukan yang meliputi antara lain perubahan komponen pertumbuhan penduduk, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan ketenagakerjaan penduduk.

Kami berharap publikasi ini akan bermanfaat, baik bagi para pemerhati masalah kependudukan maupun bagi para perencana pembangunan atau pengambil keputusan, di tingkat daerah maupun pusat. Terutama bagi penulis yang juga bertanggung jawab atas pekerjaan pengumpulan data di lapangan, diharapkan pengalaman tersebut dapat mendorong meningkatkan mutu data yang dikumpulkan.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa publikasi Profil Kependudukan ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerja keras, dedikasi, serta pengorbanan waktu dari banyak pihak. Untuk itu, kepada semua yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada para penulis, editor, dan staf Sub Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2002

Badan Pusat Statistik
Kepala,



DR. Soedarti Surbakti
NIP. 340001648

DAFTAR ISI

	Halaman
ORGANISASI PENULISAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sumber Data	2
1.5. Sistematika Penulisan	2
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH	5
2.1. Keadaan Geografis	5
2.2. Keadaan Ekonomi	6
2.3. Keadaan Sosial Budaya	6
BAB III. AGREGAT DAN KOMPOSISI PENDUDUK	11
3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	11
3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	14
3.3. Komposisi Penduduk.....	16
3.3.1. Komposisi Penduduk menurut Struktur Umur dan Jenis Kelamin	16
3.3.2. Komposisi Penduduk menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan	16
3.3.3. Komposisi Penduduk menurut Kabupaten/Kota	21
3.3.4. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	22
BAB IV FERTILITAS DAN MORTALITAS	25
4.1. Fertilitas	25
4.1.1. Anak Lahir Hidup	25
4.1.2. Rata-rata Paritas Lengkap	27
4.1.3. Rasio Anak Ibu (Child Women Ratio- CWR)	28
4.1.4. Umur Perkawinan Pertama (Singulate Mean Age Married – SMAM).....	29
4.2. Mortalitas	31
BAB V MIGRASI	35
5.1. Jumlah dan Persentase Migran Masuk	35
5.1.1. Migrasi Seumur Hidup (Lifetime Migration)	36
5.1.2. Migrasi Total (Total Migration)	37
5.1.3. Migrasi Risen (Recent Migration)	38
5.2. Daerah Asal Migran.....	39
5.3. Karakteristik Migran Masuk.....	40

5.4. Motivasi Migran Masuk.....	41
BAB VI PENDIDIKAN	43
6.1. Angka Partisipasi Kasar	44
6.2. Angka Partisipasi Murni	45
6.3. Angka Partisipasi Sekolah	47
6.4. Angka Putus Sekolah	48
6.5. Persentase Melek Huruf	50
BAB VII KESEHATAN.	53
7.1. Upaya Perbaikan Kesehatan	53
7.2. Status Kesehatan	57
7.3. Angka Harapan Hidup	58
BAB VIII PERUMAHAN	61
8.1. Gambaran Umum	61
8.2. Kondisi Fisik Bangunan	62
8.2.1. Rata-rata Luas Lantai Hunian	62
8.2.2. Persentase Rumahtangga yang Menghuni Rumah Beratap Seng, Asbes, Genteng dan Beton	64
8.2.3. Persentase Rumahtangga yang Menghuni Rumah Ber- dinding Tembok dan Kayu	66
8.2.4. Persentase Rumahtangga yang Menghuni Rumah Berlantai Tanah dan Lainnya	68
8.3. Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal.....	70
8.3.1. Rumahtangga yang Menggunakan Listrik.....	70
8.3.2. Rumahtangga yang Mempunyai Fasilitas Air Minum- Sendiri.....	71
8.3.3. Rumahtangga yang Menggunakan Air Bersih.....	73
8.3.4. Rumahtangga yang Menggunakan Air MinumTanah	75
BAB IX KETENAGAKERJAAN.....	77
9.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja.....	77
9.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	78
9.3. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	80
9.4. Setengah Pengangguran	81
9.5. Pekerja menurut Lapangan Usaha.....	82
9.6. Pekerja menurut Status Pekerjaan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	5
Tabel 2.2	Perkembangan PDRB Per kapita di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-1999 (Harga Konstan 1993)	6
Tabel 2.3	Jumlah Pemeluk Agama di Provinsi Jawa Barat menurut Agama yang dianut Tahun 2000	7
Tabel 2.4	Jumlah Tempat Peribatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	7
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat kabar menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	8
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat kabar menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	9
Tabel 3.1.1a	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 menurut Jenis Kelamin, Tahun 2000.....	11
Tabel 3.1.1b.	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 1930 – 2000	12
Tabel 3.1.1c.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 1930-2000	13
Tabel 3.2.1.	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1971, 1980, 1990 dan 2000	14
Tabel 3.2.2	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Luas Wilayah di Provinsi Jawa Barat Tahun 1971, 1980, 1990 dan 2000 ..	15
Tabel 3.3.1a.	Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 1990 dan 2000	17
Tabel 3.3.1b.	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat Tahun 1980, 1990 dan 2000	18
Tabel 3.3.2a.	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan, dan Jenis Kelamin Tahun 2000	19
Tabel 3.3.2b.	Persentase Penduduk Perkotaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1980, 1990 dan 2000	20
Tabel 3.3.3a	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Sex Rasio Tahun 2000	21

Tabel 3.3.3b	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Periode 1980-2000	22
Tabel 3.3.4	Persentase Penduduk Provinsi Jawa Barat Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Status Perkawinan Tahun 1990 dan 2000.....	23
Tabel 4.1.1a	Rata-rata Anak yang Pernah dilahirkan Hidup menurut Kelompok Umur Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	26
Tabel 4.1.1b.	Rata-rata Anak yang Pernah dilahirkan Hidup menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	27
Tabel 4.1.1c.	Kecenderungan Angka Kelahiran Total (TFR) di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Periode 1990-2000	28
Tabel 4.1.3	Rasio Anak-Ibu (CWR) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	29
Tabel 4.1.4	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	30
Tabel 4.2a	Proporsi Anak Masih Hidup menurut Kelompok Umur Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	31
Tabel 4.2b	Proporsi Anak Masih Hidup menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	32
Tabel 4.2c	Kecenderungan Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 1980-2000	33
Tabel 5.1.1	Migrasi Masuk Semasa Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1995 dan 2000	36
Tabel 5.1.2	Migrasi Total Masuk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 1995 dan 2000	37
Tabel 5.1.3	Jumlah Migran Masuk Risen (Tempat Tinggal Lima Tahun yang Lalu) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000..	38
Tabel 5.2.	Persentase Migran Risen yang Masuk ke Jawa Barat menurut Daerah Asal dan Daerah Tujuan Tahun 2000	39
Tabel 5.3a	Migran Risen Masuk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	40
Tabel 5.3b	Migran Risen Masuk menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	41
Tabel 5.4.	Migran Risen Masuk menurut Alasan Utama Pindah dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	42

Tabel 6.1.1	APK menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	44
Tabel 6.1.2	APK menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Perdesaan, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	45
Tabel 6.2.1	APM menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	45
Tabel 6.2.2	APM menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Perdesaan, dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	46
Tabel 6.2.3	APM menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	47
Tabel 6.3.1	APS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000	48
Tabel 6.3.2	APS menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Perdesaan, dan Kelompok Umur Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000....	48
Tabel 6.4.1	Angka Putus Sekolah (APTS) menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	49
Tabel 6.4.2	Angka Putus Sekolah (APTS) menurut Kabupaten/Kota dan Usia Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	50
Tabel 6.5.1	Persentase Melek Huruf (MH) menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	51
Tabel 6.5.2	Kecenderungan Persentase Melek Huruf (MH) Penduduk di Provinsi Jawa Barat Periode 1996-2000.....	51
Tabel 6.5.3	Kecenderungan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 1999-2000.....	51
Tabel 7.1.1	Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Periode 1997-1999	53
Tabel 7.1.2	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Jawa Barat Periode 1998-2000.....	54
Tabel 7.1.3	Persentase Balita di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir Periode 1998-2000.....	56
Tabel 7.1.4	Persentase Balita di Provinsi Jawa Barat yang Pernah disusui menurut Lamanya disusui Periode 1998-2000.....	57
Tabel 7.2.1	Persentase Penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Keluhan Kesehatan Utama Periode 1998-2000.....	58

Tabel 7.2.2	Persentase Penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Keluhan Kesehatan Utama dan Jenis Kelamin Periode 1998-2000.....	58
Tabel 7.3.1	Kecenderungan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 1995-2000.....	59
Tabel 8.1.1	Jumlah Rumahtangga dan Laju Pertumbuhan Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Periode 1999-2000.....	61
Tabel 8.1.2	Kualitas Perumahan di Provinsi Jawa Barat Periode 1998-2000.....	62
Tabel 8.2.1a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Luas Lantai Hunian Tahun 2000.....	63
Tabel 8.2.1b	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Hunian di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	63
Tabel 8.2.2a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Atap Terluas Tahun 2000.....	64
Tabel 8.2.2b	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	65
Tabel 8.2.2c	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Atap Terluas Periode 1999-2000	66
Tabel 8.2.3a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2000.....	66
Tabel 8.2.3b	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Dinding Terluas Periode 1998-2000.....	67
Tabel 8.2.3c	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2000.....	67
Tabel 8.2.4a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Lantai Terluas Tahun 2000.....	68
Tabel 8.2.4b	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Lantai Terluas Periode 1998-2000.....	69
Tabel 8.2.4c	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2000.....	69
Tabel 8.3.1a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat yang Menggunakan Listrik (PLN dan Non PLN) Periode 1998-2000.....	70
Tabel 8.3.1b	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	71
Tabel 8.3.2a	Persentase Rumahtangga yang Mempunyai Fasilitas Air Minum Sendiri di Provinsi Jawa Barat Periode 1998-2000.....	72

Tabel 8.3.2b	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Air Minum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	73
Tabel 8.3.3a	Persentase Rumahtangga yang Menggunakan Air Bersih di Provinsi Jawa Barat Periode 1998-2000	73
Tabel 8.3.3b	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	74
Tabel 8.3.4a	Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat yang Menggunakan Air Minum Tanah dan Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat ≤ 10 m	75
Tabel 8.3.4b	Persentase Rumahtangga Pengguna Air Minum Tanah menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	76
Tabel 9.1.1	Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000...	77
Tabel 9.1.2	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	78
Tabel 9.2.	TPAK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	79
Tabel 9.3.1a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Kelamin Tahun 2000.....	80
Tabel 9.3.1b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000.....	81
Tabel 9.4	Persentase Pekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 1980-2000.....	82
Tabel 9.5	Persentase Pekerja menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin dan Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 1990-2000.....	83
Tabel 9.6.	Persentase Pekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 1995-2000.....	85

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000.....	18
Grafik 6.1. Rasio Murid Terhadap Sekolah menurut Tingkat Sekolah di Provinsi Jawa Barat Periode 1998/1999 dan 1999/2000 Provinsi Jawa	43
Grafik 7.1. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Jawa Barat Tahun 1998-2000.....	54

<https://jabar.bps.go.id>

RINGKASAN

Publikasi Kependudukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai situasi penduduk provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Data yang disajikan diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui Survei Modul Kependudukan Sensus Penduduk 2000, Sensus Penduduk 2000 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000.

Setelah terjadi pemecahan wilayah provinsi Jawa Barat pada awal Oktober 2000 menjadi provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, provinsi Jawa Barat sekarang terdiri atas 16 kabupaten dan 6 kota. Jumlah kecamatan sebanyak 447 buah dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 5.748 buah. Mayoritas penduduk Jawa Barat beragama Islam.

Penduduk Jawa Barat masih tergolong penduduk muda tetapi sedang dalam proses transisi, yaitu peralihan dari penduduk muda ke penduduk tua. Tingkat kematian penduduk di daerah ini masih tinggi, tetapi penurunannya cukup menggembirakan.

Migran risen yang masuk ke Provinsi Jawa Barat umumnya menuju kedua lokasi utama yaitu Bobek (Kabupaten/Kota Bogor dan Kabupaten/Kota Bekasi) dan Kabupaten/Kota Bandung. Sedangkan migran dalam provinsi Jawa Barat umumnya pindah ke Bogor dan Bekasi (Bobek). Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah utama penerima migran dari Provinsi DKI Jakarta.

Pendidikan merupakan determinan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, baik pada level individu maupun pada level masyarakat. Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang angka putus sekolahnya paling tinggi adalah kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten/Kota Cianjur dan Kabupaten/Kota Garut, terutama pada usia pendidikan menengah. Sekitar 7,5 persen penduduk Jawa Barat masih buta huruf, dan persentase yang lebih besar pada perempuan. Kabupaten/Kota dengan tingkat buta huruf paling tinggi adalah Kabupaten/Kota Indramayu.

Arah program pembangunan kesehatan di provinsi Jawa Barat adalah meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, menuju "Indonesia Sehat 2010". Fakta yang ditemukan dalam analisis ini, jumlah puskesmas dan tenaga kesehatan tidak bertambah, namun balai pengobatan meningkat. Dominasi dukun sebagai penolong kelahiran masih tinggi. Hanya sekitar 38 persen balita yang disusui selama 2 tahun plus, dan penyakit yang paling populer adalah panas, batuk dan pilek.

Secara umum kualitas perumahan di provinsi/Kota Jawa Barat meningkat, namun dari sisi kuantitas pembangunan perumahan tersebut peningkatannya tidak sepesat laju pertumbuhan penduduk dan rumah tangga. Masih banyak penduduk di daerah ini yang tidak mempunyai rumah tinggal, terutama rumah tinggal yang layak huni.

Di bidang ketenagakerjaan, transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian terjadi relatif lambat. Angka pengangguran cukup tinggi dan percepatan pertumbuhan angka pengangguran relatif tinggi pada kaum perempuan. Angka persentase pekerja keluarga di Provinsi Jawa Barat masih sangat tinggi, terutama pada kaum perempuan. Ini mengindikasikan tingginya tenaga kerja perempuan yang kurang produktif.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah saat ini dirasakan kesadaran dan kepedulian pemerintah terhadap data atau informasi kuantitatif sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan di daerah semakin meningkat. Penyediaan data atau informasi statistik karenanya menjadi bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri.

Salah satu jenis data statistik yang semakin diperlukan adalah data kependudukan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, tidak ada satu pun program yang tidak berkaitan dengan penduduk, sebagai obyek sekaligus subyek. Pembangunan itu sendiri adalah suatu proses yang hasil akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Di Propinsi Jawa Barat, salah satu kebijakan strategis pembangunan kependudukan adalah peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan semakin penting. Di sisi lain, ketersediaan data kependudukan yang menyeluruh dan mengacu kepada kebutuhan pembangunan sampai saat ini dirasakan masih kurang dan menjadi salah satu masalah sentral untuk diatasi. Namun demikian usaha ke arah melengkapi data kependudukan yang akurat dari waktu ke waktu semakin ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS), baik di pusat maupun di daerah senantiasa berupaya secara maksimal untuk meningkatkan ragam dan mutu data statistik kependudukan dengan misi utama demi akuratnya perencanaan pembangunan kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sejak tahun 1990 Jawa Barat, yang saat ini terdiri atas 16 kabupaten dan 6 kota, mendapat predikat sebagai propinsi berpenduduk terbanyak mengeser Jawa Timur (BPS, 1993: Profil Kependudukan Indonesia). Tidak mengherankan apabila dengan jumlah penduduk yang tergolong besar tersebut permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks. Seperti diketahui, propinsi Jawa Barat dalam rencana strategis pembangunan Jawa Barat 2001-2010 telah menetapkan target dari strategi operasional pembangunannya yaitu menjadikan Jawa Barat sebagai propinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010. Salah satu misi pembangunan yang dicanangkan adalah terbentuknya masyarakat madani Jawa Barat yang sejahtera: *cageur, bageur, bener, pinter tur singer*, yang artinya "benar, cerdas, kreatif, terampil, dan terdidik" (Bapeda Jawa Barat, 2000).

Banyak permasalahan yang menuntut penanganan sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran tersebut. Di bidang kependudukan misalnya, selama ini telah teridentifikasi dan menjadi wacana dialog di kalangan praktisi dan perencana daerah, bahwa masalah belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, migrasi, pengangguran dan kualitas pendidikan yang rendah merupakan rangkaian problematika kependudukan Jawa Barat yang cukup berat untuk ditangani. Karena itu, di kalangan para perencana daerah dewasa ini dirasakan, bahwa semakin banyak tersedia ragam data kependudukan berikut karakteristiknya, akan semakin mudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada.

Karakteristik penduduk yang akan dibahas dalam analisis ini secara garis besar dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu karakteristik demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan rumahtangga. Karakteristik penduduk tersebut dikumpulkan secara berkesinambungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei. Sumber-sumber data tersebut antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Sumber data utama yang akan digunakan dalam penulisan profil atau gambaran kependudukan di

Bab I. Pendahuluan

Jawa Barat tahun 2000 adalah data yang diperoleh dari hasil Survei Modul Kependudukan, yang dikumpulkan melalui dokumen SP2000-M. Data lainnya akan digunakan sebagai data penunjang, jika diperlukan.

1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kependudukan di Jawa Barat, baik dari segi jumlah, persebaran, komposisi, komponen, karakteristik, variasi antar kabupaten/kota, perkembangan antar waktu, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan data demografi lainnya. Beragam permasalahan di bidang kependudukan diharapkan dapat tersedia lebih banyak dan kaya dengan tersusunnya publikasi ini.

Secara spesifik tujuan penyusunan analisis ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang :

1. Pola dan kecenderungan komponen demografi: fertilitas, mortalitas dan migrasi.
2. Kualitas penduduk, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Profil Kependudukan Jawa Barat Tahun 2000 ini mencakup hampir semua permasalahan umum demografi, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Juga mencakup masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan penduduk, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Cakupan wilayah yang akan dianalisis adalah wilayah administratif Propinsi Jawa Barat, tanpa Propinsi Banten.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan profil kependudukan ini terutama berasal dari hasil Survei Modul Kependudukan SP2000 dan data Susenas 2000. Tentu saja, tidak semua permasalahan kependudukan dapat digali dari kedua sumber data yang sangat terbatas tersebut. Penulis berusaha menampilkan permasalahan kependudukan dari sumber data lain yang ada semaksimal mungkin, seperti Daerah Dalam Angka dan dari publikasi Statistik Potensi Desa (Podes) SP 2000.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan profil kependudukan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, sumber data, dan sistematika penulisan. Bab 2 menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Jawa Barat, seperti keadaan geografis, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya.

Bab 3 menganalisis agregat dan komposisi penduduk, utamanya membahas mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk yang dirinci menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, kabupaten/kota, dan daerah perkotaan dan perdesaan.

Bab 4, 5, 6 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Migrasi di Jawa Barat merupakan hal yang penting karena Jawa Barat adalah satu-satunya propinsi di Pulau Jawa yang mempunyai migrasi neto positif. Untuk bab fertilitas, yang akan dibahas adalah mengenai anak lahir hidup, rata-rata paritas lengkap, rasio anak ibu (*child woman ratio - CWR*), umur perkawinan pertama (*singulate mean age married - SMAM*), dan kecenderungan angka fertilitas total (*total fertility rate - TFR*) Jawa Barat. Sedangkan pada bab mortalitas akan dibahas mengenai proporsi anak masih hidup (*AMH*), dan kecenderungan angka kematian bayi (*infant mortality rate - IMR*) Jawa Barat.

Bab 7 mengulas kualitas penduduk di bidang pendidikan dilihat melalui penghitungan angka partisipasi kasar (*APK*), angka partisipasi murni (*APM*), angka partisipasi sekolah (*APS*), angka putus sekolah (*APTS*) dan persentase melek huruf (*MH*). Sedangkan bab 8 membahas mengenai masalah ketenagakerjaan, yaitu mengenai komposisi penduduk usia kerja, angka tingkat partisipasi angkatan kerja (*TPAK*), pengangguran (tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran), dan komposisi tenaga kerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan.

Bab 9 mengenai perumahan. Beberapa aspek penting yang dibahas dalam bab ini adalah pertama, mengenai gambaran umum perumahan di Jawa Barat. Kedua, kondisi fisik bangunan dilihat melalui penghitungan rata-rata luas lantai hunian, persentase rumahtangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, genteng dan beton, persentase rumahtangga yang menghuni rumah berdinding tembok dan kayu, dan persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah dan lainnya. Juga akan dibahas mengenai utilitas dan fasilitas tempat tinggal, yaitu rumahtangga yang menggunakan listrik, rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri, rumahtangga yang menggunakan air bersih, dan rumahtangga yang menggunakan sumber air minum dari dalam tanah.

Bab 10 membahas tentang kesehatan penduduk, utamanya mengenai upaya perbaikan derajat kesehatan yang dilakukan penduduk Jawa Barat, dan melihat sampai sejauhmana perkembangan status kesehatan penduduk Jawa Barat.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Propinsi Jawa Barat (masih termasuk Propinsi Banten) adalah sekitar 44 ribu km², atau sekitar 32,8 persen dari luas Pulau Jawa atau 2,18 persen dari luas Indonesia. Secara geografis propinsi ini terletak di sebelah barat pulau Jawa, berbatasan dengan Propinsi Banten di sebelah barat, Laut Jawa dan Propinsi DKI Jakarta di bagian utara, Propinsi Jawa Tengah di sebelah timur, dan Samudera Indonesia di bagian selatan.

Setelah terjadi pemekaran menjadi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten (berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000), Jawa Barat sekarang terdiri atas 16 kabupaten dan 6 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 447 buah dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 5.748 buah (berdasarkan hasil Potensi Desa SP2000). Di tingkat kabupaten, jumlah kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Bandung, yaitu sebanyak 42 kecamatan, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Purwakarta yaitu hanya 11 kecamatan. Untuk tingkat kota, kecamatan terbanyak terdapat di Kota Bandung (26 kecamatan) dan yang paling sedikit jumlah kecamatannya adalah Kota Cirebon (5 kecamatan). Tabel 2.1 memuat jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kab. Bogor	30	425
02	Kab. Sukabumi	30	338
03	Kab. Cianjur	24	341
04	Kab. Bandung	42	451
05	Kab. Garut	31	405
06	Kab. Tasikmalaya	30	412
07	Kab. Ciamis	34	361
08	Kab. Kuningan	19	369
09	Kab. Cirebon	23	424
10	Kab. Majalengka	21	330
11	Kab. Sumedang	18	269
12	Kab. Indramayu	22	310
13	Kab. Subang	22	250
14	Kab. Purwakarta	11	192
15	Kab. Karawang	20	307
16	Kab. Bekasi	15	187
17	Kota Bogor	6	68
18	Kota Sukabumi	5	33
19	Kota Bandung	26	139
20	Kota Cirebon	5	22
21	Kota Bekasi	7	52
22	Kota Depok	6	63
Jawa Barat		447	5.748

Sumber : BPS, Potensi Desa (Podes) SP2000

Bab II Gambaran Umum Wilayah.

Propinsi Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang paling subur di Pulau Jawa dan kaya akan Sumber Daya Alam, dialiri sungai-sungai dan gunung-gunung yang menjulang. Hingga saat ini terdapat sekitar 4.827 buah desa yang dilalui sungai. Sungai-sungai ini digunakan selain untuk mandi, cuci, dan minum, juga dimanfaatkan untuk irigasi, industri/pabrik, sebagian kecil digunakan sebagai alat transportasi, dan lainnya (BPS, Potensi Desa SP2000). Selain sungai-sungai tersebut di Jawa Barat juga terdapat gunung-gunung, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Gunung-gunung ini membuat tanah menjadi subur sehingga sangat cocok bagi pertanian, selain dapat pula dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap/panas.

2.2. Keadaan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Jawa Barat dititikberatkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan sektor industri yang ditunjang oleh sektor pertanian lebih diprioritaskan. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat pada tahun 1998 menunjukkan angka negatif yaitu -17,77 persen (dengan migas) dan -18,74 persen (tanpa migas). Hal ini terjadi akibat krisis ekonomi yang cukup parah. Tahun 1999 kondisinya sudah mulai membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh angka LPE yang positif (2,08 persen - dengan migas dan 3,42 persen - tanpa migas).

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Perkapita Jawa Barat
Tahun 1998-1999 (Harga Konstan 1993)

Tahun	PDRB Jawa Barat (milyar rupiah)	PDB Nasional (milyar rupiah)	PDRB Perkapita Jawa Barat (ribu rupiah)	PDB Perkapita Nasional (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998	55.266,7	341.817,2	1.341,3	1.684,9
1999	57.158,5	344.239,8	1.362,4	1.671,7

Sumber : BPS Jawa Barat, Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1999

Kondisi ekonomi Jawa Barat mulai membaik saat memasuki tahun 1999. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dari 55.266,7 milyar rupiah pada tahun 1998 menjadi 57.158,5 milyar rupiah pada tahun 1999. PDRB Perkapita juga mengalami peningkatan dari 1.341,3 ribu rupiah pada tahun 1998 meningkat menjadi 1.362,4 ribu rupiah pada tahun 1999.

2.3. Keadaan Sosial Budaya

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jawa Barat beragama Islam, yaitu sebanyak 32.434.912 orang (sekitar 98 persen). Walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim namun kehidupan beragama antara masyarakat muslim dan non muslim di Jawa Barat memperlihatkan tingkat kerukunan yang baik. Mereka dapat hidup damai berdampingan dan memiliki toleransi yang tinggi.

Tabel 2.3
Jumlah Pemeluk Agama Di Jawa Barat
menurut Agama yang Dianut

Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
(1)	(2)	(3)
Islam	32.434.912	97,89
Katolik	199.031	0,60
Protestan	383.696	1,16
Hindu	37.215	0,11
Budha	78.061	0,24
Jumlah	33.132.945	100,00

Sumber : Kanwil Dep. Agama Jawa Barat, Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1999

Sarana peribadatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, terutama pada periode 1997-1998. Namun untuk tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam, pada periode 1998-1999, mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya mesjid atau tempat ibadah umat Islam lainnya yang rusak/hancur akibat bencana alam, seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain.

Tabel 2.4
Jumlah Tempat Peribadatan Di Jawa Barat

Agama	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah
	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)
Islam	137.893	148.770	146.475
Katolik	91	116	116
Protestan	224	760	760
Hindu	8	23	27
Budha	48	73	73
Jumlah	138.264	147.798	147.451

Sumber : Kanwil Dep. Agama Jawa Barat, Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1997, 1998, dan 1999

Dalam kehidupan bermasyarakat, kriminalitas sudah merupakan bagian dari masalah penduduk sehari-hari. Angka kejahatan yang masih tinggi menunjukkan tingkat kerawanan sosial yang semakin kompleks. Menurut laporan Pengadilan Negeri Jawa Barat tahun 1999 tercatat sebanyak 9.135 orang telah melakukan tindak kejahatan dan oleh pengadilan sudah diputus sebagai narapidana (Daerah Dalam Angka Jawa Barat, 1999: 83). Dibandingkan dengan tahun 1998, angka ini mengalami penurunan dari 10.961 orang. Jika dilihat menurut jenis kelamin, narapidana laki-laki masih lebih banyak dibandingkan narapidana perempuan, namun jumlahnya semakin bertambah yaitu dari 161 orang menjadi 265 orang. Salah satu faktor pendorong

terjadinya kriminalitas adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat terjadi PHK yang banyak terjadi sejak goncangnya perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997.

Di jaman teknologi yang serba *computerize* saat ini, banyak sekali jenis media komunikasi dan informasi yang dapat digunakan oleh penduduk. Media tersebut jika kita tidak pandai memanfaatkannya dapat berimplikasi negatif, namun jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan akan memberikan dampak positif bagi pemakai. Kehadiran berbagai macam media komunikasi dan informasi bagi transformasi pengetahuan sangat besar dan penting artinya. Dari sekian banyak ragam media komunikasi yang tersedia hanya akan ditampilkan tiga jenis media saja di sini, yaitu radio, televisi dan surat kabar.

Tabel 2.5.
Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat kabar menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat tahun 2000

Jenis Kelamin	Mendengar Radio	Menonton TV	Membaca surat kabar
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki (L)	44,53	75,92	8,58
Perempuan (P)	42,57	82,03	10,39
L + P	43,56	78,96	9,48

Sumber: BPS Jawa Barat, Susenas 2000

Menurut hasil Susenas 2000 penduduk yang mendengarkan radio (selama seminggu sebelum pencacahan) sebanyak 43,56 persen. Sedangkan media informasi televisi tampaknya lebih populer dibandingkan radio, terbukti dari persentase penduduk yang menonton televisi sebanyak 78,96 persen. Membaca surat kabar rupanya tidak terlalu banyak dipilih oleh sebagian penduduk Jawa Barat. Persentasenya pun kecil hanya sebesar 9,48 persen. Kecenderungan untuk menonton televisi pada penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, besarnya persentase penduduk perempuan yang menonton televisi adalah 82,03 persen dan penduduk laki-laki sebesar 75,92 persen. Kemungkinan perempuan mempunyai lebih banyak waktu untuk menonton televisi dibandingkan laki-laki, karena mereka lebih banyak yang tinggal di rumah yang memungkinkan untuk menikmati acara televisi lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kegiatan ini didukung pula oleh banyaknya acara televisi siang hari yang diperuntukkan bagi kaum ibu atau perempuan. Laki-laki bukannya tidak pernah menonton televisi, namun kemungkinan mereka lebih selektif dalam memilih acara televisi yang akan ditonton. Sehingga persentase penduduk laki-laki yang menonton televisi, menurut hasil Susenas 2000, lebih kecil dibandingkan perempuan.

Sebaliknya terjadi pada penduduk yang mendengarkan radio, persentase penduduk laki-laki yang mendengarkan radio (44,53 persen) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan (42,57 persen). Dengan waktunya yang serba terbatas, kemungkinan karena aktivitas di luar rumah yang banyak, kaum laki-laki masih menyempatkan diri untuk mendengarkan radio. Dibandingkan menonton televisi, mendengarkan radio nampaknya lebih mudah dilakukan.

Dalam hal membaca surat kabar, ternyata persentase penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, masing-masing sebesar 10,39 persen untuk perempuan dan 8,58 persen untuk laki-laki. Seperti halnya menonton televisi, kaum perempuan cenderung memiliki waktu luang lebih banyak untuk membaca surat kabar dibandingkan laki-laki. Dengan

waktu yang sempit kaum laki-laki menyempatkan diri membaca surat kabar, dan kegiatan inipun dilakukan biasanya di sela-sela waktu istirahat dengan bacaan yang juga terseleksi dengan baik. Mereka cenderung membaca berita-berita penting saja.

Tabel 2.6.
Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi,
Membaca Surat kabar menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan
di Jawa Barat tahun 2000

Jenis Kelamin	Mendengar Radio	Menonton TV	Membaca surat kabar
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	45,08	88,55	20,87
Perdesaan (D)	44,53	75,92	8,58
K + D	45,97	84,67	16,92

Sumber: BPS Jawa Barat, Susenas 2000

Bila dibandingkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, dari tabel 2.6 terlihat bahwa penduduk di perkotaan persentase mendengarkan radio, menonton televisi, dan membaca surat kabar lebih besar dibandingkan di perdesaan. Fenomena ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat kehidupan masyarakat di perkotaan yang lebih maju, akses ke berbagai fasilitas lebih mudah, terutama dalam hal menyerap informasi. Walaupun demikian, masyarakat yang menonton televisi baik di perkotaan maupun di perdesaan sama-sama memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan kegiatan mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Nampaknya kedua kegiatan ini merupakan hal yang paling mudah dilakukan di mana saja, dan tidak mengenal tingkat pendidikan seseorang.

Kegiatan membaca surat kabar di daerah perdesaan memiliki persentase paling kecil, yaitu hanya sebesar 8,58 persen. Kemungkinan faktor pendidikan dan pendapatan masyarakat di perdesaan yang masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan turut mempengaruhi minat masyarakat perdesaan untuk membaca surat kabar. Fakta menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) masyarakat perdesaan lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Persentase APS masyarakat perdesaan di Jawa Barat, menurut hasil survei kependudukan tahun 2000, adalah sebesar 95,55 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun. Sedangkan APS masyarakat perkotaan untuk kelompok umur yang sama adalah sebesar 97,13 persen (diuraikan lebih lengkap pada bab pendidikan).

BAB III AGREGAT DAN KOMPOSISI PENDUDUK

3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jika berkualitas, jumlah penduduk di suatu daerah merupakan potensi pembangunan yang besar. Sebaliknya jika suatu wilayah memiliki jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi dengan kualitas yang rendah justru akan menjadi beban besar bagi proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Penduduk Jawa Barat (tanpa Provinsi Banten) hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP2000) adalah sebanyak 35,72 juta jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 18,05 juta jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 17,67 juta jiwa (Tabel 3.1.1a).

Tabel 3.1.1a
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Kelamin, Tahun 2000¹⁾

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bogor	1.830.433	1.678.393	3508826
2	Kab. Sukabumi	1.050.096	1025045	2075141
3	Kab. Cianjur	983.762	962643	1946405
4	Kab. Bandung	2.141.402	2016681	4158083
5	Kab. Garut	1.043.242	1007850	2051092
6	Kab. Tasikmalaya	1.028.565	1035510	2064075
7	Kab. Ciamis	804.718	814034	1618752
8	Kab. Kuningan	493.508	491284	984792
9	Kab. Cirebon	965.566	965500	1931066
10	Kab. Majalengka	557.611	564030	1121641
11	Kab. Sumedang	480.188	488660	968848
12	Kab. Indramayu	798.713	791317	1590030
13	Kab. Subang	661.003	668835	1329838
14	Kab. Purwakarta	352.005	348099	700104
15	Kab. Karawang	901.180	886139	1787319
16	Kab. Bekasi	835.395	833099	1668494
17	Kota. Bogor	378.365	372454	750819
18	Kota. Sukabumi	126.637	125783	252420
19	Kota. Bandung	1.073.568	1062692	2136260
20	Kota. Cirebon	135.286	136977	272263
21	Kota. Bekasi	828.717	835085	1663802
22	Kota. Depok *)	578.089	565314	1143403
Jawa Barat		18.048.049	17.675.424	35.723.473

Sumber : BPS. Hasil Pengolahan Survei Kependudukan SP2000

Keterangan : *) Datanya tergabung dengan Kab. Bogor

1) Jumlah penduduk tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap sebesar 5 445 jiwa.

Bab. III. Agregat dan Komposisi Penduduk

Tabel 3.1.1b
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 1930 – 2000

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					
		1930	1961	1971	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	722.638	1.304.156	1.667.687	2.493.843	3.736.897	3508826
2	Kab. Sukabumi	626.959	964.595	1.210.638	1.517.631	1.848.282	2075141
3	Kab. Cianjur	529.823	899.503	1.125.450	1.387.578	1.662.089	1946405
4	Kab. Bandung	1.036.472	1.596.409	1.985.410	2.669.200	3.201.357	4158083
5	Kab. Garut	670.870	924.543	1.200.407	1.483.035	1.748.634	2051092
6	Kab. Tasikmalaya	886.973	1.017.676	1.313.321	1.593.189	1.814.980	2064075
7	Kab. Ciamis	357.114	1.014.626	1.225.597	1.367.578	1.478.476	1618752
8	Kab. Kuningan	383.580	527.001	658.576	786.414	892.294	984792
9	Kab. Cirebon	678.123	904.114	1.041.874	1.331.690	1.649.483	1931066
10	Kab. Majalengka	444.163	645.297	749.096	897.722	1.032.032	1121641
11	Kab. Sumedang	330.552	527.439	637.918	723.627	831.835	968848
12	Kab. Indramayu	509.745	862.248	985.361	1.237.450	1.447.877	1590030
13	Kab. Subang	325.282	-	898.227	1.065.251	1.206.715	1329838
14	Kab. Purwakarta	239.915	1.086.422	371.491	457.973	563.102	700104
15	Kab. Karawang	445.740	833.740	1.003.712	1.236.604	1.491.992	1787319
16	Kab. Bekasi	536.370	692.817	830.838	1.143.463	2.104.459	1668494
17	Kota. Bogor	65.431	154.092	195.142	246.946	271.711	750819
18	Kota. Sukabumi	34.191	80.438	96.242	109.898	119.981	252420
19	Kota. Bandung	166.815	972.566	1.200.380	1.461.407	2.058.649	2136260
20	Kota. Cirebon	54.079	158.299	178.529	223.504	254.878	272263
21	Kota. Bekasi	-	-	-	-	-	1663802
22	Kota. Depok *)	-	-	-	-	-	1143403
Jawa Barat		9.044.835	15.165.981	18.575.896	23.434.003	29.415.723	35.723.473

Sumber : BPS. Hasil SP1930. SP1961. SP1971. SP1980. SP1990. dan SP2000

Keterangan : *) Datanya tergabung dengan Kab. Bogor

1) Jumlah penduduk tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap sebesar 5 445 jiwa

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Tabel 3.1.1b menunjukkan pada tahun 1930 penduduk Jawa Barat baru berjumlah 9,04 juta jiwa dan pada tahun 1961 penduduk Jawa Barat tercatat sebanyak 15,17 juta jiwa. meningkat menjadi 18,58 juta jiwa pada tahun 1971 dan 23,43 juta jiwa pada tahun 1980. Pada tahun 1990 jumlah tersebut menjadi 29,41 juta jiwa. Hasil survei kependudukan SP2000 bertambah menjadi 35,72 juta jiwa. Kecenderungan jumlah penduduk yang terus bertambah dari periode sensus yang satu ke periode sensus berikutnya tidak lepas dari daya tarik Provinsi Jawa Barat itu sendiri, baik dilihat dari potensi sumber daya alamnya maupun hal-hal

lain seperti ketersediaan lapangan kerja yang menarik perhatian para pendatang dari luar Provinsi ini.

Kecenderungan laju/tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama kurun waktu 1990-2000 rata-rata tumbuh sebesar 1,90 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tingkat pertumbuhan penduduk antara 1980-1990 yang rata-rata tumbuh sebesar 2,30 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota pada kurun waktu 1990-2000, rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di beberapa kabupaten/kota cukup ekstrim, yaitu di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 10 Desember 1996 Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, sehingga rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi tahun 1990-2000 menjadi -2,36 persen. Sedangkan di Kota Bogor rata-rata pertumbuhan penduduk cukup tinggi (11,05 persen) disebabkan adanya perluasan wilayah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 6 Februari 1995), yaitu sebanyak 46 desa yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Bogor menjadi wilayah Kota Bogor.

Tabel 3.1.1c
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 1930 – 2000¹⁾

No	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk				
		1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1990-2000 ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bogor	1.95	2.44	4.52	4.13	-0,65
2	Kab. Sukabumi	1.40	2.32	2.51	1.99	1,20
3	Kab. Cianjur	1.72	2.29	2.33	1.82	1,64
4	Kab. Bandung	1.40	2.23	3.31	1.83	2,73
5	Kab. Garut	1.04	2.67	2.35	1.66	1,66
6	Kab. Tasikmalaya	0.44	2.61	2.15	1.31	1,33
7	Kab. Ciamis	3.43	1.93	1.21	0.78	0,94
8	Kab. Kuningan	1.03	2.28	1.97	1.27	1,02
9	Kab. Cirebon	0.93	1.44	2.73	2.16	1,64
10	Kab. Majalengka	1.21	1.52	2.01	1.40	0,86
11	Kab. Sumedang	1.52	1.94	1.40	1.40	1,58
12	Kab. Indramayu	1.71	1.36	2.53	1.58	0,97
13	Kab. Subang	-	-	1.89	1.25	1,01
14	Kab. Purwakarta	2.13	1.59	2.32	2.09	2,27
15	Kab. Karawang	2.04	1.90	2.31	1.89	1,88
16	Kab. Bekasi	0.83	1.85	3.57	6.29	-2,36
17	Kota. Bogor	2.80	2.45	2.60	0.94	11,05
18	Kota. Sukabumi	2.80	1.83	1.48	0.87	7,97
19	Kota. Bandung	5.85	2.15	2.20	3.47	0,38
20	Kota. Cirebon	3.53	1.22	2.51	1.31	0,68
21	Kota. Bekasi	-	-	-	-	-
22	Kota. Depok	-	-	-	-	-
Jawa Barat		1.68	2.05	2.61	2.30	

Sumber : BPS. Hasil SP1930. SP1961. SP1971. SP1980. SP1990. dan SP2000¹⁾

Keterangan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 10 Desember 1996 Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, sehingga rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi tahun 1990-2000 menjadi -2,36 persen. Sedangkan di Kota Bogor rata-rata pertumbuhan penduduk cukup tinggi (11,05 persen) disebabkan adanya perluasan wilayah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 6 Februari 1995), yaitu sebanyak 46 desa yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Bogor menjadi wilayah Kota Bogor.

3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk pada hakekatnya merupakan komposisi penduduk berdasarkan geografis. Dengan data persebaran penduduk dapat dilihat apakah komposisi tersebut merata atau tidak. Oleh karena itu persebaran dapat dilihat menurut wilayah administratif yang lebih kecil. Melalui persebaran penduduk dapat dilihat di mana saja terjadi pemusatan penduduk. Indikator persebaran ini dinyatakan dalam persentase, sehingga dapat dilihat polanya.

Sejalan dengan laju/tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin menurun, persebaran penduduknya juga mengikuti pola yang sama. Tabel 3.2.1 menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten/kota memperlihatkan persentase yang menurun, kecuali di Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi memperlihatkan persentase yang cenderung meningkat.

Tabel 3.2.1
Persentase Persebaran Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1971, 1980, 1990, dan 2000

Kabupaten./Kota	% Wilayah	1971	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
01. Kab. Bogor	9.48	8.97	10.64	12.70	9.82
02. Kab. Sukabumi	11.18	6.52	6.48	6.28	5.81
03. Kab. Cianjur	10.00	6.05	5.92	5.65	5.45
04. Kab. Bandung	8.54	10.62	11.39	10.88	11.64
05. Kab. Garut	8.80	6.46	6.33	5.94	5.74
06. Kab. Tasikmalaya	7.92	7.07	6.79	6.17	5.77
07. Kab. Ciamis	7.29	6.59	5.83	5.03	4.53
08. Kab. Kuningan	3.23	3.54	3.35	3.03	2.76
09. Kab. Cirebon	2.82	5.60	5.68	5.61	2.76
10. Kab. Majalengka	3.50	4.12	3.83	3.51	3.14
11. Kab. Sumedang	4.11	3.43	3.08	2.83	2.71
12. Kab. Indramayu	5.60	5.30	5.28	4.92	4.45
13. Kab. Subang	5.39	4.83	4.55	4.10	3.72
14. Kab. Purwakarta	2.81	1.99	1.95	1.91	1.94
15. Kab. Karawang	4.56	5.40	5.28	5.07	5.00
16. Kab. Bekasi	3.13	4.47	4.88	7.15	4.67
17. Kota Bogor	0.33	1.05	1.05	0.92	2.10
18. Kota Sukabumi	0.14	0.52	0.47	0.41	0.71
19. Kota Bandung	0.49	6.46	6.24	6.99	5.98
20. Kota Cirebon	0.11	0.96	0.95	0.86	0.76
21. Kota Bekasi	0.58	-	-	-	4.66
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	3.20
Jawa Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS. Hasil SP1971, SP1980, SP1990, dan SP2000

Peningkatan persentase persebaran penduduk di Kabupaten Bandung disebabkan oleh banyaknya penduduk yang berasal dari Kota Bandung bermukim di kabupaten ini karena alasan perumahan. Akibat wilayah Kota Bandung yang sudah "given" dan padat serta tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kompleks perumahan atau pemukiman sehingga para pengembang perumahan bereksistensi mendirikan pemukiman di wilayah sekitar Kota Bandung, yaitu Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan laju pertumbuhan rumahtangga di Kabupaten Bandung yang mencapai 20,61 persen pada periode 1999-2000 menurut data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 1999 dan 2000, yang akan dibahas pada Bab Perumahan.

Peningkatan persentase persebaran penduduk di Kabupaten Purwakarta terjadi, kemungkinan karena wilayah ini merupakan daerah lintasan penduduk Jawa Barat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta namun bermukim di Jawa Barat, misalnya wilayah Bandung. Dengan pertimbangan ekonomis, beberapa di antara mereka kemudian memilih untuk bermukim di kabupaten ini.

Sedangkan peningkatan persentase persebaran penduduk yang terjadi di Kota Bogor dan Kota Sukabumi adalah akibatnya terjadinya perluasan wilayah di kedua kota ini, yaitu beberapa wilayah yang semula merupakan wilayah Kabupaten Bogor, pada tahun 1995 menjadi wilayah Kota Bogor. Demikian pula dengan Kota Sukabumi, beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi pada kurang lebih tahun 1998 menjadi wilayah Kota Sukabumi. Persentase persebaran penduduk turun cukup drastis di Kabupaten Bekasi dari 7,15 persen di tahun 1990 menjadi hanya 4,67 persen di tahun 2000. Penyebabnya adalah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi pada tahun 1996 menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Tabel 3.2.2
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Luas Wilayah
di Provinsi Jawa Barat Tahun 1971. 1980. 1990. dan 2000

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	1971	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
01. Kab. Bogor	3.277.76	558	716	1.113	1.070
02. Kab. Sukabumi	3.867.16	360	380	470	536
03. Kab. Cianjur	3.460.82	251	401	480	562
04. Kab. Bandung	2.954.02	626	896	1.084	1.407
05. Kab. Garut	3.045.33	505	508	574	673
06. Kab. Tasikmalaya	2.740.17	477	578	662	753
07. Kab. Ciamis	2.520.54	398	554	587	642
08. Kab. Kuningan	1.117.00	607	666	799	881
09. Kab. Cirebon	974.00	1.062	1.367	1.693	1.982
10. Kab. Majalengka	1.210.00	785	742	854	926
11. Kab. Sumedang	1.421.82	399	491	585	681
12. Kab. Indramayu	1.935.27	491	630	748	821
13. Kab. Subang	1.864.00	438	550	647	713
14. Kab. Purwakarta	971.72	380	552	579	720
15. Kab. Karawang	1.578.45	581	712	945	1.132
16. Kab. Bekasi	1.082.68	519	891	1.639	1.541
17. Kota Bogor	112.74	9.051	10.855	11.927	6.659
18. Kota Sukabumi	48.44	7.921	9.045	9.871	5.210
19. Kota Bandung	168.06	14.823	18.055	12.246	12.711
20. Kota Cirebon	37.36	4.948	5.982	6.811	7.287
21. Kota Bekasi	201.55	-	-	-	8.255
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-
Jawa Barat	34.588.89	551	673	849	1.032

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber : BPS. Hasil SP71. SP80. SP90. dan SP2000

Data persebaran penduduk ini akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan ukuran kepadatan suatu daerah. Hal ini penting sebab suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar belum tentu dirasakan padat apabila memang memiliki wilayah yang luas. Kepadatan aritmetis atau kepadatan penduduk dinyatakan dalam bilangan banyaknya penduduk per km². Tabel 3.2.2 menunjukkan bahwa angka kepadatan ini dari dekade ke dekade terus memperlihatkan kenaikan. Hal ini ditunjukkan oleh data beberapa Sensus Penduduk yaitu tahun 1971 sebesar 551 orang per km², tahun 1980 sebesar 673 orang per km², tahun 1990 sebesar 849 orang per km², dan tahun 2000 menjadi 1.032 orang per km². Kecuali di Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kota Sukabumi menunjukkan tingkat kepadatan yang cenderung menurun akibat adanya perluasan/pemekaran wilayah di ketiga kabupaten/kota ini.

Wilayah terpadat di provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung. Dengan luas wilayah yang hanya 168.06 km² kota ini dihuni oleh sekitar 12.711 orang per km². Tampaknya kota ini mejadi tujuan utama para migran (pendatang) karena wilayah ini juga merupakan daerah industri. Akibatnya banyak sekali orang tertarik untuk mengadu nasib di sini. Mereka pun pindah dan menetap di wilayah ini, walaupun harus tinggal berdesak-desakan di rumah kontrakan yang sempit sekalipun.

3.3 Komposisi Penduduk

3.3.1. Komposisi Penduduk menurut Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk melibatkan banyak aspek. Jadi bila akan menganalisis komposisi penduduk harus dilihat dari aspek mana penduduk itu akan dianalisis. Komposisi penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin merupakan komposisi penduduk yang paling pokok, sebab kedua kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku demografi. Selain itu kedua ciri inipun mudah dikombinasikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, maupun geografis.

Menurut hasil Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17,7 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 17,6 juta jiwa atau lebih banyak 0,1 juta jiwa. Rasio jenis kelamin merupakan alat untuk menganalisis komposisi jenis kelamin. Tabel 3.3.1a memperlihatkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 1990 untuk setiap 100 penduduk perempuan secara rata-rata ada sekitar 100,51 penduduk laki-laki. Keadaan ini berlanjut pada tahun 2000 di mana rasionya menjadi 102,11. Kenaikan angka rasio jenis kelamin ini tidak mudah untuk diinterpretasikan. Diduga hal ini berkaitan dengan wilayah Jawa Barat yang sejak dua dekade belakangan ini merupakan daerah industri, sehingga banyak pendatang ke Jawa Barat. Hal ini ditunjang dengan positifnya angka migrasi di Jawa Barat.

Dari tabel 3.3.1a nampak ada kejanggalan pada angka sex ratio penduduk Jawa Barat kelompok umur tua, yaitu angkanya semakin besar. Seharusnya semakin tua kelompok umur penduduk maka sex rasionya semakin kecil, karena penduduk laki-laki semakin tua umurnya akan semakin berkurang jumlahnya, sedangkan penduduk perempuan walaupun mengalami penurunan tetapi mereka lebih mampu untuk bertahan hidup dibandingkan penduduk laki-laki baik karena faktor hormonal maupun oleh pengaruh gaya hidup (*life style*). Kejanggalan kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan pelaporan umur oleh responden. Responden cenderung menuakan umurnya beberapa tahun dari umur sebenarnya, terutama pada kelompok umur penduduk tua (*memory lapse*).

Tabel 3.3.1a
Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1990 dan 2000

Golongan Umur	Laki-laki		Perempuan		Rasio Jenis Kelamin	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	2.187.536	1.879.732	2.083.036	1.884.698	105.0	99.74
5-9	2.419.506	1.839.145	2.309.162	1.871.846	104.8	98.25
10-14	2.201.510	1.755.956	2.089.091	1.740.410	105.4	100.89
15-19	1.852.250	1.839.793	1.846.057	1.815.782	100.3	101.32
20-24	1.521.290	1.687.108	1.723.792	1.849.202	88.3	91.23
25-29	1.473.730	1.680.564	1.592.593	1.715.795	92.5	97.95
30-34	1.291.592	1.486.495	1.282.998	1.435.469	100.7	103.55
35-39	1.174.775	1.322.163	1.061.393	1.279.978	110.7	103.30
40-44	799.194	1.152.918	781.019	1.025.156	102.3	112.46
45-49	735.359	907.172	724.586	765.852	101.5	118.45
50-54	630.040	689.734	629.652	608.863	100.1	113.28
55-59	405.347	505.430	433.810	444.829	93.4	11.36
60-64	425.775	474.638	438.325	434.021	97.1	109.36
65-69	251.348	287.811	257.301	292.649	97.7	98.35
70-74	192.802	262.076	207.192	242.159	93.1	108.22
75+	173.719	274.313	185.902	266.268	93.4	103.02
Jumlah	17.735.773	18.048.049	17.645.909	17.675.424	100.5	102.11

Sumber : BPS. Hasil SP90 dan SP2000

Untuk lebih menggambarkan dengan jelas komposisi penduduk Jawa Barat menurut struktur umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk (gambar 3.1). Piramida penduduk menunjukkan dengan jelas distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selain itu piramida penduduk juga dapat menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dari setiap kelompok umur selain tingkat kematian dan perpindahan. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian makin lama makin mengecil hingga ke puncak piramida. Sedangkan wilayah dengan tingkat kelahiran rendah mempunyai bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya.

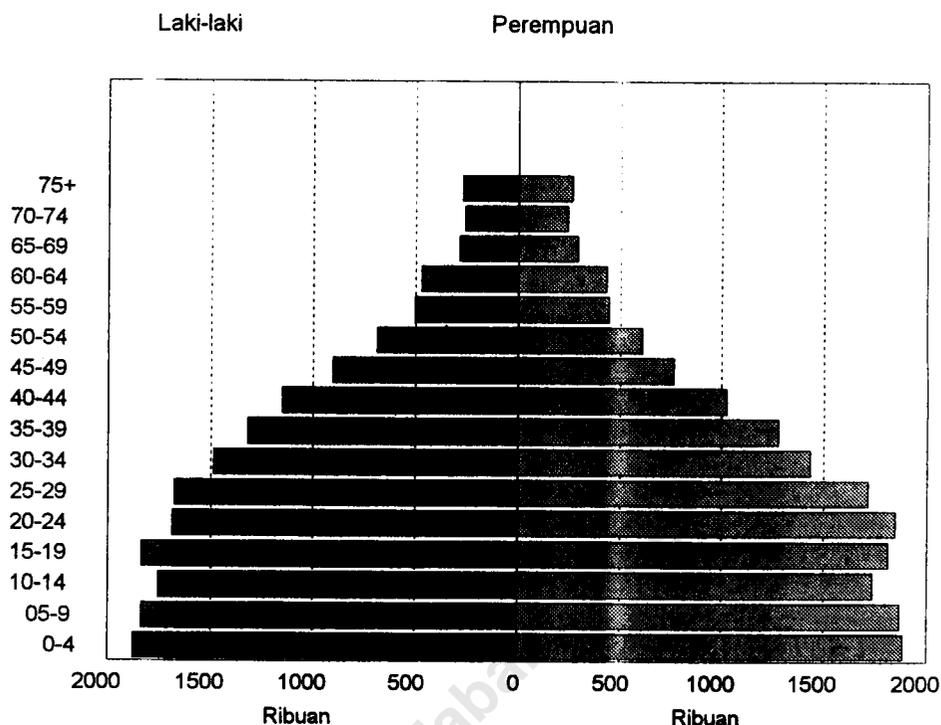
Dari gambar piramida penduduk Jawa Barat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, bahwa tingkat fertilitas di Jawa Barat sudah mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari perbedaan panjang batang piramida antara kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun. Batang piramida pada kelompok umur 0-4 tahun lebih pendek daripada batang piramida pada kelompok umur 5-9 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi penurunan tingkat fertilitas. Kedua, penduduk Jawa Barat tergolong penduduk muda menuju "transisi", bahkan cenderung tergolong penduduk produktif. Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida untuk kelompok umur 0-4, 5-9, 10-14 tahun yang tidak lebih panjang dari kelompok umur lainnya, terutama dengan kelompok umur 15-19 tahun. Namun batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas masih terlihat cukup pendek. Untuk golongan penduduk muda biasanya diperlihatkan dengan panjang batang piramida kelompok umur 0-4, 5-9, 10-14 tahun lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek.

Salah satu ukuran yang sering dipakai dalam mengamati struktur umur adalah angka beban ketergantungan. Angka ini menunjukkan seberapa jauh mereka yang berusia produktif harus menanggung mereka yang belum produktif dan pasca produktif. Ukuran inipun bisa

Bab. III. Agregat dan Komposisi Penduduk

dikaitkan dengan penggolongan penduduk, apakah penduduk suatu wilayah termasuk golongan penduduk muda atau penduduk tua.

Gambar 3.1
Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2000



Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000

Angka beban ketergantungan dan penggolongan kriteria penduduk diperlihatkan oleh tiga jenis data, yaitu jumlah penduduk usia di bawah 14 tahun (usia muda) yang belum siap kerja, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (usia tua) yang sudah purna karya, dan jumlah penduduk usia antara 15-64 tahun yang biasa disebut usia produktif. Selama kurun waktu 1980-2000 angka beban ketergantungan ini memperlihatkan kecenderungan menurun yakni 82,74 pada tahun 1980, dan 69,61 pada tahun 1990, dan tahun 2000 menjadi 54,48.

Tabel 3.3.1b
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1980, 1990, dan 2000

Kelompok Usia	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Muda (0-14)	42.3	37.6	30.71
2. Produktif (15-64)	54.7	58.8	64.72
3. Tua (65+)	3.0	3.6	4.55
Jumlah	100.0	100.0	100.00

Sumber : BPS. Hasil SP1980. SP1990. dan SP2000

Pada tahun 1980 struktur umur penduduk Provinsi Jawa Barat masih termasuk kriteria golongan muda. Hal ini terlihat dari persentase penduduk umur muda sebesar 42,3 persen, penduduk usia produktif 54,7 persen dan penduduk usia tua sebesar 3,0 persen. Tahun 2000 angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang akan membawa pada situasi transisi dari golongan muda menuju golongan umur tua yakni secara berurutan angka tersebut menjadi 30,71 persen, 64,72 persen dan 4,55 persen (Tabel 3.3.1b).

3.3.2. Komposisi Penduduk menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Penduduk di daerah perdesaan lebih banyak jumlahnya dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya desa/kelurahan di Jawa Barat yang berstatus perdesaan, yaitu dari total 7.224 desa/kelurahan di Jawa Barat, desa/kelurahan daerah perkotaan sebanyak 2.227 dan yang berstatus daerah perdesaan sebanyak 4.997 desa/kelurahan.

Tabel 3.3.2a.
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2000

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	9.077.680	8.970.369
Perempuan	8.893.792	8.781.632
Total	17.971.472	17.752.001

Sumber: BPS. Hasil Pengolahan SP2000

Istilah daerah perkotaan menurut versi statistik (BPS) adalah status yang disandang oleh suatu desa/kelurahan jika memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh jumlah skor tertentu dari potensi di desa/kelurahan tersebut, antara lain kepadatan penduduk, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan prasarana perkotaan. Jika skornya mencapai batas yang ditentukan maka desa/kelurahan tersebut berstatus perkotaan.

Data yang disajikan oleh tabel 3.3.2a memperlihatkan penduduk Jawa Barat yang berada di daerah perkotaan, dari tiga dekade sensus, terus menunjukkan peningkatan. Kenyataan ini dimungkinkan selain oleh banyaknya perpindahan dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, yang dikenal dengan istilah migrasi desa-kota, juga karena adanya perubahan status perdesaan menjadi perkotaan. Perubahan ini disebabkan adanya pembangunan prasarana perkotaan yang merata di setiap daerah. Perkembangan penduduk, ekonomi, sarana dan prasarana yang bercirikan masyarakat perkotaan juga membuat suatu daerah (desa/kelurahan) berubah menjadi perkotaan. Sehingga seluruh penduduknya digolongkan menjadi penduduk perkotaan (BPS, 1997: Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi Di Indonesia).

Bab. III. Agregat dan Komposisi Penduduk

Tabel 3.3.2b
Persentase Penduduk Perkotaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1980, 1990 dan 2000

Kabupaten/Kota	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	25.10	51.48	57.40
02. Kab. Sukabumi	13.37	18.06	24.49
03. Kab. Cianjur	12.91	14.55	24.79
04. Kab. Bandung	23.92	40.35	63.89
05. Kab. Garut	13.27	15.43	28.27
06. Kab. Tasikmalaya	15.13	20.42	29.17
07. Kab. Ciamis	6.05	9.50	22.03
08. Kab. Kuningan	6.73	17.13	28.16
09. Kab. Cirebon	17.75	37.24	56.07
10. Kab. Majalengka	11.66	17.54	32.96
11. Kab. Sumedang	12.28	13.62	30.55
12. Kab. Indramayu	6.31	15.23	25.85
13. Kab. Subang	10.17	14.03	21.61
14. Kab. Purwakarta	17.19	22.33	39.51
15. Kab. Karawang	13.87	22.74	36.97
16. Kab. Bekasi	16.50	54.79	58.00
17. Kota Bogor	100.00	100.00	99.48
18. Kota Sukabumi	100.00	100.00	96.56
19. Kota Bandung	100.00	98.46	100.00
20. Kota Cirebon	100.00	96.24	100.00
21. Kota Bekasi	-	-	97.50
22. Kota Depok	*)	*)	98.03
Jawa Barat	21.00	34.50	50.31

*) Datanya tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS, SP1980, SP1990, dan Hasil Pengolahan SP2000

Jika angka urbanisasi dinyatakan sebagai proporsi besarnya penduduk perkotaan terhadap total jumlah penduduk, maka hasil survei kependudukan tahun 2000 menunjukkan bahwa angka urbanisasi di Jawa Barat adalah 50,31. Angka urbanisasi tertinggi untuk tingkat kabupaten terjadi di Kota Bogor (99,48 persen), sedangkan yang terkecil adalah di Kabupaten Subang (21,61 persen). Sedangkan untuk tingkat kota, di Kota Bandung dan Kota Cirebon pada periode 1980-1990 pernah terjadi penurunan tingkat urbanisasi dari masing-masing 100 persen menjadi masing-masing 98,46 persen dan 96,24 persen. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut di Kota Bandung, tepatnya sekitar tahun 1986, berdasarkan PP No. 16 tahun 1986 sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang saat itu statusnya masih perdesaan menjadi bagian dari wilayah Kota Bandung. Demikian juga untuk Kota Cirebon. Hasil Survei Podes tahun 1990 menunjukkan adanya pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 4 kecamatan, di mana status desa/kelurahan seluruhnya perkotaan, menjadi 5 kecamatan di mana ada desa/kelurahan yang saat itu statusnya berubah menjadi perdesaan, akibat pemekaran tersebut.

Tingginya angka urbanisasi di Kabupaten Bogor kemungkinan dipengaruhi oleh pesatnya pembangunan di kawasan tersebut. Sehingga penduduk dari daerah perdesaan beramai-ramai menuju daerah perkotaan di kabupaten tersebut. Selain itu pula karena daerah ini dekat dengan ibukota negara Indonesia, Jakarta, dan dengan semakin berkembangnya sistem transportasi antara kedua wilayah maka daerah ini dijadikan alternatif tempat tinggal bagi penduduk yang bekerja di Jakarta. Sedangkan angka urbanisasi yang kecil di Kabupaten Subang disebabkan

karena di wilayah ini masih banyak desa/kelurahan yang berstatus perdesaan. Hal ini ditunjang oleh data statistik potensi desa tahun 2000 di mana desa/kelurahan yang berstatus perkotaan di Kabupaten Subang adalah sebanyak 20 desa/kelurahan, sedangkan yang berstatus perdesaan sebanyak 230.

3.3.3. Komposisi Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat hasil pengolahan survei kependudukan SP2000 adalah 35.723.473 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 18.048.049 jiwa dan

Tabel 3.3.3a :
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota.
Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2000

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	1830433	1678393	3508826	109.05
2	Kab. Sukabumi	1050096	1025045	2075141	102.44
3	Kab. Cianjur	983762	962643	1946405	102.19
4	Kab. Bandung	2141402	2016681	4158083	106.18
5	Kab. Garut	1043242	1007850	2051092	103.51
6	Kab. Tasikmalaya	1028565	1035510	2064075	99.32
7	Kab. Ciamis	804718	814034	1618752	98.85
8	Kab. Kuningan	493508	491284	984792	100.45
9	Kab. Cirebon	965566	965500	1931066	100.00
10	Kab. Majalengka	557611	564030	1121641	98.86
11	Kab. Sumedang	480188	488660	968848	98.26
12	Kab. Indramayu	798713	791317	1590030	100.93
13	Kab. Subang	661003	668835	1329838	98.82
14	Kab. Purwakarta	352005	348099	700104	101.12
15	Kab. Karawang	901180	886139	1787319	101.70
16	Kab. Bekasi	835395	833099	1668494	100.27
17	Kota. Bogor	378365	372454	750819	101.58
18	Kota. Sukabumi	126637	125783	252420	100.67
19	Kota. Bandung	1073568	1062692	2136260	101.02
20	Kota. Cirebon	135286	136977	272263	98.76
21	Kota. Bekasi	828717	835085	1663802	99.23
22	Kota. Depok *)	578089	565314	1143403	102.25-
Jawa Barat		18.048.049	17.675.424	35.723.473	102.11

Sumber: BPS. Hasil Pengolahan SP2000

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

penduduk perempuan sebanyak 17.675.424 jiwa. Menurut hasil survei kependudukan tahun 2000 sex ratio penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan menjadi 102,11. Walaupun terjadi penurunan di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon. Fluktuasi angka rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lapangan pekerjaan, partisipasi sekolah, dan sebagainya.

Tabel 3.3.3b:
Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota
Periode 1980-2000

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin		
	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	102.62	103.15	109.05
02. Kab. Sukabumi	99.91	101.88	102.44
03. Kab. Cianjur	99.48	101.41	102.19
04. Kab. Bandung	99.25	99.95	106.18
05. Kab. Garut	96.56	98.71	103.51
06. Kab. Tasikmalaya	95.98	97.75	99.32
07. Kab. Ciamis	96.60	96.64	98.85
08. Kab. Kuningan	97.46	99.92	100.45
09. Kab. Cirebon	96.52	98.74	100.00
10. Kab. Majalengka	95.28	97.40	98.86
11. Kab. Sumedang	97.77	98.78	98.26
12. Kab. Indramayu	97.12	98.67	100.93
13. Kab. Subang	97.76	98.39	98.82
14. Kab. Purwakarta	99.99	102.26	101.12
15. Kab. Karawang	99.33	100.54	101.70
16. Kab. Bekasi	100.79	100.90	100.27
17. Kota Bogor	101.20	101.49	101.58
18. Kota Sukabumi	97.70	98.59	100.67
19. Kota Bandung	102.40	101.38	101.02
20. Kota Cirebon	96.44	96.77	98.76
21. Kota Bekasi	-	-	99.23
22. Kota Depok *)	-	-	102.25-
Jawa Barat	98.78	100.07	102.11

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
 Sumber: BPS. SP1980, SP1990, dan Hasil Pengolahan SP2000

3.3.4. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumahtangga. Oleh karena itu status perkawinan ini penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Tabel 3.3.4 memperlihatkan bahwa sedikit sekali penduduk yang berumur 35 tahun atau lebih dilaporkan belum pernah melangsungkan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal melangsungkan perkawinan perempuan cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Undang-undang Perkawinan di mana batas usia minimal untuk laki-laki adalah 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun. Faktor lainnya adalah berubahnya visi

sosial dan adanya kaum perempuan yang masuk kerja, dan lain-lain. Dari Tabel 3.3.4 terlihat bahwa laki-laki dalam melangsungkan pernikahannya paling banyak pada kelompok 25-29 tahun sedangkan perempuan pada kelompok 20-24 tahun. Hal ini terlihat jelas dari penurunan drastis proporsi mereka yang berstatus belum kawin pada kelompok umur sebelumnya. Proporsi

penduduk yang berstatus cerai (hidup dan mati), pada laki-laki tampak lebih kecil dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bagi laki-laki nampaknya tidak berlangsung lama dan dilanjutkan dengan perkawinan berikutnya.

Tabel 3.3.4 :
Persentase Penduduk Provinsi Jawa Barat Berumur 10 Tahun ke Atas
menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 1990 dan 2000

Jenis Kelamin/ Kel. Umur	Blm/Tdk Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki-laki								
10-14	99.19	32,40	0.72	0,30	0.05	8,62	0.04	0,52
15-19	96.50	33,01	3.11	0,83	0.36	10,95	0.03	0,74
20-24	62.58	21,28	35.26	6,11	2.03	15,02	0.13	1,27
25-29	21.27	8,53	75.87	13,71	2.63	17,40	0.23	2,41
30-34	6.25	2,42	91.13	15,27	1.98	13,61	0.37	2,98
35-39	3.27	0,73	94.86	14,47	1.38	9,96	0.49	3,64
40-44	2.43	0,31	95.39	12,82	1.31	7,10	0.87	5,52
45-49	2.11	0,14	95.71	10,14	0.99	4,75	1.19	6,04
50+	2.65	1,13	90.85	26,36	1.33	12,59	5.17	76,83
Perempuan								
10-14	99.42	39,17	0.50	39,17	0.06	0,78	0.02	0,12
15-19	71.48	33,90	25.96	33,90	2.48	3,65	0.08	0,16
20-24	24.92	15,48	69.63	15,48	5.06	11,25	0.39	0,52
25-29	6.42	5,19	87.81	5,19	5.04	13,99	0.73	0,93
30-34	2.08	1,80	91.43	1,80	4.77	13,34	1.72	1,62
35-39	1.15	0,75	90.78	0,75	4.78	12,67	3.29	2,63
40-44	0.81	0,42	86.31	0,42	5.34	11,19	7.54	4,77
45-49	0.59	0,28	81.79	0,28	5.36	8,69	12.26	6,28
50+	0.74	2,96	51.90	2,96	5.88	0,00	41.48	0,00

Sumber : BPS. Hasil SP90 dan SP2000

BAB IV FERTILITAS DAN MORTALITAS

4.1.. Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu komponen demografi yang secara hipotetis merupakan rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang wanita sepanjang masa reproduksinya. Dalam berbagai studi demografi, angka fertilitas senantiasa menempati posisi penting penelaahan. Hal ini terutama terkait dengan perannya dalam menentukan besaran jumlah penduduk di suatu wilayah. Berbeda dengan variabel lainnya yaitu mortalitas dan migrasi, penambahan jumlah penduduk melalui fertilitas terbatas pada kelompok umur usia muda (*child bearing*), sebaliknya mortalitas dan migrasi dapat mempengaruhi jumlah penduduk untuk semua kelompok umur. Namun demikian, pengalaman di beberapa negara berkembang, fertilitas lebih berpengaruh dibandingkan mortalitas ataupun migrasi terhadap jumlah dan struktur umur suatu penduduk (BPS, 1997:19).

Ukuran fertilitas yang digunakan dalam analisis profil ini adalah anak lahir hidup (ALH)/paritas dan Rasio Anak-Ibu (*Child Woman Ratio - CWR*). Selain itu dibahas juga salah satu indikator yang merupakan salah satu determinan penting fertilitas yaitu rata-rata umur perkawinan pertama (*Singulate Mean Age of Marriage - SMAM*). Untuk yang disebut terakhir, dalam bab ini, uraiannya menjadi salah satu penekanan. Karena seperti umum diketahui bahwa umur perkawinan di Jawa Barat relatif lebih muda dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Padahal pengaruh variabel usia kawin terhadap fertilitas cukup dominan.

4.1.1. Anak Lahir Hidup (ALH)

Dari hasil sensus dan survei kependudukan tingkat fertilitas dihitung dengan cara tidak langsung melalui keterangan tentang anak yang dilahirkan hidup. Ukuran fertilitas yang paling mudah digunakan adalah paritas menurut umur ibu. Paritas adalah ukuran fertilitas dari satu kohor yang mengukur fertilitas yang telah dicapai oleh seorang wanita dari kelompok umur yang berbeda-beda, sampai dengan waktu pencacahan. Pada umur muda (15-19 tahun) paritas rata-rata mewakili keadaan fertilitas pada saat ini. Pola umum yang terjadi di kebanyakan negara berkembang adalah rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan menurun pada kelompok umur wanita tertentu.

Terdapat dua ukuran yang dapat dipakai untuk menganalisis paritas yaitu rata-rata ALH dan rata-rata paritas lengkap. Penghitungan rata-rata ALH adalah untuk melihat rata-rata paritas menurut kelompok umur ibu sebagai pendekatan untuk melihat perbandingan tingkat fertilitas. Sedangkan rata-rata paritas lengkap dapat dipakai sebagai pendekatan dari tingkat fertilitas total (TFR).

Tabel 4.1.1a memperlihatkan bahwa rata-rata ALH pada kelompok umur 15-19 tahun adalah yang terendah. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat peristiwa melahirkan pada ibu kelompok umur tersebut memang masih rendah karena sebagian besar dari mereka belum lama melangsungkan pernikahan. Tampaknya asumsi bahwa semakin tua umur ibu semakin tinggi rata-rata ALH karena semakin mendekati masa akhir reproduksinya, berlaku di Jawa Barat. Tabel 4.1.1a juga mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana (KB) di Jawa Barat telah memberi pengaruh pada pola anak lahir hidup. Setidaknya dari tabel 4.1.1a di atas diperoleh impresi bahwa cenderung terjadi penundaan atau pembatasan jumlah anak di kelompok wanita pernah kawin usia muda.

Tabel 4.1.1a.
Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup menurut Kelompok Umur Ibu
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kelompok Umur	Jumlah Wanita	ALH	Rata-rata ALH
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	1.873.640	106.978	0,06
20 - 24	1.656.033	926.012	0,56
25 - 29	1.634.537	2.242.790	1,37
30 - 34	1.446.098	3.165.368	2,19
35 - 39	1.385.211	4.111.572	2,97
40 - 44	1.120.242	3.960.721	3,54
45 - 49	889.233	3.453.987	3,88

Sumber : BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Kesan di atas ditunjang pula oleh fakta besarnya persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah menggunakan alat KB, yaitu sebesar 76,21 persen, sedangkan mereka yang sedang menggunakan alat KB pada kelompok umur yang sama adalah sebesar 57,17 persen (BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000).

Hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai rata-rata ALH dengan angka yang wajar, artinya asumsi seperti yang disebutkan di atas berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Tidak terjadi misalnya rata-rata ALH kelompok umur ibu 45-49 tahun lebih rendah dari kelompok umur ibu 40-44 tahun. Jika hal ini terjadi, kemungkinan faktor penyebabnya adalah kesalahan pelaporan jumlah anak sehubungan dengan daya ingat ibu (*memory lapse*) kelompok umur ibu 45-49 tahun, di mana kecenderungan ibu pada umur tersebut lupa atau tidak melaporkan anak-anak mereka yang telah meninggal di usia muda atau anak mereka yang sudah tidak tinggal serumah lagi.

Tabel 4.1.1b.
Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Ibu Di Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur Ibu						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Kab. Bogor	0,06	0,53	1,48	2,22	3,74	4,36	4,81
02. Kab. Sukabumi	0,06	0,82	1,65	2,55	3,15	3,80	4,40
03. Kab. Cianjur	0,14	0,74	1,61	2,41	2,91	3,90	4,29
04. Kab. Bandung	0,05	0,51	1,38	2,07	2,71	3,56	3,80
05. Kab. Garut	0,09	0,62	1,63	2,50	3,50	3,84	4,51
06. Kab. Tasikmalaya	0,04	0,71	1,63	2,44	2,96	3,62	4,35
07. Kab. Ciamis	0,04	0,62	1,26	2,15	2,44	2,69	2,95
08. Kab. Kuningan	0,02	0,55	1,34	2,32	3,05	3,82	4,32
09. Kab. Cirebon	0,04	0,51	1,33	2,29	2,98	3,82	4,34
10. Kab. Majalengka	0,10	0,57	1,18	2,05	2,88	3,16	3,34
11. Kab. Sumedang	0,05	0,75	1,34	2,03	2,68	3,02	3,30
12. Kab. Indramayu	0,09	0,82	1,58	2,32	3,39	3,70	3,80
13. Kab. Subang	0,09	0,60	1,27	1,90	2,49	2,89	2,78
14. Kab. Purwakarta	0,12	0,80	1,25	2,20	2,71	3,07	3,87
15. Kab. Karawang	0,05	0,54	1,35	2,14	2,61	2,91	3,61
16. Kab. Bekasi	0,03	0,49	1,17	2,34	3,05	3,59	4,14
17. Kota Bogor	0,03	0,30	0,96	1,73	2,78	3,88	3,92
18. Kota Sukabumi	0,06	0,43	1,22	2,06	2,87	2,99	3,93
19. Kota Bandung	0,03	0,31	0,91	1,82	2,54	3,34	3,61
20. Kota Cirebon	0,03	0,50	1,31	1,74	3,25	3,28	3,38
21. Kota Bekasi	0,01	0,31	1,23	1,96	2,65	2,95	2,88
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,06	0,56	1,37	2,19	2,97	3,54	3,88

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

4.1.2. Rata-rata Paritas Lengkap

Jika fertilitas konstan maka paritas rata-rata dari seorang wanita pada akhir masa reproduksinya, biasanya usia 49 tahun, sama dengan angka fertilitas total (TFR). Artinya jumlah anak seluruhnya (*completed family size*) sama dengan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang mengikuti angka fertilitas menurut umur yang ada pada saat ini selama masa reproduksinya. Jika fertilitas menurun maka jumlah total anak akan lebih besar daripada angka fertilitas total pada saat tertentu. Menurut tabel 4.1.1a rata-rata paritas lengkap atau dapat dikatakan tingkat fertilitas total (TFR) Jawa Barat adalah sekitar 3,88 anak per ibu. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota TFR tertinggi adalah Kabupaten Bogor, yaitu sekitar 4,81 anak per ibu, dan TFR terendah adalah Kabupaten Subang (sekitar 2,78 anak per ibu).

TFR Jawa Barat pada periode 1990-2000 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil SP1990 TFR Jawa Barat adalah sekitar 5,40 anak per wanita, hasil Supas 1995 sekitar 4,38 anak per wanita, dan hasil survei kependudukan tahun 2000 adalah sekitar 3,88

Bab IV. Fertilitas dan Mortalitas.

anak per wanita. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa program KB di Jawa Barat menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Walaupun Kabupaten Bogor memiliki TFR tertinggi menurut hasil survei kependudukan SP2000, namun pada periode 1990-2000 angkanya menunjukkan kecenderungan menurun. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki angka TFR yang cenderung menurun, kecuali di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung. Walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 4.1.1c.
Kecenderungan Angka Kelahiran Total (TFR) di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Periode 1990-2000

Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)		
	1990	1995	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	6,19	4,62	4,81
02. Kab. Sukabumi	5,97	5,06	4,40
03. Kab. Cianjur	5,67	4,93	4,29
04. Kab. Bandung	5,83	4,34	3,80
05. Kab. Garut	6,30	5,47	4,51
06. Kab. Tasikmalaya	5,64	4,65	4,35
07. Kab. Ciamis	4,19	3,48	2,95
08. Kab. Kuningan	5,22	4,38	4,32
09. Kab. Cirebon	5,34	4,76	4,34
10. Kab. Majalengka	4,49	3,90	3,34
11. Kab. Sumedang	4,17	3,52	3,30
12. Kab. Indramayu	5,18	4,46	3,80
13. Kab. Subang	4,27	3,22	2,78
14. Kab. Purwakarta	5,36	2,94	3,87
15. Kab. Karawang	4,76	4,09	3,61
16. Kab. Bekasi	5,36	4,12	4,14
17. Kota Bogor	5,01	4,26	3,92
18. Kota Sukabumi	4,64	2,93	3,93
19. Kota Bandung	5,11	3,28	3,61
20. Kota Cirebon	4,70	3,78	3,38
21. Kota Bekasi	-	-	2,88
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	5,40	4,38	3,88

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

4.1.3. Rasio Anak-Ibu (*Child-Woman Ratio*)

Gambaran tingkat fertilitas juga dapat diperoleh melalui pendekatan rasio anak-ibu (*child woman ratio -CWR*) yaitu hubungan dalam bentuk rasio antara jumlah anak balita dengan jumlah penduduk wanita usia reproduksi, atau dapat dikatakan bahwa CWR adalah beban ibu mengurus anak. Di Jawa Barat CWR-nya sebesar 319,95, artinya terdapat sekitar 320 balita untuk setiap 1.000 wanita usia produktif. Semakin rendah angka CWR mengindikasikan semakin rendah

tingkat fertilitas. Namun dalam membandingkan CWR antar wilayah perlu hati-hati, karena CWR tidak memperhitungkan tingkat kematian balita. Suatu wilayah dengan CWR rendah tidak selalu mengindikasikan bahwa tingkat fertilitasnya rendah pula. Bila wilayah ini mempunyai tingkat kematian bayi dan balita yang tinggi maka angka CWR menjadi rendah karena banyak kelahiran yang tidak mencapai umur balita, yang akibatnya jumlah balita menjadi rendah. Padahal kemungkinan sebenarnya tingkat kelahiran di wilayah ini cukup tinggi.

Rasio anak-ibu (CWR) tertinggi, menurut hasil survei kependudukan tahun 2000 (SP2000-M), terdapat di Kabupaten Garut yaitu sebesar 415,00. Artinya beban ibu mengurus anak di kabupaten ini adalah yang tertinggi di Jawa Barat. Jika dihubungkan dengan tingkat kelahiran di Kabupaten Garut, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.1b di atas (yaitu sebesar 4,51 anak per ibu) maka asumsi bahwa semakin rendah angka CWR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat fertilitas, dan sebaliknya, berlaku di kabupaten ini.

Tabel 4.1.3.
Rasio Anak-Ibu (CWR) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Penduduk 0-4 tahun	Penduduk Perempuan 15-49 tahun	CWR
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	441.161	1.339.954	329,24
02. Kab. Sukabumi	202.549	555.495	364,63
03. Kab. Cianjur	177.721	510.833	347,90
04. Kab. Bandung	396.176	1.189.467	333,07
05. Kab. Garut	224.687	541.412	415,00
06. Kab. Tasikmalaya	215.644	541.445	398,27
07. Kab. Ciamis	134.376	430.014	312,49
08. Kab. Kuningan	78.731	259.805	303,04
09. Kab. Cirebon	170.874	517.177	330,40
10. Kab. Majalengka	83.691	319.658	261,81
11. Kab. Sumedang	86.611	257.427	336,45
12. Kab. Indramayu	155.650	411.460	378,29
13. Kab. Subang	105.605	387.265	272,69
14. Kab. Purwakarta	61.456	190.944	321,85
15. Kab. Karawang	131.804	527.759	249,74
16. Kab. Bekasi	128.688	492.952	261,06
17. Kota Bogor	56.998	228.537	249,40
18. Kota Sukabumi	22.611	71.284	317,20
19. Kota Bandung	173.551	647.180	268,16
20. Kota Cirebon	26.383	79.353	332,48
21. Kota Bekasi	126.141	505.573	249,50
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	3.201.108	10.004.994	319,95

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

4.1.4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Indikator lain yang dapat menggambarkan tingkat fertilitas adalah rata-rata umur perkawinan pertama atau lebih dikenal dengan istilah *Singulate Mean Age of Marriage* (SMAM). Alasannya adalah karena semakin muda seseorang melakukan perkawinan diduga akan semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Karena resiko melahirkan hanya terjadi pada perempuan maka SMAM lebih sering digunakan untuk menghitung rata-rata umur perkawinan pertama perempuan.

Tabel 4.1.4.
Rata-rata Umur Perkawinan Pertama menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	26,51	23,31	24,87
02. Kab. Sukabumi	24,61	20,46	22,46
03. Kab. Cianjur	23,83	20,30	21,92
04. Kab. Bandung	25,44	22,48	23,93
05. Kab. Garut	25,62	22,28	23,93
06. Kab. Tasikmalaya	25,83	21,74	23,67
07. Kab. Ciamis	25,21	21,59	23,36
08. Kab. Kuningan	26,66	23,05	24,89
09. Kab. Cirebon	25,36	22,99	24,14
10. Kab. Majalengka	24,66	21,06	22,82
11. Kab. Sumedang	24,26	21,30	22,74
12. Kab. Indramayu	23,70	20,54	22,25
13. Kab. Subang	24,13	20,39	22,15
14. Kab. Purwakarta	25,63	21,94	23,74
15. Kab. Karawang	25,64	22,69	24,11
16. Kab. Bekasi	25,11	22,95	23,94
17. Kota Bogor	29,02	25,93	27,48
18. Kota Sukabumi	27,48	24,16	25,71
19. Kota Bandung	28,35	25,28	26,89
20. Kota Cirebon	27,21	23,92	25,54
21. Kota Bekasi	27,80	24,44	26,05
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	25,81	22,54	24,13

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
 Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Dari Tabel 4.1.4 terlihat bahwa SMAM perempuan di Jawa Barat berada pada umur 22,54 tahun. Hal ini sesuai dengan pembahasan pada Bab III mengenai komposisi penduduk menurut status perkawinan bahwa perempuan cenderung melakukan perkawinan pada kelompok umur 20-24 tahun. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, SMAM perempuan terendah terdapat di Kabupaten Cianjur, yaitu 20,30 tahun, dan SMAM tertinggi terdapat di daerah perkotaan yaitu Kota Bogor sebesar 25,93 tahun. Hal ini dapat dimaklumi karena kehidupan di kota yang cenderung lebih maju, sehingga kaum perempuannya tidak terlalu terobsesi untuk cepat-cepat melakukan perkawinan. Beberapa di antaranya ada yang masih bersekolah, ada juga yang memasuki dunia kerja. Semua ini terjadi karena adanya perubahan cara pandang masyarakat kota bahwa perempuan harus memiliki kemampuan dan peranan yang sejajar dengan laki-laki. Apalagi akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan isu kesetaraan gender.

4.2. Mortalitas

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu komponen demografi yang penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi swasta terutama yang berkecimpung di bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian juga diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dan juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas penduduk atau Sumber Daya Manusia.

Bila fertilitas berhubungan dengan penambahan penduduk, maka mortalitas merupakan pengurangan dari penduduk. Tingkat kematian yang terjadi umumnya berbeda menurut golongan umur, jenis kelamin maupun kondisi sosial ekonomi. Oleh karenanya tingkat kematian yang terjadi di suatu wilayah sering dihubungkan dengan kemajuan sosial ekonomi wilayah tersebut.

Untuk menghitung berbagai indikator kematian, idealnya data utama yang digunakan berasal dari hasil registrasi penduduk. Namun karena hasil registrasi sulit diperoleh dan umumnya kurang akurat, maka penghitungan sering dilakukan secara tidak langsung (*indirect method*). Penghitungannya biasanya menggunakan data anak lahir hidup dan anak masih hidup. Uraian pada bab ini akan menengahkan analisis proporsi anak masih hidup (AMH). Proporsi anak masih hidup sering digunakan sebagai pendekatan dari indikator angka kematian. Proporsi tersebut menunjukkan perbandingan antara jumlah anak yang masih hidup dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup.

Tabel 4.2a
Proporsi Anak Masih Hidup menurut Kelompok Umur Ibu
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kelompok Umur	Rata-rata ALH	Rata-rata AMH	Proporsi AMH
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	0,06	0,05	0,94
20 - 24	0,56	0,54	0,96
25 - 29	1,37	1,31	0,95
30 - 34	2,19	2,09	0,95
35 - 39	2,97	2,79	0,94
40 - 44	3,54	3,23	0,91
45 - 49	3,88	3,50	0,90
50 - 54	4,18	3,64	0,87
Total	1,95	1,80	0,92

Sumber : BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Data pada tabel 4.2.b. menunjukkan bahwa proporsi anak masih hidup lebih tinggi pada perempuan kelompok umur muda dibanding kelompok umur yang lebih tua. Atau dengan kata lain, angka kematian anak dari kelompok perempuan yang lebih tua lebih tinggi dibandingkan angka kematian anak dari kelompok perempuan yang lebih muda. Proporsi anak yang meninggal cenderung meningkat sesuai umur ibu, karena anak dari kelompok perempuan yang lebih tua dilahirkan lebih dulu sehingga anak-anak ini menghadapi resiko meninggal yang lebih besar daripada anak-anak dari kelompok perempuan yang lebih muda. Apalagi jika dihubungkan dengan tingkat kesehatan yang semakin baik maka anak yang bertahan hidup saat ini akan lebih banyak dibandingkan kondisi sebelumnya.

Tabel 4.2b
Proporsi Anak Masih Hidup menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Ibu di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2000

Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur Ibu								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kab. Bogor	0,84	0,95	0,93	0,96	0,92	0,91	0,88	0,82	0,91
02 Kab. Sukabumi	1,00	0,96	0,95	0,96	0,95	0,92	0,91	0,89	0,93
03 Kab. Cianjur	0,82	0,97	0,92	0,91	0,91	0,87	0,87	0,81	0,89
04 Kab. Bandung	0,90	1,00	0,97	0,96	0,97	0,90	0,93	0,91	0,94
05 Kab. Garut	1,00	0,93	0,95	0,96	0,93	0,89	0,90	0,88	0,92
06 Kab. Tasikmalaya	1,00	0,93	0,94	0,92	0,92	0,90	0,85	0,88	0,90
07 Kab. Ciamis	1,00	1,00	0,92	0,90	0,94	0,94	0,90	1,15	0,92
08 Kab. Kuningan	1,00	0,93	0,95	0,94	0,93	0,92	0,88	0,87	0,91
09 Kab. Cirebon	1,00	0,94	0,95	0,99	0,95	0,93	0,86	0,86	0,92
10 Kab. Majalengka	1,00	0,97	0,96	0,94	0,93	0,89	0,88	0,84	0,90
11 Kab. Sumedang	1,00	0,91	0,96	0,96	0,93	0,93	0,92	0,91	0,93
12 Kab. Indramayu	1,00	0,96	0,90	0,94	0,89	0,88	0,86	0,74	0,87
13 Kab. Subang	1,00	0,95	0,99	0,97	0,95	0,91	0,93	0,92	0,94
14 Kab. Purwakarta	1,00	0,94	0,99	0,96	0,94	0,91	0,88	0,90	0,93
15 Kab. Karawang	1,00	0,98	0,95	0,94	0,92	0,91	0,92	0,84	0,92
16 Kab. Bekasi	1,00	0,95	0,99	0,95	0,97	0,91	0,95	0,90	0,95
17 Kota Bogor	1,00	1,00	0,97	0,97	0,98	0,94	0,94	0,93	0,95
18 Kota Sukabumi	1,00	0,99	0,95	0,98	0,93	0,90	0,89	0,89	0,92
19 Kota Bandung	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,92	0,96
20 Kota Cirebon	1,00	0,95	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,90	0,94
21 Kota Bekasi	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99
22 Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,94	0,96	0,95	0,95	0,94	0,91	0,90	0,87	0,92

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
 Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Proporsi anak masih hidup di seluruh kabupaten/kota menunjukkan pola yang sama, yaitu proporsi anak yang masih hidup pada kelompok umur ibu muda lebih tinggi dibandingkan kelompok umur ibu yang lebih tua. Tabel 4.2.b menunjukkan tingkat kesehatan sudah semakin baik di hampir seluruh kabupaten/kota sehingga anak yang bertahan hidup lebih banyak. Hal ini terlihat jelas di Kota Bekasi, di mana proporsi anak masih hidup adalah 1,00 mulai dari kelompok umur ibu 15-19 tahun hingga kelompok umur ibu 25-29 tahun. Bahkan untuk kelompok umur ibu yang lebih tua pun angkanya masih menunjukkan proporsi AMH yang tinggi, yaitu mendekati 1,00.

Tabel 4.2.c
Kecenderungan Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Periode 1980-2000

No	Kabupaten/Kota	Infan Mortality Rate (IMR)			
		1980	1990	1995	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Bogor	143,80	90,65	61,30	56,00
02	Kab. Sukabumi	132,13	96,71	61,30	61,00
03	Kab. Cianjur	129,02	100,50	81,00	68,33
04	Kab. Bandung	166,53	66,20	35,70	43,00
05	Kab. Garut	132,91	91,41	76,70	57,20
06	Kab. Tasikmalaya	115,52	95,96	54,70	58,00
07	Kab. Ciamis	116,86	94,44	57,00	58,60
08	Kab. Kuningan	101,26	61,58	33,50	50,50
09	Kab. Cirebon	112,52	71,59	41,70	57,90
10	Kab. Majalengka	136,80	78,52	54,30	57,95
11	Kab. Sumedang	95,20	57,74	48,00	45,00
12	Kab. Indramayu	143,02	103,53	49,70	68,27
13	Kab. Subang	129,02	74,67	49,70	50,23
14	Kab. Purwakarta	141,27	96,71	46,70	66,83
15	Kab. Karawang	149,25	109,52	64,30	62,33
16	Kab. Bekasi	150,80	93,68	38,30	55,30
17	Kota Bogor	137,58	33,58	65,00	29,01
18	Kota Sukabumi	83,82	57,74	27,00	41,00
19	Kota Bandung	75,44	49,78	50,00	37,00
20	Kota Cirebon	85,20	91,41	27,00	41,00
21	Kota Bekasi	-	-	-	41,60
22	Kota Depok *)	-	-	-	-
Jawa Barat		128,27	89,13	56,00	42,33

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat, Hasil SP1980, 1990, SUPAS 1995, dan Susenas 2000
Keterangan : *) Datanya tergabung dengan Kab. Bogor

Angka kematian bayi (AKB) biasa digunakan sebagai angka ringkasan dalam hal mortalitas. Angka kematian bayi merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk disamping sebagai indikator kesehatan. Sedangkan angka harapan hidup menunjukkan tingkat harapan hidup suatu masyarakat yang akan dicapai dengan asumsi kondisi kesehatan dan fasilitas kesehatan dianggap tetap.

Tabel 4.2.c. menunjukkan bahwa walaupun tingkat kematian Jawa Barat relatif masih lebih tinggi dari Indonesia tetapi penurunannya cukup pesat. Dari periode 1971 sampai 1995, AKB turun dari 167 per 1000 bayi yang lahir menjadi hanya 56 per 1000 bayi pada tahun 1995 dan 42 per 1000 bayi pada tahun 2000. Sebaliknya untuk angka harapan hidup meningkat dari hanya 42 pada tahun 1971 menjadi lebih dari 63 tahun pada tahun 1995 dan 65 pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat sehingga terjadi penurunan angka kematian.

Data pada Tabel 4.2.c.juga menunjukkan variasi IMR menurut kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 1980-2000. Pada tahun 1980 AKB tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bandung yakni 166,53 per 1000 kelahiran hidup dan terendah dicapai oleh Kota Sukabumi yaitu 83,82 per 1000 kelahiran hidup dan selanjutnya pada tahun 1990 AKB tertinggi dicapai oleh Kabupaten

Bab IV. Fertilitas dan Mortalitas.

Karawang dan Indramayu yakni 109,52 dan 103,53 per 1000 kelahiran hidup dan terendah dicapai oleh Kota Bogor yaitu 33,58 per 1000 kelahiran hidup.

Pada tahun 1995, AKB seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai di bawah 100 per 1000 kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat. AKB tertinggi terdapat di Kabupaten Cianjur dengan AKB mencapai 81 per 1,000 kelahiran sedangkan AKB terendah dicapai oleh Kota Bandung dan Bogor masing-masing hanya 27 per 1000 kelahiran.

Sementara pada tahun 2000, AKB seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai di bawah 70 per 1000 kelahiran. AKB terendah dicapai oleh Kota Bogor dan Kota Bandung, masing-masing hanya 29,01 dan 37,00 per 1000 kelahiran. Sedangkan AKB tertinggi diraih oleh Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu, masing-masing sebesar 68,33 dan 68,27 per 1000 kelahiran hidup.

Dari data AKB di atas terdapat kecenderungan untuk daerah kota mempunyai AKB yang rendah. Sebaliknya untuk daerah kabupaten cenderung mempunyai AKB yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu faktor kondisi sosial ekonomi di mana daerah perkotaan (kota) cenderung mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada daerah pedesaan, seperti rumah sakit, dokter, ahli medis, dan sebagainya.

BAB V MIGRASI

Migrasi merupakan salah satu unsur demografi yang paling sulit pengukurannya dalam proses perubahan penduduk. Migrasi atau proses perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu migrasi permanen dan non permanen. Migrasi non permanen terbagi menjadi dua yaitu sirkuler dan komuter. Migrasi permanen adalah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan niat (maksud) untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan migrasi sirkuler ialah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tanpa niat untuk menetap secara permanen di daerah tujuan. Penghitungan migrasi berdasarkan maksud/niat tersebut tidak operasional karena dengan faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan niat tersebut berubah.

Ada dua perspektif penting yang dapat digunakan untuk menerangkan sebab-sebab terjadinya migrasi, terutama migrasi tenaga kerja yang sifatnya spontan. Pertama adalah **Neo Classical Economic Equilibrium Perspectives**, dan yang kedua dikenal sebagai **The Historical-Structural Perspectives** (Wood, 1982: 300-301). **Neo Classical Economic Equilibrium Perspectives** (dikenal dengan perspektif Neo-Classic) memandang pergerakan atau mobilitas tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain merupakan reaksi terhadap adanya ketimpangan dalam distribusi modal, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Suatu daerah dengan tenaga kerja melimpah akan menyebabkan tenaga kerja di daerah tersebut pindah ke daerah yang memiliki tenaga kerja sedikit atau terbatas tetapi mempunyai modal atau sumber daya alam berlebih (Jousairi Hasbullah, 1992).

Sedangkan teori struktural lebih memandang mobilitas tersebut disebabkan adanya kekuatan dan paksaan struktural sehingga tenaga kerja yang ada di daerah tersebut pindah ke daerah yang lain. Penyebab utama migrasi menurut perspektif yang kedua ini tidak berdasarkan keputusan bebas seseorang tetapi oleh karena adanya tekanan struktural seperti kemiskinan, tersisihnya sebagian masyarakat oleh adanya penetrasi kapitalisme, dan lain-lain (Wood, 1982; Hugo et. al; 1987).

Dengan keterbatasan data migrasi yang ada dan mengingat data final hasil sensus penduduk tahun 2000 belum selesai diolah oleh BPS, maka sumber data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah migrasi ini diambil dari data hasil survei kependudukan SP2000. Tidak berarti bahwa sumber data ini tidak memiliki keterbatasan, bahkan nampaknya hanya sedikit permasalahan yang dapat dikupas dari sumber data tersebut. Oleh karena penulis tidak membatasi pada satu sumber data saja dalam menganalisis masalah migrasi ini, tetapi juga mengambil sumber data lain sebagai penunjang.

5.1. Jumlah dan Persentase Migran Masuk

Migrasi di Jawa Barat umumnya terjadi karena perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Seiring dengan meningkatnya migran ke daerah perkotaan mengakibatkan proporsi penduduk di daerah perkotaan mengalami peningkatan. Pada tahun 1971, proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan baru mencapai 12,41 persen dan pada tahun 1995 meningkat menjadi 42,69 persen. Hasil SP2000 menunjukkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan meningkat menjadi 48,99 persen. Besarnya peningkatan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan tersebut bukan saja oleh arus perpindahan penduduk secara fisik dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan (*rural urban migration*) tetapi juga disebabkan pertumbuhan alami penduduk perkotaan itu sendiri dan perubahan sebagian daerah perdesaan menjadi perkotaan (*rural-urban reclassification*).

5.1.1. Migrasi Semasa Hidup (*Lifetime Migration*)

Pola migrasi di Jawa Barat cenderung mengalami pergeseran sejak tahun 1990. Pada periode 1971-1980, Propinsi Jawa Barat masih merupakan daerah pengirim migran terutama ke Propinsi DKI Jakarta, tetapi semenjak tahun 1990 Propinsi Jawa Barat merupakan daerah penerima migran. Hal ini karena semenjak tahun 1990 Ke Propinsi Jawa Barat, mengalami migrasi netto yang positif yang berarti lebih banyak migran yang masuk dari pada yang keluar.

Pada periode 1930-2000, migran masuk ke Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1930 jumlah migran semasa hidup yang masuk ke Jawa Barat hanya sekitar 286 ribu, pada tahun 1985 meningkat menjadi 1,4 juta kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi 3,6 juta jiwa, yang terdiri atas 2,618 juta jiwa ke Jawa Barat dan 996 ribu ke Banten. Pada tahun 2000 migrasi semasa hidup yang masuk ke Jawa Barat saja (tanpa Banten) mencapai 2.521.395 migran. Begitu juga untuk migran risen berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu ada kecenderungan meningkat. Pada tahun 1980 tercatat sebanyak 505 ribu migran risen pada tahun 1990 bertambah sebanyak 1,34 juta migran risen, tahun 1995 bertambah sebanyak 1,12 juta jiwa migran risen dan tahun 2000 menjadi 588.580 migran. Sementara migran netto meningkat dari 38,5 ribu pada tahun 1980 meningkat menjadi 842,6 ribu pada tahun 1990 dan 668,8 ribu pada tahun 1995 dan untuk tahun 2000 belum bisa diketahui migran netto nya karena migran yang keluar sementara ini belum bisa dihitung.

Tabel 5.1.1
Migrasi Masuk Semasa Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1995 dan 2000

Kabupaten/Kota	1995		2000	
	Banyaknya	Persen	Banyaknya	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	718.525	27,44	842.287	33,41
Kab. Bekasi	978.063	37,35	32.091	1,27
Kota Bogor	46.512	1,78	90.161	3,58
Kota Bekasi	-	-	647.216	25,67
BOBEK	1.743.100	66,57	1.611.755	63,93
Kab. Bandung	102.977	3,93	234.093	9,28
Kota Bandung	360.180	13,75	275.429	10,92
BANDUNG	463.157	17,68	509.522	20,20
Kabupaten/Kota lainnya	412.337	15,74	400.118	15,87
Jumlah	2.618.594	100,00	2.521.395	100,00

Sumber: BPS, SUPAS 1995 dan Hasil Pengolahan SP2000 -M

Tabel 5.1.1 menunjukkan bahwa jumlah migran semasa hidup ke Jawa Barat pada tahun 1995 tercatat sebanyak 2,6 juta jiwa lebih. Pada tahun 2000 turun menjadi 2,5 juta jiwa. Terjadinya penurunan jumlah migran semasa hidup ini diperkirakan karena banyaknya migran

yang kembali ke kampung halamannya akibat terjadinya krisis ekonomi yang dampaknya paling terasa di daerah perkotaan. Hal tersebut bisa dilihat dari terjadinya penurunan persentase migran yang masuk ke daerah sekitar DKI Jakarta (Bogor-Bekasi/BOBEK), tetapi terjadi peningkatan untuk daerah Bandung dan kabupaten/kota lainnya.

5.1.2. Migrasi Total (*Total Migration*)

Seperti halnya migrasi semasa hidup, migrasi total yang masuk ke Jawa Barat pada tahun 2000 juga mengalami penurunan. Pada tahun 1995 terdapat sekitar 500 ribu migran yang kembali ke Jawa Barat, dan pada tahun 2000 terdapat sekitar 200 ribu migran kembali ke Jawa Barat.

Tabel 5.1.2.
Migrasi Total Masuk menurut Kabupaten/Kota di Pr ovinsi Jawa Barat
Tahun 1995 dan 2000

Kabupaten/Kota	1995		2000	
	Banyaknya	Persen	Banyaknya	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	800.957	25,95	971.510	35,60
Kab. Bekasi	1.081.228	35,03	44.790	1,64
Kota Bogor	52.098	1,69	88.083	3,23
Kota Bekasi	-	-	22.187	19,13
BOBEK	1.934.283	62,67	1.626.570	59,60
Kab. Bandung	121.597	3,94	195.940	7,18
Kota Bandung	391.920	12,70	289.574	10,61
BANDUNG	513.517	16,64	485.564	17,29
Kabupaten/Kota lainnya	638.902	20,69	616.939	22,61
Jumlah	3.086.702	100,00	2.729.073	100,00

Sumber: BPS, SUPAS 1995 dan Hasil Pengolahan SP2000 -M

Walaupun terjadi kenaikan jumlah migran di seluruh propinsi di Indonesia, tetapi distribusinya masih terkonsentrasi di Jawa (Firman, 1994; Urip, 1995). Hal ini menggambarkan betapa pentingnya propinsi di Jawa baik sebagai pengirim maupun penerima migran. Sehingga tidak mengherankan kalau hampir 43 persen dari penduduk perkotaan di Indonesia tinggal di dua propinsi yang terletak di sepertiga bagian barat Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat (Hugo, 1992: 175).

5.1.3. Migrasi Risen (*Recent Migration*)

Menurut hasil survei kependudukan tahun 2000 sebanyak 588.588 migran risen ke Jawa Barat, 51,86 persen diantaranya adalah migran yang menuju daerah sekitar Jakarta (Bogor dan Bekasi), diikuti oleh daerah Bandung sebesar 21,72 persen dan kabupaten/kota lainnya hanya 26,42 persen. Tampak bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini, terutama di Bekasi dan Bogor, salah satu penyebabnya adalah karena tingginya migrasi yang masuk ke wilayah tersebut dengan pola yang hampir sama dengan hasil Supas 1995.

Tabel 5.1.3 :
Jumlah Migran Masuk Risen (Tempat Tinggal Lima Tahun yang Lalu) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Migran Masuk			
	1995		2000	
	Banyaknya	Persen	Banyaknya	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	187.997	24,85	204.425	34,73
Kab. Bekasi	221.022	29,21	19.790	3,36
Kota Bekasi	-	-	61.165	10,39
Kota Bogor	10.146	1,34	19.837	3,37
Bobek	419.165	55,41	305.217	51,86
Kab. Bandung	28.924	3,82	57.201	9,72
Kota Bandung	122.820	16,24	70.638	12,00
Bandung	151.744	20,06	127.839	21,72
Kab/Kota Lainnya	185.604	24,53	155.532	26,42
Jumlah	756.513	100,00	588.588	100,00

Sumber: BPS, SUPAS 1995 dan Hasil Pengolahan SP2000 -M

Terbukti bahwa tingginya persentase migran masuk ke wilayah Bogor dan Bekasi dibandingkan dengan persentase migran yang keluar wilayah ini terjadi akibat meluasnya kegiatan ekonomi dari Jakarta ke daerah tersebut. Menurut beberapa peneliti, seperti Hill, Wahyuni, Dharmapatni dan Firman, dan Urip bahwa besarnya jumlah penduduk Jakarta yang pindah ke Bogor dan Bekasi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: tingginya harga tanah, rumah dan biaya hidup di Jakarta; meningkatnya jumlah penduduk berpendapatan menengah yang tinggal di Jakarta; meningkatnya kesempatan kerja di Bogor dan Bekasi; meningkatnya fasilitas transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Bogor-Bekasi; dan meningkatnya fasilitas perumahan yang dibangun oleh para pengembang di luar Jakarta.

Ada kecenderungan bahwa sebagian besar migran dalam propinsi (*within province*) dari Jawa Barat pindah ke Bogor dan Bekasi dibandingkan ke Jakarta. Salah satu penyebabnya karena meningkatnya kesempatan kerja di Bogor dan Bekasi sebagai akibat dari meluasnya

pembangunan industri dari Jakarta. Apalagi sejak fungsi Jabotabek sebagai daerah pusat aglomerasi kota (*urban agglomeration*) sehingga ada kecenderungan *link* antara Jakarta dan daerah sekitarnya sangat penting. Secara administratif Bogor dan Bekasi adalah bagian dari Jawa Barat, tetapi penduduk Bogor dan Bekasi dapat akses fasilitas yang sama dengan mereka yang tinggal di Jakarta, seperti KTP, pajak, registrasi kendaraan bermotor dan telepon secara langsung diperoleh di Bogor dan Bekasi tetapi diakui di Jakarta. Sebagai contoh pada tahun 1990 sekitar seratus ribu warga Kota Depok (yang saat itu masih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor) secara otomatis mendapatkan KTP Jakarta (Kompas, 15 Januari 1991).

5.2. Daerah Asal Migran

Jawa Barat merupakan daerah utama penerima migran dari DKI Jakarta karena adanya hubungan arus migrasi yang kuat antara Jakarta dan Bogor-Bekasi. Hasil Survei Angkatan Kerja Daerah Tahun 2000 (Sakerda 2000) menunjukkan bahwa dari sebanyak 3.911.582 migran total ke Jawa Barat tercatat 54,73 persen di antaranya berasal dari DKI Jakarta. Hal ini disebabkan selain jarak yang dekat juga karena sistem transportasinya telah berkembang dengan baik. Sehingga tidak mengherankan banyak sekali migran dari DKI Jakarta yang menuju daerah Jawa Barat sekeliling Jakarta (Bogor dan Bekasi). Akibat banyaknya migran yang masuk ke daerah ini tingkat pengangguran di daerah ini pun relatif tinggi dibandingkan daerah lain.

Jumlah migran risen (migran antar propinsi berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu) menunjukkan bahwa jumlah migran yang masuk mencapai 588.588 migran. Migran tersebut sebagian besar berasal dari propinsi DKI Jakarta dengan persentase mencapai 48,24 persen. Urutan berikutnya adalah Jawa Tengah (19,55 persen) dan Sumatra (14,85 persen). Tiga pulau utama pengirim migran ke Jawa Barat adalah Pulau Jawa menyumbang sebesar 77,78 persen, Sumatra 14,85 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,09 persen.

Tabel 5.2.
Persentase Migran Risen yang Masuk Ke Provinsi Jawa Barat menurut Daerah Asal dan Daerah Tujuan Tahun 2000

Daerah Asal Migran	Daerah Tujuan Migran					
	Jawa Barat		Bobek		Bandung	
	1995	2000	1995	2000	1995	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa	79,32	77,77	89,87	88,12	65,28	68,12
DKI Jakarta	48,82	48,22	65,27	64,10	16,62	26,33
Jawa Tengah	21,57	19,55	16,21	15,92	34,94	29,28
DI Yogyakarta	1,46	3,61	1,04	2,56	2,82	7,54
Jawa Timur	7,46	6,38	7,36	5,54	10,90	4,97
Sumatera	14,36	14,84	7,91	9,42	23,23	22,50
Bali + Nusa Tenggara	0,38	3,08	0,03	1,28	1,87	5,31
Kalimantan	1,96	1,62	0,58	1,18	2,80	2,22
Sulawesi	1,98	1,23	0,84	0,00	5,46	1,85
Maluku + Irian	1,10	0,13	0,78	0,00	1,37	0,00
Luar Negeri	0,90	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nominal	756.513	588.588	419.289	305.217	147.828	127.839

Sumber: BPS, SUPAS 1995 dan Hasil Pengolahan SP2000-M

Tingginya persentase migran dari Pulau Jawa, utamanya DKI Jakarta dan Jawa Tengah umumnya menuju daerah perkotaan seperti daerah sekitar Jakarta (Bogor dan Bekasi) dan Bandung. Sebagai contoh jumlah migran risen yang menuju Bandung pada tahun 2000 mencapai 70.638 jiwa sementara yang menuju BOBEK mencapai 61.165 migran.

Selain itu terdapat pola yang berbeda dari asal migran yang menuju daerah sekitar Jakarta (Bobek) dan Bandung. Migran yang menuju Bobek umumnya berasal dari DKI Jakarta dengan persentase mencapai 64,10 persen, diikuti Jawa Tengah (15,92 persen) dan Sumatra (9,42 persen). Sementara migran yang menuju Bandung umumnya berasal dari Jawa Tengah dengan persentase mencapai 29,28 persen, disusul DKI Jakarta (26,33 persen) dan Sumatera (22,50 persen).

Terlihat adanya indikasi bahwa lebih banyak migran memilih Bogor-Bekasi (Bobek) sebagai tempat tinggal walaupun mereka masih tetap bekerja atau sekolah di Jakarta, karena sistem angkutan transportasi di antara kedua daerah tersebut telah berkembang dengan baik. Bahkan berdasarkan *study commuting* ke Jakarta dari kedua wilayah tersebut (Bogor dan Bekasi) lebih dari 15 persen adalah pekerja perempuan (Hugo et. al., 1987: 210). Mereka harus berjuang untuk berebut mendapatkan bis dan jenis transportasi lainnya, terutama pada jam-jam sibuk, karena adakalanya mereka harus berganti alat transportasi dua sampai tiga kali untuk mencapai tempat bekerja (Femina, 1993). Bahkan ada juga komuter dari Jakarta yang bekerja di daerah Bogor dan Bekasi.

5.3 Karakteristik Migran Masuk

Banyaknya migran risen masuk yang ke Jawa Barat tampaknya tidak begitu signifikan perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Tabel 5.3a menunjukkan bahwa sex ratio migran tercatat sebesar 109,2 yang berarti setiap 109 migran laki-laki terdapat hampir 100 migran perempuan.

Menurut status perkawinan ternyata lebih separuhnya (50,2 persen) adalah migran berstatus kawin, diikuti yang belum kawin 47,3 persen dan 2,6 persen diantaranya adalah berstatus janda/duda. Sementara menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa migran laki-laki lebih banyak yang berstatus belum kawin dengan persentase mencapai 51,2 persen, sedangkan migran perempuan lebih banyak yang berstatus kawin dan janda daripada migran laki-laki.

Tabel 5.3a
Migran Risen Masuk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	51,2	43,1	47,3
Kawin	47,6	52,9	50,2
Cerai Hidup	0,5	2,1	1,3
Cerai Mati	0,6	1,9	1,3
Total	100,0	100,0	100,0
N	307.243	281.345	588.588

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Tingkat pendidikan migran umumnya adalah SLTA (SMU dan SM Kejuruan) dengan persentase mencapai 36,63 persen. Sementara itu terdapat kecenderungan bahwa migran laki-laki tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada migran perempuan, di mana persentase migran laki-laki yang pendidikannya di atas SLTA mencapai 11,17 persen sementara migran perempuan hanya 7,44 persen. Bahkan untuk migran laki-laki dengan tingkat pendidikan S2 mencapai 0,43 persen sementara tidak satupun migran perempuan yang pendidikannya S2.

Tabel 5.3b.
Migran Risen Masuk menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2000

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Tamat SD	16,86	15,18	16,05
SD/MI	19,82	22,74	21,22
SLTP	13,86	19,85	16,72
SMU	28,43	26,26	27,39
SM Kejuruan	9,89	8,53	9,24
Diploma I/II	0,39	0,60	0,49
Diploma III/Sarmud	3,87	3,39	3,64
Diploma IV/S1	6,48	3,45	5,03
S2	0,43	-	0,22
Total	100,0	100,0	100,0
N	307.243	281.345	588.588

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

5.4 Motivasi Migran Masuk

Alasan utama pindah migran risen adalah karena ikut suami/istri/orang tua, alasan ekonomi (karena pekerjaan dan mencari pekerjaan), dan pendidikan. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa walaupun alasan mengikuti suami/istri/orang tua lebih signifikan dari kategori lainnya, tetapi alasan ekonomi, seperti pekerjaan dan mencari pekerjaan, juga cukup signifikan bagi migran untuk pindah ke Jawa Barat.

Menurut jenis kelamin, tampaknya terdapat perbedaan antara migran laki-laki dan migran perempuan. Untuk migran laki-laki ternyata alasan ekonomi (karena pekerjaan dan mencari pekerjaan) merupakan alasan utama dengan persentase mencapai 44,24 persen diikuti oleh alasan ikut istri/orang tua dengan persentase sebesar 26,95 persen. Sementara migran perempuan, lebih dari separuhnya (64,86 persen) karena alasan mengikuti suami/orang tua, diikuti oleh alasan pekerjaan (persentasenya mencapai 10,09 persen) dan mencari pekerjaan (8,12 persen).

Tabel 5.4.
Migran Risen Masuk menurut Alasan Utama Pindah dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Alasan Utama Pindah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerjaan	27,61	10,09	19,15
Mencari Pekerjaan	16,63	8,12	12,52
Pendidikan	6,99	3,99	5,54
Per. Stat. Perkawinan	1,55	1,45	1,50
Ikut Suami/istri/Ortu	26,95	64,86	45,24
Ikut Saudara	7,38	8,03	7,69
Perumahan	7,41	1,87	4,74
Keamanan	1,54	-	0,80
Lainnya	3,95	1,59	2,81
Total	100,0	100,0	100,0
N	307.243	281.345	588.588

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Untuk daerah Jawa Barat yang lokasinya berada di sekitar Jakarta, seperti Kota Bekasi alasan perumahan ternyata cukup signifikan dengan persentase mencapai 13,85 persen. Tingginya persentase perumahan di Kota Bekasi disebabkan oleh tingginya harga tanah dan harga sewa rumah di Jakarta menyebabkan mereka memutuskan untuk bertempat tinggal di wilayah sekitar Jakarta tersebut. Sementara untuk Kota Bandung, alasan pendidikan persentasenya cukup tinggi yaitu mencapai 26,58 persen, di samping alasan pekerjaan (23,12 persen) dan mencari pekerjaan (16,19 persen). Di Kota Bandung memang terdapat banyak fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi yang dianggap favorit dan cukup menjanjikan seperti ITB, UNPAD, UNPAR, UNPAS, UNISBA, dan sebagainya. Sehingga merupakan salah satu tempat favorit bagi para migran untuk melanjutkan sekolah di Kota Bandung.

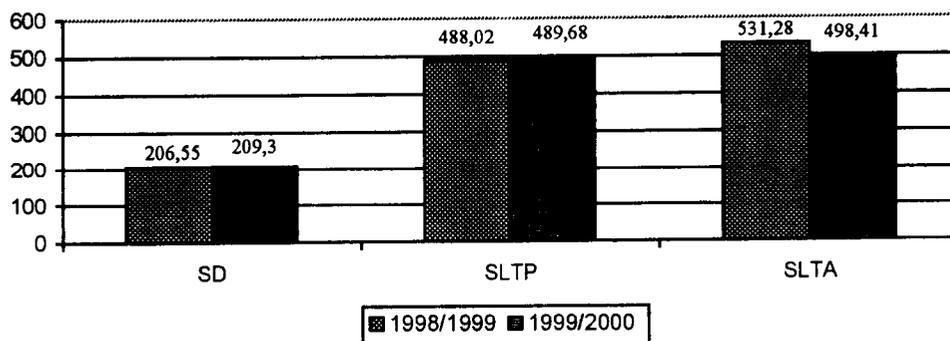
BAB VI PENDIDIKAN

Tidak diragukan, pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana program pendidikan diimplementasikan diperlukan data dan indikator yang handal. Berdasarkan data hasil survei kependudukan tahun 2000 dengan menggunakan dokumen SP2000M diperoleh beberapa indikator pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, dan beberapa indikator lainnya yang akan dianalisis pada bab ini.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu modal utama penggerak pembangunan di samping sumber daya alam. Salah satu sarana penunjang peningkatan SDM tersebut adalah melalui pendidikan formal yang diadakan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, sampai akademi/perguruan tinggi. Bila dibandingkan dengan tahun ajaran 1998/1999 jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mengalami sedikit peningkatan pada tahun 1999/2000. Kecuali sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah penduduk usia SLTA namun sarana/gedung sekolah untuk tingkat SLTA tidak bertambah. Tidak bertambahnya sarana ini berkaitan dengan jumlah penduduk lulusan SLTP yang diperkirakan banyak yang tidak melanjutkan

Grafik 6.1.
Rasio Murid Terhadap Sekolah menurut Tingkat Sekolah
di Provinsi Jabar Periode 1998/1999 dan 1999/2000



Sumber : Kanwil Depdiknas Jawa Barat, Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1998 dan 1999

studi/pendidikannya ke SLTA. Setamatnya dari SLTP mereka langsung bekerja, mengingat kondisi perekonomian yang belum begitu baik dan daya beli masyarakat yang masih kurang. Hal lain yang diperkirakan turut mempengaruhi adalah kejadian bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Jawa Barat, yang tidak hanya merusak sarana peribadatan namun juga

gedung-gedung sekolah. Selain itu juga minimnya dana pemerintah daerah untuk membangun gedung sekolah yang baru.

6.1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa.

Tabel 6.1.1
APK menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki (L)	106,00	78,05	46,51
Perempuan (P)	105,68	73,58	47,89
L + P	105,85	75,86	47,19

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua). Pada tabel 6.1.1 terlihat bahwa APK SD di Jawa Barat berdasarkan hasil survei kependudukan tahun 2000 adalah 105,85 (lebih dari 100 persen). Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

APK SD di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan, walaupun tidak terlalu mencolok. Kemungkinan karena di perkotaan akses untuk mencapai ataupun memperoleh sarana dan prasarana sekolah, terutama SD, lebih mudah. Kemungkinan lain adalah akibat gencarnya program wajib belajar dilakukan di seluruh daerah, terutama di perkotaan. Perbedaan mencolok baru terjadi pada jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SLTP dan SLTA. APK SLTP dan APK SLTA di daerah perdesaan sangat kecil dibandingkan di perkotaan. Kemungkinan karena selain sulitnya akses untuk mencapai fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut, juga karena di perdesaan penduduknya cenderung untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena sebagian dari mereka begitu tamat SD langsung memasuki dunia kerja. Berbeda halnya dengan di perkotaan. Selain kemudahan akses untuk mencapai fasilitas pendidikan pada berbagai jenjang, juga tingkat kesadaran masyarakat kota yang sudah tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin.

Tabel 6.1.2.
APK menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Perdesaan, dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan			
Laki-Laki (L)	106,01	66,43	27,70
Perempuan (P)	105,38	61,56	25,62
L + P	105,70	64,11	26,72
Perkotaan			
Laki-Laki (L)	105,98	91,06	64,72
Perempuan (P)	106,03	85,71	65,96
L + P	106,01	88,36	65,36

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

6.2. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) mengindikasikan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 6.2.1.
APM menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki (L)	91,98	61,39	36,35
Perempuan (P)	91,72	58,39	37,33
L + P	91,85	59,92	36,83

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Jawa Barat adalah sebesar 91,85 persen, artinya lebih dari 90 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Jawa Barat.

Tabel 6.2.2.
APM menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Perdesaan, dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan			
Laki-Laki (L)	92,56	53,43	21,60
Perempuan (P)	92,62	48,79	20,83
L + P	92,59	51,22	21,24
Perkotaan			
Laki-Laki (L)	91,34	70,31	50,64
Perempuan (P)	90,69	68,06	50,72
L + P	91,03	69,17	50,68

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

APM SD di perdesaan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini terjadi kemungkinan karena di perdesaan dalam hal menyekolahkan anak ke sekolah dasar, orangtua cenderung untuk memasukkan anak tersebut tepat waktu sesuai umurnya karena faktor biaya. Sementara kecenderungan orangtua di perkotaan adalah segera menyekolahkan anaknya ke SD walaupun usia anak tersebut kurang dari 7 tahun. Bahkan dewasa ini banyak sekali anak SD di perkotaan, terutama kelas 1 SD yang usianya kurang dari 6 tahun. Kemungkinan karena faktor "gengsi", ambisi orang tua yang khawatir anaknya tertinggal pendidikannya dari anak lain seusianya, dan sebagainya. Akibatnya penduduk perkotaan yang bersekolah di SD yang tepat waktu dan sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut persentasenya lebih kecil dibandingkan penduduk di perdesaan. Sementara menurunnya persentase APM pada jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SLTP dan SLTA, adalah karena alasan yang sama dengan menurunnya persentase APK pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 6.2.3 memperlihatkan APM per kabupaten/kota menurut jenjang pendidikan. APM SD terendah terdapat di Kota Cirebon, yaitu sebesar 88,14 persen. Hal ini tidak berarti bahwa partisipasi sekolah penduduk di Kota Cirebon kurang, namun kemungkinan karena Kota Cirebon adalah kota yang hanya terdiri atas 5 kecamatan dan tidak mempunyai wilayah perdesaan, sehingga APM-nya hanya diperoleh dari wilayah perkotaan yang sedikit tersebut. Akibatnya APM SD di wilayah ini menjadi rendah.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SLTP dan SLTA tidak dapat digunakan alasan yang sama, karena pada jenjang ini di seluruh kabupaten/kota terjadi penurunan angka partisipasi. Dengan kata lain senantiasa terdapat sejumlah penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fakta-fakta yang dipaparkan menunjukkan dengan jelas bahwa program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sejak awal Pelita VI masih jauh dengan kenyataan.

Tabel 6.2.3.
APM menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	89,07	49,04	33,10
02. Kab. Sukabumi	90,88	49,26	22,23
03. Kab. Cianjur	93,78	54,53	26,35
04. Kab. Bandung	89,60	65,05	39,88
05. Kab. Garut	95,28	60,56	32,09
06. Kab. Tasikmalaya	91,57	52,91	29,28
07. Kab. Ciamis	93,14	68,95	40,46
08. Kab. Kuningan	94,31	59,03	38,00
09. Kab. Cirebon	92,79	53,80	33,41
10. Kab. Majalengka	95,35	59,04	25,94
11. Kab. Sumedang	91,66	55,98	35,32
12. Kab. Indramayu	88,82	59,24	27,05
13. Kab. Subang	93,65	60,06	32,68
14. Kab. Purwakarta	91,77	61,17	36,79
15. Kab. Karawang	93,95	60,26	35,70
16. Kab. Bekasi	93,23	67,91	36,85
17. Kota Bogor	90,00	67,19	58,05
18. Kota Sukabumi	95,07	73,20	59,65
19. Kota Bandung	89,87	72,97	55,19
20. Kota Cirebon	88,14	66,65	52,78
21. Kota Bekasi	95,23	80,24	66,84
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	91,85	59,92	36,83

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000 -M

6.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang jumlah anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Tabel 6.3.1 memperlihatkan APS menurut jenis kelamin dan kelompok umur pendidikan. Dari tabel di atas terlihat bahwa pada kelompok umur 7-12 tahun APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun pada kelompok umur berikutnya (13-15 tahun dan 16-18 tahun) APS perempuan menurun. Kemungkinan perempuan di Jawa Barat banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya karena faktor biaya, status perkawinan, ataupun karena pekerjaan. Selain itu masih melekatnya faktor budaya nenek moyang, terutama di perdesaan, yang menganggap bahwa kaum perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga. Sehingga

begitu mereka menamatkan SD, tidak perlu lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian mereka segera menikah dan sebagian lagi bekerja di dapur atau langsung bekerja untuk membantu mendapatkan penghasilan. Hal ini diperkuat oleh fakta yang ada pada Tabel 6.3.2, di mana APS di daerah pedesaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan APS di daerah perkotaan.

Tabel 6.3.1.
APS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Kelompok Umur Pendidikan		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki (L)	96,14	76,21	46,46
Perempuan (P)	96,46	75,16	45,47
L + P	96,29	75,70	45,98

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Tabel 6.3.2
APS menurut Jenis Kelamin, Perkotaan dan Pedesaan, dan Kelompok Umur Pendidikan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Kelompok Umur Pendidikan		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan			
Laki-Laki (L)	95,37	67,75	30,41
Perempuan (P)	95,73	65,60	28,47
L + P	95,55	66,73	29,50
Perkotaan			
Laki-Laki (L)	96,98	85,69	62,00
Perempuan (P)	97,29	84,80	59,28
L + P	97,13	85,24	60,60

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000 -M

6.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) merefleksikan tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya. Misalnya APTS SD, menunjukkan tingkat putus sekolah di SD. Indikator ini menggambarkan kemampuan penduduk usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan pada usia tersebut. Misalnya penduduk umur 7-12 tahun yang seharusnya dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD), namun karena faktor ekonomi misalnya, dia tidak dapat menyelesaikan pendidikan SD tersebut hingga tamat dan memperoleh sertifikat/ijazah, misalnya hanya mampu sekolah sampai dengan kelas 3 ataupun sampai kelas 6 tapi tidak sampai selesai/tamat.

Tabel 6.4.1.
Angka Putus Sekolah (APTS) menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	Usia Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki (L)	1,37	7,28	23,49
Perempuan (P)	1,11	7,76	18,05
L + P	1,24	7,51	20,84

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

APTS laki-laki Jawa Barat secara umum lebih tinggi dari perempuan dan semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar pula angka putus sekolah, seperti ditunjukkan oleh data pada Tabel 6.4.1. APTS laki-laki usia sekolah 7-12 tahun (1,37 persen) lebih tinggi daripada perempuan (1,11 persen). Walaupun pada usia sekolah 13-15 tahun angka perempuan sedikit lebih tinggi, tetapi pada usia 16-18 tahun kembali APTS laki-laki (23,49 persen) lebih tinggi dari APTS perempuan (18,05 persen).

Fakta tersebut cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Barangkali untuk menjelaskannya perlu kita tampilkan data yang lebih terperinci, misalnya menurut kabupaten/kota. APTS perempuan pada usia sekolah 13-15 tahun (7,76 persen) lebih besar dari APTS laki-laki (7,28 persen), kemungkinan setelah menamatkan jenjang pendidikan SD perempuan cenderung untuk segera menikah atau membantu pekerjaan rumah tangga, terutama di pedesaan, ataupun bekerja untuk membantu memperoleh penghasilan. Sedangkan laki-laki lebih diutamakan untuk dapat bersekolah lebih tinggi. Namun pada usia sekolah 16-18 tahun ternyata APTS laki-laki (23,49 persen) jauh lebih besar dibandingkan perempuan (18,05 persen). Hal ini diduga berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri kita di pertengahan tahun 1997. Kaum laki-laki pada usia ini (16-18 tahun) terpaksa berhenti sekolah sebelum waktunya karena harus bekerja membantu perekonomian rumah tangga. Karena jumlah laki-laki yang bersekolah pada usia ini diperkirakan lebih banyak dibandingkan perempuan, maka APTS laki-laki menjadi lebih besar dari perempuan.

Data pada Tabel 6.4.2 menunjukkan APTS usia sekolah 7-12 tahun di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang adalah sebesar 0,00 persen. Hal ini merefleksikan bahwa di kedua kabupaten tersebut kemungkinan penduduk usia 7-12 tahun mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Artinya hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang bersekolah minimal sampai dengan tingkat SD dan tamat. APTS usia sekolah 7-12 tahun tertinggi adalah di Kabupaten Indramayu (3,76 persen). Sedangkan APTS usia sekolah 13-15 tahun tertinggi adalah di Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar 17,06 persen, dan tertinggi kedua adalah Kabupaten Indramayu (16,86 persen). APTS usia sekolah 16-18 tertinggi terdapat di Kabupaten Indramayu, yaitu sebesar 70,47 persen. Dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Indramayu adalah yang terbesar di Jawa Barat.

Tabel 6.4.2.
Angka Putus Sekolah (APTS) menurut Kabupaten/Kota dan Usia Sekolah
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Usia Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	0,93	13,04	37,07
02. Kab. Sukabumi	1,99	17,06	42,20
03. Kab. Cianjur	1,79	11,06	38,19
04. Kab. Bandung	1,59	6,92	12,59
05. Kab. Garut	1,20	9,76	37,95
06. Kab. Tasikmalaya	1,31	2,76	17,89
07. Kab. Ciamis	0,63	0,59	8,25
08. Kab. Kuningan	0,00	2,90	9,50
09. Kab. Cirebon	1,01	8,12	32,67
10. Kab. Majalengka	1,10	6,03	23,51
11. Kab. Sumedang	0,00	1,68	1,08
12. Kab. Indramayu	3,76	16,86	70,47
13. Kab. Subang	0,60	7,82	18,11
14. Kab. Purwakarta	1,29	7,87	25,92
15. Kab. Karawang	1,02	5,52	16,37
16. Kab. Bekasi	1,08	3,28	13,69
17. Kota Bogor	1,06	5,78	9,38
18. Kota Sukabumi	0,85	4,10	6,05
19. Kota Bandung	1,15	2,61	5,91
20. Kota Cirebon	0,35	7,03	16,08
21. Kota Bekasi	0,61	1,52	2,23
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	1,24	7,51	20,84

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
 Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

6.5. Persentase Melek Huruf

Melek huruf adalah penduduk umur 5 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya. Untuk keperluan analisis, batasan umur yang digunakan adalah 7 tahun ke atas (usia sekolah) dengan pertimbangan bahwa mereka yang berumur 5 tahun sebagian besar belum bersekolah dan pada dasarnya belum dapat membaca dan menulis. Indikator melek huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi persentase Melek Huruf (MH) semakin tinggi mutu SDM suatu masyarakat.

Tabel 6.5.1.
Persentase Melek Huruf (MH) menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Jenis Kelamin	PMH
(1)	(2)
Laki-Laki (L)	94,9
Perempuan (P)	90,1
L + P	92,5

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Angka Melek Huruf (MH) Jawa Barat menurut hasil survei kependudukan SP2000 sebesar 92,5 persen, dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan masing-masing 94,9 persen dan 90,1 persen. Perempuan lebih banyak yang buta huruf dibandingkan laki-laki. Kemungkinan hal ini berhubungan dengan tingkat atau jenjang pendidikan bagi laki-laki yang cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Di samping itu, kenyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat terutama di perdesaan yang cenderung mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Tabel 6.5.2.
Kecenderungan Persentase Melek Huruf (MH) Penduduk
di Provinsi Jawa Barat Periode 1996-2000

Tahun	Persentase MH
(1)	(2)
1996	90,1
1997	91,9
1998	91,7
1999	92,2
2000	92,1

Catatan : Batasan usia yang digunakan adalah 10 tahun ke atas
 Sumber: BPS, Susenas 1996-2000

Khusus untuk membandingkan kecenderungan Angka Melek Huruf (MH) dari periode ke periode maka digunakan batasan usia penduduk 10 tahun ke atas, dan sumber data yang digunakan adalah dari Susenas. Tabel 6.5.2 menunjukkan persentase Melek Huruf (MH) Jawa Barat yang cenderung meningkat dalam periode 1996-2000, walaupun terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan mutu SDM masyarakat Jawa Barat yang sudah semakin baik. Hampir seluruh penduduk Jawa Barat sudah melek huruf, dan berarti pula mereka sudah siap untuk maju dan berkembang, dan siap pula untuk memasuki era globalisasi dan teknologi canggih.

Data pada Tabel 6.5.3 memperlihatkan persentase Melek Huruf Jawa Barat periode 1999-2000 yang cenderung menurun. Di beberapa kabupaten/kota tidak terjadi penurunan. Meskipun angka putus sekolah di Kabupaten Indramayu adalah yang tertinggi di Jawa Barat, namun angka melek huruf kabupaten ini, walaupun di bawah 80 persen, mengalami peningkatan. Hal ini

mengindikasikan bahwa hampir 80 persen penduduk di Kabupaten Indramayu sudah melek huruf, walaupun di antara mereka banyak yang putus sekolah.

Tabel 6.5.3.
Kecenderungan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Periode 1999-2000

Kabupaten/Kota	Periode	
	1999	2000
(1)	(2)	(3)
01. Kab. Bogor	92,9	91,7
02. Kab. Sukabumi	94,9	93,3
03. Kab. Cianjur	95,6	92,5
04. Kab. Bandung	94,2	96,6
05. Kab. Garut	95,3	95,7
06. Kab. Tasikmalaya	95,0	96,8
07. Kab. Ciamis	94,3	93,7
08. Kab. Kuningan	91,8	92,4
09. Kab. Cirebon	87,4	89,5
10. Kab. Majalengka	89,1	89,5
11. Kab. Sumedang	95,5	92,2
12. Kab. Indramayu	70,1	72,7
13. Kab. Subang	87,2	85,0
14. Kab. Purwakarta	92,1	92,7
15. Kab. Karawang	86,0	88,6
16. Kab. Bekasi	89,4	82,2
17. Kota Bogor	97,2	97,6
18. Kota Sukabumi	96,6	98,0
19. Kota Bandung	98,1	98,8
20. Kota Cirebon	94,8	94,6
21. Kota Bekasi	97,2	96,9
22. Kota Depok *)	-	-
Jawa Barat	92,2	92,1

*) Datanya masih tergabung dengan Kab . Bogor
Sumber: BPS, Susenas 1999 dan 2000

Hampir 90 persen penduduk di kota, kecuali Kota Cirebon dan Kota Bekasi, mengalami kenaikan angka melek huruf. Kenaikan paling tinggi adalah di Kota Sukabumi, dari 96,6 persen menurut hasil Susenas 1999 menjadi 98,0 persen menurut hasil Susenas 2000. Dilihat dari mutu SDM, di kota cenderung lebih baik dibanding di kabupaten karena akses ke berbagai fasilitas dan pelayanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pendidikan, lebih mudah dicapai dan tersedia. Kondisi ekonomi mereka juga cenderung lebih baik sehingga kesempatan untuk meningkatkan mutu SDM lebih terbuka bagi penduduk kota.

BAB VII KESEHATAN

Fokus utama pembangunan di Jawa Barat adalah manusia dan masyarakat Jawa Barat. Selain sebagai fokus utama pembangunan, mereka juga sekaligus menjadi modal dasar kekuatan, faktor dominan, dan sasaran utama pembangunan. Misi utama pembangunan Jawa Barat 2001-2005 adalah menciptakan manusia yang berkualitas dengan 3 (tiga) ciri utama, yaitu sehat dan berumur panjang; benar, cerdas, kreatif, terampil dan terdidik, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa (*cageur, bageur, bener, pinter tur singer*); serta manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak (Rencana Strategis Pembangunan Jawa Barat 2001-2005). Kesemuanya ini dapat terwujud jika tingkat kesehatan penduduk terjamin. Tingkat kesehatan penduduk merupakan cerminan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Penduduk dengan kondisi fisik yang sehat dapat menunjang dan meningkatkan produktivitas yang tinggi dan lebih berkualitas dalam pembangunan.

Melihat betapa pentingnya isu dimensi manusia dalam pembangunan sehingga pembangunan manusia selalu menjadi prioritas utama. Hal ini tercermin dari penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM.

Gambaran mengenai kesehatan dalam penulisan analisis ini diambil dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2000, karena keterbatasan data hasil SP2000 dalam mencakup pembahasan mengenai aspek tersebut.

7.1. Upaya Perbaikan Kesehatan

Upaya meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk Jawa Barat dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Walaupun jumlah puskesmas dan tenaga kesehatan tidak mengalami penambahan pada periode 1998-1999, namun ketersediaan

Tabel 7.1.1
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat
Periode 1997-1999

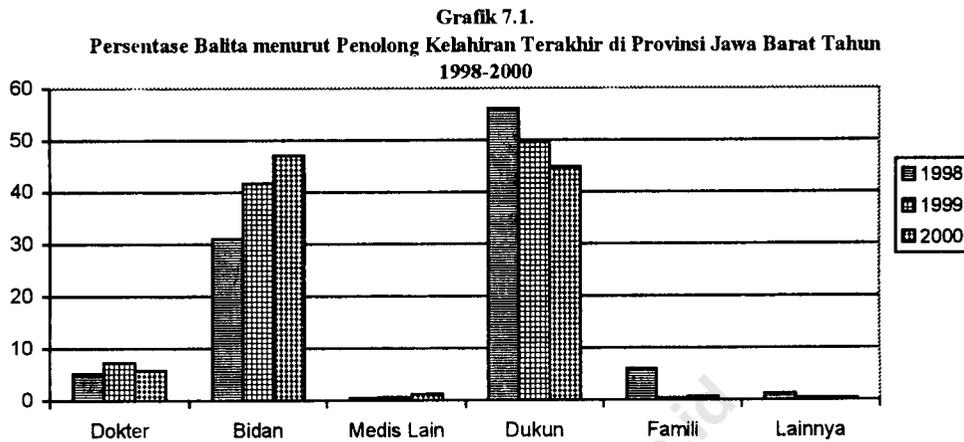
Tahun	Jumlah Sarana Kesehatan			Jumlah Tenaga Kesehatan	
	RS *)	Puskesmas	BP *)	Dokter	TM *) lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1997	100	2.876	1.236	2.524	15.622
1998	97	2.902	1.236	3.525	22.108
1999	106	2.734	1.643	3.133	20.205

*) RS = Rumah Sakit, BP = Balai Pengobatan, TM = Tenaga Medis

Sumber : Kanwil Dep. Kesehatan Jawa Barat, Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1997, 1998, dan 1999

balai pengobatan meningkat (Daerah Dalam Angka Jawa Barat, 1999: 82). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penolong kelahiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2000 (Susenas 2000) persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis masih cukup besar dibandingkan nonmedis. Untuk penolong



Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999 dan 2000

persalinan dengan tenaga medis, kebanyakan penduduk Jawa Barat mempercayakan penolong persalinannya kepada bidan (46,96 persen), dokter merupakan tenaga medis berikutnya yang dipilih oleh penduduk Jawa Barat (5,85 persen), sisanya ditolong oleh tenaga medis lainnya (1,33 persen). Sedangkan penolong waktu lahir yang dilakukan oleh tenaga nonmedis didominasi oleh dukun (44,82 persen), famili (0,67 persen), dan lainnya (0,37 persen).

Salah satu indikator kesehatan yang cukup menarik untuk diamati adalah kesehatan ibu hamil dan balita. Penolong proses kelahiran sangat mempengaruhi derajat kesehatan dan tingkat keamanan kelangsungan ibu bersalin maupun anak yang dilahirkan. Untuk melihat tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran di mana resiko kematian sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 10.2 berikut.

Tabel 7.1.2.
Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Jawa Barat Periode 1998 - 2000

Tahun	Penolong Kelahiran Terakhir					
	Dokter	Bidan	TM Lain	Dukun	Famili	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1998	6,49	35,92	0,93	51,28	4,42	0,96
1999	7,20	43,23	0,74	47,96	0,42	0,45
2000	5,85	46,96	1,33	44,82	0,67	0,37

Sumber : BPS, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 1998, 1999, 2000

Pada tahun 1998 sebagian besar masyarakat Jawa Barat lebih mempercayakan proses persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga nonmedis, yaitu oleh dukun (51,28 persen). Namun persentasenya menurun pada tahun-tahun berikutnya, berturut-turut pada tahun 1999 sebesar

47,96 persen atau turun sebanyak 3,32 poin. Pada tahun 2000 bahkan hanya tinggal 44,82 persen masyarakat yang proses persalinan terakhirnya ditolong oleh dukun. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian kita menjelang tahun 1999. Masyarakat Jawa Barat dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik ini pada tahun-tahun terakhir mulai menggunakan tenaga medis untuk membantu proses persalinannya. Tenaga medis yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat menurut hasil Susenas tahun 2000 adalah bidan (46,96 persen).

Persentase penolong persalinan oleh bidan meningkat dari 35,92 persen pada tahun 1998 menjadi 43,23 persen pada tahun 1999, dan terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 46,96 persen. Tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terutama kesehatan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, semakin meningkat juga.

Walaupun demikian, masih sedikit sekali masyarakat yang mempercayakan proses persalinannya untuk ditolong oleh ahlinya yang lebih terjamin baik dari segi kebersihan maupun kesehatan ibu dan anak, yaitu dokter (5,85 persen). Bahkan angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999 yang sudah mencapai 7,20 persen. Seperti diketahui bersama, biaya untuk konsultasi atau memeriksakan kesehatan ke seorang dokter ahli/spesialis, dalam hal ini spesialis kandungan, memang masih relatif mahal. Selain itu, tenaga dokter ahli inipun keberadaannya masih sangat sedikit. Sebagian besar mereka hanya ada di daerah perkotaan, sedangkan di perdesaan hampir tidak ada.

Faktor lain adalah masyarakat perdesaan yang cenderung untuk berpikir ekonomis, bahwa selama kehamilannya dirasakan tidak bermasalah maka proses persalinan pun cukup ditangani oleh dukun bayi atau paling tinggi bidan. Pemikiran semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat perdesaan tetapi juga pada sebagian masyarakat perkotaan, terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah. Bahkan yang terjadi di perdesaan lebih parah lagi, mereka cenderung tidak memeriksakan kehamilannya sama sekali baik ke tenaga medis ataupun nonmedis. Mereka menganggap kehamilan adalah hal yang biasa saja, tidak ada resiko apapun yang membahayakan kelangsungan hidup si ibu dan bayi yang akan dilahirkan (Pikiran Rakyat, Jumat 27 Juli 2001).

Namun demikian, jika dilihat dari persentasenya boleh dikatakan tingkat kesadaran sebagian masyarakat Jawa Barat akan pentingnya hidup sehat telah meningkat, terutama kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ibu sejak hamil sampai dengan masa pasca persalinan. Mereka yang mempercayakan pertolongan persalinannya pada tenaga nonmedis persentasenya cenderung menurun. Persentase penolong kelahiran terakhir oleh bidan (tenaga medis) lebih besar dibandingkan oleh dukun (tenaga nonmedis), masing-masing sebesar 46,96 persen dan 44,82 persen.

Penurunan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Kecuali di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, persentase penolong kelahiran oleh tenaga nonmedis tampak mengalami peningkatan. Walaupun untuk Kota Bandung peningkatannya relatif kecil bahkan hampir tidak berarti, meningkat sekitar 2,67 poin dari 15,00 persen menurut hasil Susenas 1999 menjadi 17,67 persen menurut hasil Susenas 2000. Kenaikan ini terjadi kemungkinan lebih pada pertimbangan ekonomi. Selain itu, pada umumnya tenaga nonmedis (dalam hal ini dukun bayi) saat ini kebanyakan sudah dibekali keterampilan bidang kesehatan, bahkan tidak sedikit pula di antaranya yang telah memiliki sertifikat dari instansi terkait, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat relatif lebih tinggi dibandingkan waktu sebelumnya.

Tabel 7.1.3.
 Persentase Balita di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan
 Penolong Kelahiran Terakhir Periode 1998 -2000

Kabupaten/ Kota	Tenaga Medis			Tenaga Nonmedis		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kab. Bogor	42,65	51,84	54,28	57,35	48,16	45,72
02. Kab. Sukabumi	19,38	22,19	20,88	80,62	77,81	79,12
03. Kab. Cianjur	14,82	20,05	31,57	85,18	79,95	68,43
04. Kab. Bandung	36,17	47,97	54,27	63,83	52,03	45,73
05. Kab. Garut	25,74	24,42	43,01	74,26	75,58	56,99
06. Kab. Tasikmalaya	40,08	37,10	45,90	59,92	62,90	54,10
07. Kab. Ciamis	38,71	40,41	40,96	61,29	59,59	59,04
08. Kab. Kuningan	59,46	71,87	76,17	40,54	28,13	23,83
09. Kab. Cirebon	51,92	61,15	66,28	48,08	38,86	33,72
10. Kab. Majalengka	51,94	59,45	55,99	48,06	40,55	44,01
11. Kab. Sumedang	32,33	51,08	51,22	67,67	48,92	48,78
12. Kab. Indramayu	37,38	34,00	50,00	62,62	66,00	50,00
13. Kab. Subang	44,29	59,46	61,66	55,71	40,54	38,34
14. Kab. Purwakarta	29,11	32,79	43,97	70,89	67,21	56,03
15. Kab. Karawang	63,64	57,95	63,94	36,36	42,05	36,06
16. Kab. Bekasi	70,06	70,61	62,76	29,94	29,39	37,24
17. Kota Bogor	36,79	69,02	79,25	63,21	30,98	20,75
18. Kota Sukabumi	55,68	55,27	66,95	44,32	44,73	33,05
19. Kota Bandung	73,39	85,00	82,33	26,61	15,00	17,67
20. Kota Cirebon	84,12	87,15	89,32	15,88	12,85	10,68
21. Kota Bekasi	-	91,63	82,13	-	8,37	17,87
22. Kota Depok	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	43,34	51,17	54,14	56,66	48,83	45,86

Sumber : BPS, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 1998, 1999, dan 2000

Faktor lainnya yang secara tidak langsung turut mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat adalah pemberian air susu ibu (ASI), yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Sayangnya, tidak semua ibu mengetahui hal ini. Berdasarkan hasil Susenas 2000, balita yang diberi ASI hingga mencapai usia maksimal (2 tahun atau 24 bulan) sebanyak 1.111.677 balita atau sekitar 38,53 persen. Balita yang sama sekali tidak memperoleh ASI berjumlah 27.651 balita (0,96 persen).

Tabel 7.1.4.
Persentase Balita di Provinsi Jawa Barat yang Pernah Disusui menurut Lamanya Disusui
Periode 1998-2000

Tahun	Lama Disusui (bulan)					
	0	1-5	6-11	12-17	18-23	24+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1998	0,12	8,16	12,51	19,78	21,36	38,07
1999	1,18	7,60	12,37	18,72	22,09	38,04
2000	0,96	9,49	11,44	17,43	22,16	38,53

Sumber : BPS, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 1998, 1999, dan 2000

Pemberian ASI di Jawa Barat cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase balita yang tidak diberi ASI (0 bulan) dari 1,18 persen menurut hasil Susenas 1999 menjadi 0,96 persen (hasil Susenas 2000). Walaupun kemudian terjadi peningkatan pada periode 1998-1999 dari 0,12 persen menjadi 1,18 persen. Kemungkinan hal ini terjadi karena daya beli masyarakat pada periode tersebut (1998-1999) yang masih lemah. Walaupun memasuki tahun 1999 kondisi perekonomian kita sudah membaik, namun masih belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Akibatnya banyak sekali ibu-ibu rumahtangga yang terpaksa bekerja guna mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarganya, dengan resiko tidak menyusui bayinya. Sedangkan pada periode 1999-2000 terjadi penurunan persentase balita yang tidak disusui diduga penyebabnya masih berkaitan dengan periode sebelumnya. Pada periode ini harga-harga yang sudah tak terjangkau oleh daya beli masyarakat (terutama masyarakat golongan ekonomi lemah) semakin tinggi melambung, terutama harga susu. Hal ini membuat para ibu berpikir untuk memberikan air susunya bagi bayi yang bersangkutan di awal masa pertumbuhannya, walaupun tidak maksimal. Walaupun kelihatannya "terpaksa", namun di balik semua kemungkinan yang ada mengindikasikan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

7.2. Status Kesehatan

Status kesehatan merupakan indikator derajat atau tingkat kesehatan masyarakat sebagai hasil dari upaya pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan secara lintas sektoral. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat di suatu daerah adalah jenis keluhan kesehatan utama yang dialami penduduk dalam periode waktu satu bulan sebelum pencacahan. Tabel 7.2.1 menunjukkan bahwa penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Jawa Barat adalah penyakit khas daerah tropis, seperti panas, batuk, dan pilek.

Tabel 7.2.1
Persentase Penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Keluhan Kesehatan Utama
Periode 1998-2000

Tahun	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998	28,45	29,09	32,95	9,51
1999	27,58	30,41	34,58	7,43
2000	18,02	23,25	26,38	32,34

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998-2000

Terjadi lonjakan kenaikan persentase untuk jenis penyakit "lainnya" mencapai 32,34 persen. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat pada beberapa tahun belakangan ini akibat situasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang tidak menentu. Tidak berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun, namun dengan lemahnya daya beli masyarakat cenderung untuk menunda kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan bila mereka mempunyai keluhan kesehatan. Selain itu situasi perekonomian yang kian tak menentu menyebabkan sebagian masyarakat menjadi "stres" sehingga keluhan kesehatan yang banyak diderita oleh masyarakat cenderung mengumpul di jenis penyakit "sakit kepala berulang" yang dalam analisis ini dikategorikan sebagai jenis penyakit "lainnya".

Tabel 7.2.2
Persentase Penduduk di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Keluhan Kesehatan Utama dan Jenis Kelamin Periode 1998-2000

Tahun	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
1998	28,15	29,11	32,54	10,20
1999	27,66	30,71	33,87	7,77
2000	18,45	23,99	27,02	30,54
Perempuan				
1998	28,79	29,07	33,40	8,75
1999	27,49	30,10	35,34	7,07
2000	17,56	22,47	25,70	34,26

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998-2000

Tabel 7.2.2 memperlihatkan bahwa laki-laki ternyata lebih rentan terhadap jenis penyakit panas, batuk, dan pilek. Namun untuk jenis penyakit "lainnya" lebih banyak diderita oleh perempuan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan semakin tidak menentunya kondisi perekonomian dan melemahnya daya beli masyarakat, di mana dalam hal ini paling berdampak pada kaum perempuan. Sebagai ibu rumah tangga mereka harus pintar mengelola ekonomi rumah tangga dengan pemasukan yang boleh dikatakan "pas-pasan." Dengan kondisi seperti itu mereka cenderung lebih mengalah dalam hal mengkonsumsi makanan. Mereka akan mendahulukan keluarganya, dalam hal ini anak-anak dan suaminya tanpa menghiraukan kesehatan mereka sendiri. Sehingga tidak heran jika persentase perempuan untuk keluhan kesehatan utama "lainnya" ini menjadi tinggi.

7.3. Angka Harapan Hidup

Indikator lain dalam mengukur dan menganalisis status kesehatan dan gizi adalah angka harapan hidup pada waktu lahir (e_0) yang mempunyai kaitan dengan angka kematian bayi. Sebenarnya kedua ukuran ini mempunyai korelasi negatif yang artinya jika AKB tinggi maka angka harapan hidupnya menjadi rendah, dan sebaliknya.

Tabel 7.3.1 menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Propinsi Jawa Barat sebetulnya masih relatif rendah. Pada tahun 1999 AHH masyarakat Jawa Barat sekitar 61 tahun dan pada tahun 2000 menjadi 65 tahun (bandingkan dengan AHH Nasional yang pada tahun 1999 sudah mencapai 66 tahun: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 1999). Masih rendahnya AHH ini

tidak terlepas dari masih tingginya tingkat kematian bayi di propinsi ini. Beberapa daerah di Jawa Barat yang terkenal dengan Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi antara lain di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 7.3.1.
Kecenderungan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Barat
menurut Kabupaten/Kota Tahun 1995-2000

No	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (e ₀)					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Kab. Bogor	60,46	60,60	62,08	64,47	65,20	66,33
02	Kab. Sukabumi	57,83	58,17	60,20	61,72	62,40	63,87
03	Kab. Cianjur	58,03	58,43	60,50	62,91	63,60	63,53
04	Kab. Bandung	63,16	63,33	64,87	65,88	66,60	68,37
05	Kab. Garut	58,76	59,33	61,43	58,70	59,40	60,93
06	Kab. Tasikmalaya	58,39	59,13	62,02	64,79	65,50	65,70
07	Kab. Ciamis	59,05	59,50	62,30	63,23	63,90	64,67
08	Kab. Kuningan	63,32	63,77	65,20	64,16	64,90	66,60
09	Kab. Cirebon	61,21	61,60	62,82	62,29	63,00	64,90
10	Kab. Majalengka	62,17	62,47	63,30	62,29	63,00	64,03
11	Kab. Sumedang	64,42	64,63	65,63	65,78	66,50	66,83
12	Kab. Indramayu	56,07	56,57	59,57	62,55	63,30	63,87
13	Kab. Subang	62,46	62,83	64,30	64,32	65,00	66,20
14	Kab. Purwakarta	58,97	59,17	60,25	62,76	63,50	63,93
15	Kab. Karawang	57,14	57,43	59,40	61,72	62,40	64,00
16	Kab. Bekasi	59,44	59,70	61,77	65,88	66,60	67,82
17	Kota. Bogor	74,84	74,93	75,23	66,97	67,70	69,70
18	Kota. Sukabumi	65,97	66,20	66,93	64,94	65,70	66,90
19	Kota. Bandung	69,27	69,37	70,03	67,49	68,20	69,30
20	Kota. Cirebon	65,02	65,73	67,10	66,40	67,10	67,80
21	Kota. Bekasi	-	-	-	-	66,60	67,60
22	Kota. Depok *)	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat		56.18	56.49	57.95	58.15	61.82	64.73

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1995-2000

BAB VIII PERUMAHAN

8.1. Gambaran Umum

Rumah selain berfungsi sebagai tempat tidur, juga sebagai tempat berlindung dari segala cuaca dan ancaman bahaya, tempat membina keluarga, dan bahkan belakangan ini fungsi rumah telah bergeser menjadi tempat menanam investasi bagi mereka yang mempunyai harta lebih dan ingin menyimpan hartanya dalam bentuk properti. Terlepas dari itu, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang harus dipenuhi.

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan rumahtangga, kebutuhan akan rumah tinggal pun semakin meningkat. Jumlah rumahtangga di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari 8.988.912 rumahtangga (hasil Susenas 1999) menjadi 9.435.230 rumahtangga (hasil Susenas 2000), berarti terjadi penambahan sebanyak 446.318 rumahtangga. Jika diasumsikan setiap rumahtangga membutuhkan satu buah/unit rumah, dapat dibayangkan berapa unit sarana rumah yang harus disediakan oleh pemerintah. Sayangnya, pembangunan perumahan belum sebanding dengan pertambahan rumahtangga yang terjadi. Dalam bab ini akan dibahas beberapa aspek perumahan, seperti kondisi fisik bangunan (luas lantai, jenis atap dan jenis lantai) dan utilitas/fasilitas tempat tinggal (sumber penerangan, sumber air bersih dan jarak ke penampungan kotoran).

Tabel 8.1.1.
Jumlah Rumahtangga dan Laju Pertumbuhan Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat
menurut Kabupaten/Kota Periode 1999-2000

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumahtangga		Laju Pertumbuhan Rumahtangga
	1999	2000	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	1.088.672	1.127.740	3,59
02. Kab. Sukabumi	578.704	559.027	-3,40
03. Kab. Cianjur	509.536	529.258	3,87
04. Kab. Bandung	898.208	1.083.345	20,61
05. Kab. Garut	477.376	503.110	5,39
06. Kab. Tasikmalaya	535.200	559.030	4,45
07. Kab. Ciamis	503.840	480.811	-4,57
08. Kab. Kuningan	239.712	252.150	5,19
09. Kab. Cirebon	450.272	476.182	5,75
10. Kab. Majalengka	328.320	323.521	-1,46
11. Kab. Sumedang	271.872	286.454	5,36
12. Kab. Indramayu	436.928	445.034	1,86
13. Kab. Subang	386.016	390.320	1,11
14. Kab. Purwakarta	168.320	184.045	9,34
15. Kab. Karawang	448.640	488.985	8,99
16. Kab. Bekasi	404.208	433.011	7,13
17. Kota Bogor	159.072	176.061	10,68
18. Kota Sukabumi	61.072	65.156	6,69
19. Kota Bandung	632.320	591.682	-6,43
20. Kota Cirebon	61.248	66.400	8,41
21. Kota Bekasi	349.376	413.908	18,47
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	8.988.912	9.435.230	4,97

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1999 dan 2000

Sebelum menguraikan situasi fisik bangunan dan ketersediaan/akses terhadap utilitas dan fasilitas tempat tinggal, terlebih dahulu akan sedikit diuraikan kondisi umum kualitas perumahan di Jawa Barat. Kondisi umumnya dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari persentase rumahtangga yang rumahnya berlantai bukan tanah sebanyak 93,91 persen, rumahtangga yang menghuni rumah dengan atap bukan dedaunan sebanyak 99,64 persen dan rumahtangga yang menghuni rumah dengan dinding tembok sebanyak 71,54 persen (Tabel 8.1.2).

Tabel 8.1.2.
Kualitas Perumahan di Provinsi Jawa Barat Periode 1998-2000

Tahun	% Rumah dengan lantai bukan tanah	% Rumah dengan atap bukan dedaunan	% Rumah dengan dinding tembok
(1)	(2)	(3)	(4)
1998	93,12	99,26	68,19
1999	93,37	99,62	69,88
2000	93,91	99,64	71,54

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999, dan 2000

Tabel 8.1.2 menunjukkan kecenderungan (*trend*) kualitas perumahan di Jawa Barat pada periode 1998-2000. Secara keseluruhan, trend yang ada cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa secara kualitas, pembangunan perumahan di Jawa Barat mulai meningkat, hanya secara kuantitas pembangunan perumahan tersebut peningkatannya relatif lambat. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam hal memberikan subsidi bagi pembangunan perumahan untuk masyarakat Jawa Barat. Faktor lain yang turut mempengaruhi sulitnya pemberian subsidi pembangunan perumahan adalah harga tanah yang semakin tinggi, yang otomatis menyebabkan harga rumah juga tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat yang sejak krisis melanda negara kita pada pertengahan tahun 1997 sangat menyedihkan. Ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari juga ikut melambung. Kenyataan yang ada: jangankan untuk membeli rumah, untuk makan sehari-hari saja sudah sulit.

8.2. Kondisi Fisik Bangunan

Gambaran kondisi fisik bangunan di Jawa Barat akan dilihat melalui indikator rata-rata luas lantai hunian, persentase rumahtangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, genteng dan beton, persentase rumahtangga yang menghuni rumah berdinding tembok dan kayu, dan persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah dan lainnya.

8.2.1. Rata-rata luas lantai hunian

Salah satu syarat rumah sehat menurut Departemen Kesehatan adalah luas lantai hunian, yaitu luas lantai hunian perkapita minimal 9 m². Bahkan ketentuan dari badan organisasi kesehatan dunia (*World Health's Organization - WHO*): luas lantai hunian perkapita minimal 10 m². Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2000, rata-rata luas lantai hunian di Jawa Barat adalah antara 20-49 m².

Tabel 8.2.1a.
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat
menurut Luas Lantai Hunian, Tahun 2000

Luas Lantai Hunian (m ²)	Persentase
(1)	(2)
< 20	3,67
20 - 49	46,22
50 - 99	40,44
100 - 149	7,20
150 +	2,47

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Tabel 8.2.1b
Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Hunian
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Hunian (m ²)				
	< 20	20-49	50-99	100-149	150+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Bogor	3,79	37,03	46,13	9,73	3,32
02. Kab. Sukabumi	2,65	62,32	32,72	1,62	0,70
03. Kab. Cianjur	2,94	51,37	40,96	2,97	1,75
04. Kab. Bandung	8,16	49,46	31,71	6,60	4,07
05. Kab. Garut	3,37	70,96	21,06	3,82	0,78
06. Kab. Tasikmalaya	4,06	57,65	29,37	7,17	1,76
07. Kab. Ciamis	1,35	47,31	45,30	5,39	0,65
08. Kab. Kuningan	0,27	18,93	72,74	6,24	1,82
09. Kab. Cirebon	0,42	30,43	55,44	11,26	2,45
10. Kab. Majalengka	2,13	46,69	47,53	2,83	0,82
11. Kab. Sumedang	2,45	59,46	28,70	5,65	3,74
12. Kab. Indramayu	1,90	49,03	44,35	3,27	1,46
13. Kab. Subang	1,08	52,78	43,22	2,49	0,43
14. Kab. Purwakarta	1,25	49,47	43,63	3,88	1,77
15. Kab. Karawang	1,94	55,20	34,39	6,16	2,31
16. Kab. Bekasi	0,24	39,03	52,45	7,47	0,82
17. Kota Bogor	2,44	25,93	48,58	17,47	5,58
18. Kota Sukabumi	1,87	42,28	33,64	12,82	9,39
19. Kota Bandung	14,31	34,67	34,50	11,75	4,77
20. Kota Cirebon	7,77	29,53	37,58	13,54	11,57
21. Kota Bekasi	0,27	27,61	48,95	19,83	3,34
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,67	46,22	40,44	7,20	2,47

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Dari sebanyak 9.435.230 rumahtangga menurut hasil Susenas 2000, rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai hunian antara 20-49 m² adalah sebanyak 4.360.878 rumahtangga atau 46,22 persen, dan sebanyak 3.815.656 rumahtangga (40,44 persen) menghuni rumah dengan luas lantai hunian antara 50-99 m². Rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai < 20 m² adalah sebanyak 346.149 rumahtangga (3,67 persen), dan sisanya adalah rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai hunian > 99 m².

Persentase rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai hunian < 20 m² ternyata paling banyak terdapat di Kota Bandung, yaitu sebesar 14,31 persen. Faktor penyebab utama tingginya persentase rumahtangga dengan luas lantai hunian < 20 m² ini sudah tentu tidak lepas dari faktor kemiskinan sebagian penduduk kota. Di samping itu, banyaknya perusahaan industri yang terdapat di wilayah ini, telah menarik banyak pendatang dari berbagai daerah, terutama perdesaan, yang datang ke kota ini dengan tujuan mengadu nasib. Akibatnya di sekitar wilayah industri tersebut banyak sekali dibangun tempat-tempat kos atau kontrakan-kontrakan pegawai pabrik dan rumah-rumah petak dengan lokasi yang sempit dan berdesak-desakan. Berbeda halnya dengan di wilayah Bogor dan Bekasi, yang juga terkenal sebagai wilayah industri, sebagian pemilik perusahaan industri tersebut telah memikirkan tempat tinggal karyawannya dengan cara mendirikan asrama.

8.2.2. Persentase rumahtangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, genteng dan beton

Tabel 8.2.2a menunjukkan sebagian besar rumahtangga di Jawa Barat menghuni rumah dengan atap genteng, yaitu sebanyak 8.977.526 rumahtangga atau sebesar 95,15 persen. Jenis atap kedua yang banyak digunakan oleh rumahtangga di Jawa Barat adalah beton (1,94 persen). Sedangkan untuk rumahtangga yang menghuni rumah dengan atap seng dan asbes masing-masing sebesar 0,55 persen dan 1,65 persen.

Tabel 8.2.2a.
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat
menurut Jenis Atap Terluas, Tahun 2000

Jenis Atap Terluas	Persentase
(1)	(2)
Beton	1,94
Genteng	95,15
Seng	0,55
Asbes	1,65
Sirap	0,23
Ijuk	0,13
Daun-daunan	0,34
Lainnya	0,02

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Sebagian besar rumahtangga di Jawa Barat menghuni rumah dengan atap dari genteng. Untuk seluruh kabupaten/kota menunjukkan persentase yang tinggi yaitu sekitar 90 persen. Kecuali di Kabupaten Bogor yang hanya mencapai 80 persen. Angka ini menggembirakan karena sebagian besar rumahtangga di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat telah tinggal/menempati rumah dengan atap yang baik. Hanya sebagian kecil saja rumahtangga yang tinggal di rumah dengan atap selain genteng.

Tabel 8.2.2b
Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas							
	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Sirap	Ijuk	Daun2an	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Kab. Bogor	3,92	84,22	1,43	9,37	0,27	0,09	0,60	0,09
02. Kab. Sukabumi	0,71	96,54	0,12	1,47	0,70	0,23	0,23	-
03. Kab. Cianjur	1,29	98,09	-	-	0,16	0,36	-	0,10
04. Kab. Bandung	1,20	96,66	2,02	0,12	-	-	-	-
05. Kab. Garut	2,25	97,15	0,30	-	0,20	0,10	-	-
06. Kab. Tasikmalaya	0,50	96,50	-	-	0,12	0,46	2,42	-
07. Kab. Ciamis	0,50	96,51	0,40	-	0,50	0,30	1,80	-
08. Kab. Kuningan	1,45	98,13	0,13	0,15	0,15	-	-	-
09. Kab. Cirebon	0,34	99,32	-	0,08	0,17	-	-	0,08
10. Kab. Majalengka	1,86	97,58	-	-	0,23	0,22	0,11	-
11. Kab. Sumedang	1,06	98,70	-	-	0,24	-	-	-
12. Kab. Indramayu	2,29	96,78	0,13	0,40	0,14	0,13	0,14	-
13. Kab. Subang	0,76	99,13	-	-	0,11	-	-	-
14. Kab. Purwakarta	1,90	97,22	-	0,73	0,16	-	-	-
15. Kab. Karawang	1,66	95,61	0,71	1,69	0,23	0,10	-	-
16. Kab. Bekasi	2,57	94,74	-	2,34	0,24	0,12	-	-
17. Kota Bogor	5,40	91,46	0,35	1,39	1,22	0,17	-	-
18. Kota Sukabumi	1,44	97,92	-	0,41	0,23	-	-	-
19. Kota Bandung	3,15	95,23	0,51	0,60	0,26	0,17	0,09	-
20. Kota Cirebon	3,14	91,93	0,82	3,94	0,17	-	-	-
21. Kota Bekasi	4,06	93,51	0,27	2,16	-	-	-	-
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,94	95,15	0,55	1,65	0,23	0,13	0,34	0,02

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Tabel 8.2.2b memperlihatkan persentase rumah tangga yang menghuni rumah dengan jenis atap beton, genteng, seng dan asbes cenderung meningkat pada periode 1999-2000. Hal ini menunjukkan kesanggupan dan kesadaran masyarakat Jawa Barat akan pentingnya memiliki rumah dengan atap yang baik dan aman.

Tabel 8.2.2c
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Atap
Periode 1999-2000

Tahun	Beton	Genteng	Seng	Asbes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999	1,70	94,90	0,25	2,39
2000	1,94	95,15	0,55	1,65

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1999 dan 2000

8.2.3. Persentase rumahtangga yang menghuni rumah berdinding tembok dan kayu

Rumahtangga yang menghuni rumah berdinding tembok dan kayu di Jawa Barat, menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000, masing-masing sebesar 71,54 persen dan 4,22 persen. Sisanya, yaitu rumahtangga yang menghuni rumah berdinding selain tembok dan kayu yaitu rumah berdinding bambu dan lainnya, masing-masing sebesar 23,74 persen dan 0,50 persen.

Tabel 8.2.3a.
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Dinding Terluas
Tahun 2000

Jenis Dinding Terluas	Persentase
(1)	(2)
Tembok	71,54
Kayu	4,22
Bambu	23,74
Lainnya	0,50

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, ternyata persentasenya cukup bervariasi. Untuk rumahtangga yang menghuni rumah berdinding tembok menunjukkan kecenderungan meningkat. Dinding kayu persentasenya berfluktuasi, periode 1998-1999 menurun sedangkan periode berikutnya yaitu 1999-2000 meningkat. Untuk rumah berdinding bambu persentasenya cenderung menurun, sedangkan rumah berdinding lainnya juga menunjukkan persentase yang fluktuatif. Jika dikaitkan dengan salah satu persyaratan rumah sehat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu dinding harus terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang serta dapat menahan angin, maka kualitas perumahan di Jawa Barat ditinjau dari indikator jenis dinding terluas sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan rumah sehat dan layak huni.

Tabel 8.2.3b
Persentase Rumah tangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Dinding Terluas
Periode 1998-2000

Tahun	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998	68,19	4,48	26,96	0,38
1999	69,87	3,95	25,81	0,37
2000	71,54	4,22	23,74	0,50

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999 dan 2000

Tabel 8.2.3c.
Persentase Rumah tangga di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Dinding Terluas Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kab. Bogor	83,90	3,27	12,65	0,18
02. Kab. Sukabumi	51,02	8,57	40,11	0,30
03. Kab. Cianjur	37,89	4,22	57,73	0,16
04. Kab. Bandung	68,20	5,72	25,13	0,95
05. Kab. Garut	52,45	8,22	39,23	0,10
06. Kab. Tasikmalaya	62,53	4,58	32,58	0,31
07. Kab. Ciamis	59,23	2,59	37,98	0,20
08. Kab. Kuningan	86,68	2,26	10,77	0,29
09. Kab. Cirebon	89,82	0,93	8,82	0,42
10. Kab. Majalengka	80,53	2,90	16,12	0,45
11. Kab. Sumedang	64,48	4,31	31,21	-
12. Kab. Indramayu	86,15	1,76	11,55	0,54
13. Kab. Subang	64,62	2,80	31,39	1,19
14. Kab. Purwakarta	68,90	4,04	26,90	0,16
15. Kab. Karawang	64,17	3,67	31,40	0,76
16. Kab. Bekasi	70,76	4,91	23,87	0,46
17. Kota Bogor	96,26	1,24	1,11	1,39
18. Kota Sukabumi	70,09	7,30	22,21	0,41
19. Kota Bandung	90,03	6,05	3,07	0,85
20. Kota Cirebon	90,92	2,80	5,95	0,33
21. Kota Bekasi	96,39	1,89	0,81	0,90
22. Kota Depok *)	-	-	-	-
Jawa Barat	71,54	4,22	23,74	0,50

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Di daerah kota hampir 90 persen rumah tangga menghuni rumah berdinding tembok, seperti di Kota Bogor (96,26 persen), Kota Bandung (90,03 persen), Kota Cirebon (90,92 persen), dan Kota Bekasi (96,39 persen). Hal ini wajar terjadi mengingat masyarakat di perkotaan cenderung lebih maju dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, sehingga

kesadaran untuk hidup sehat dan memiliki rumah layak huni lebih baik. Tidak berarti bahwa di kabupaten/kota lain, terutama perdesaan, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat kurang tumbuh, namun kemungkinan kemampuan serta daya beli mereka untuk memiliki rumah sehat dan layak huni belum memadai di samping faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi, misalnya sulitnya akses untuk memperoleh fasilitas rumah sehat ataupun juga kurangnya informasi yang mereka peroleh mengenai kriteria rumah sehat. Contohnya di Kabupaten Cianjur, di mana sebesar 57,73 persen rumahtangganya menghuni rumah dengan dinding bambu, sedangkan mereka yang menghuni rumah dengan dinding tembok hanya sebesar 37,89 persen.

8.2.4. Persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah dan lainnya

Rumahtangga di Jawa Barat yang menghuni rumah berlantai tanah dan lainnya masing-masing sebesar 6,04 persen dan 0,05 persen. Modus rumahtangga di Jawa Barat menghuni rumah dengan lantai yang terbuat dari ubin/tegel, yaitu sebesar 31,07 persen. Jenis lantai berikutnya yang dipilih oleh rumahtangga Jawa Barat adalah plester/semen, sebesar 26,41 persen.

Tabel 8.2.4a
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat
menurut Jenis Lantai Terluas Tahun 2000

Jenis Lantai Terluas	Persentase
(1)	(2)
Marmer/Keramik	21,88
Ubin/Tegel	31,07
Plester/Semen	26,41
Kayu/Papan	10,15
Bambu	4,39
Tanah	6,04
Lainnya	0,05

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah dan lainnya di Jawa Barat pada periode 1998-2000 cenderung menurun, walaupun penurunannya terjadi sangat perlahan. Bahkan untuk jenis lantai lainnya tidak mengalami perubahan pada periode 1998-1999. Sekali lagi, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat yang dimulai dari lingkungan rumah sudah tinggi.

Tabel 8.2.4b
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Jenis Lantai Terluas
Periode 1998-2000

Tahun	Marmer/ Keramik	Ubin/ Tegel	Plester/ Semen	Kayu/ Papan	Bambu	Tanah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1998	16,93	35,96	23,04	11,23	5,98	6,79	0,07
1999	19,51	31,23	26,04	11,08	5,51	6,56	0,07
2000	21,88	31,07	26,41	10,15	4,39	6,04	0,05

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999, dan 2000

Tabel 8.2.4c
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Marmer/ Keramik	Ubin/ Tegel	Plester/ Semen	Kayu/ Papan	Bambu	Tanah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Kab. Bogor	28,80	30,66	30,65	2,57	3,83	3,49	-
02. Kab. Sukabumi	11,13	12,96	43,85	6,71	23,47	1,88	-
03. Kab. Cianjur	13,53	7,82	28,41	39,82	10,12	0,20	0,10
04. Kab. Bandung	22,17	26,99	25,15	21,05	3,57	1,08	-
05. Kab. Garut	15,10	25,51	17,57	35,59	5,94	0,30	-
06. Kab. Tasikmalaya	16,96	29,06	26,49	19,43	7,17	0,79	0,10
07. Kab. Ciamis	15,84	41,69	21,93	15,14	0,30	5,09	-
08. Kab. Kuningan	19,57	51,88	24,79	-	-	3,76	-
09. Kab. Cirebon	14,81	46,64	25,82	0,17	0,08	12,31	0,17
10. Kab. Majalengka	16,18	45,87	29,16	1,71	3,07	3,92	0,10
11. Kab. Sumedang	18,83	25,12	31,05	12,36	11,81	0,60	0,23
12. Kab. Indramayu	18,44	35,89	25,71	0,07	0,27	19,62	-
13. Kab. Subang	12,48	38,85	31,09	2,70	2,27	12,50	0,11
14. Kab. Purwakarta	17,69	44,18	17,77	12,63	5,35	2,37	-
15. Kab. Karawang	16,88	31,88	22,94	0,10	0,79	27,30	0,12
16. Kab. Bekasi	22,52	29,79	20,77	-	1,06	25,86	-
17. Kota Bogor	37,48	30,80	30,44	0,36	0,21	0,54	0,17
18. Kota Sukabumi	26,73	20,50	46,76	2,83	3,17	-	-
19. Kota Bandung	35,77	38,84	22,83	2,13	0,26	0,09	0,09
20. Kota Cirebon	29,21	49,35	19,29	0,17	-	1,98	-
21. Kota Bekasi	56,81	26,06	15,69	-	-	1,44	-
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	21,88	31,07	26,41	10,15	4,39	6,04	0,05

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Jika kita tinjau kembali kriteria rumah sehat dari Departemen Kesehatan bahwa "lantai harus kering/tidak lembab, oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau lur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung/tingkat)," maka dapat dikatakan bahwa syarat rumah sehat tersebut sudah dapat dipenuhi oleh sebagian besar rumahtangga di Jawa Barat. Hanya saja yang menarik adalah banyaknya rumahtangga di Kabupaten Karawang dan Bekasi yang masih berlantai tanah, masing-masing 27,3 persen dan 25,9 persen. Perlu kajian lebih lanjut hingga wilayah administrasi yang lebih kecil, misalnya kecamatan, mengapa di Kabupaten Bekasi persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai tanah ini cukup tinggi.

8.3. Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal

Analisis mengenai hal ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator berikut: persentase rumahtangga yang menggunakan listrik PLN, persentase rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri, persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih (misalnya ledeng, air dalam kemasan, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung) dan persentase rumahtangga yang menggunakan air minum tanah yang jarak sumber air minum tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≤ 10 m.

8.3.1. Rumahtangga yang menggunakan listrik

Tingkat kesejahteraan rumahtangga di suatu daerah, salah satunya, ditunjukkan oleh proporsi atau persentase rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik. Indikator ini juga dapat memperlihatkan tingkat keterjangkauan pelayanan penerangan di daerah tersebut, terutama jika dipilih antara listrik PLN dan non PLN. Menurut data pada Tabel 8.3.1a, persentase rumahtangga di Jawa Barat yang menggunakan listrik PLN dan non PLN dari periode ke periode menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan listrik telah menjangkau lebih dari 90 persen rumahtangga di Jawa Barat sejak periode 1998 sampai dengan 2000, dengan digalakkannya program listrik masuk desa.

Tabel 8.3.1a
Persentase Rumahtangga di Provinsi Jawa Barat yang Menggunakan Listrik
(PLN dan NonPLN) Periode 1998-2000

Tahun	Persentase
(1)	(2)
1998	91,87
1999	94,14
2000	95,02

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999, dan 2000

Sumber penerangan listrik, terutama PLN, paling banyak digunakan di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Persentase rumahtangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Jawa Barat mencapai 93,89 persen. Sedangkan yang non PLN hanya 1,14 persen. Sisanya, masing-masing 1,10 persen rumahtangga dengan penerangan petromak/aladin, 3,61 persen rumahtangga menggunakan penerangan pelita/sentir/obor, dan 0,27 persen adalah rumahtangga dengan sumber penerangan lainnya.

Tabel 8.3.1b
Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Listrik		Petromak/ Aladin	Pelita/Sentir/ Obor	Lainnya
	PLN	Non PLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Bogor	93,00	0,38	2,19	3,78	0,65
02. Kab. Sukabumi	86,40	1,00	1,20	10,93	0,47
03. Kab. Cianjur	77,25	5,80	2,13	14,82	-
04. Kab. Bandung	95,83	1,43	0,72	2,02	-
05. Kab. Garut	91,76	3,46	2,13	2,65	-
06. Kab. Tasikmalaya	90,92	1,60	1,15	6,10	0,23
07. Kab. Ciamis	94,61	0,60	0,20	4,59	-
08. Kab. Kuningan	95,42	1,58	1,89	1,11	-
09. Kab. Cirebon	97,04	0,51	1,02	0,68	0,76
10. Kab. Majalengka	96,11	0,77	0,66	2,12	0,33
11. Kab. Sumedang	96,55	0,94	0,84	1,56	0,12
12. Kab. Indramayu	96,61	-	1,02	1,96	0,41
13. Kab. Subang	96,86	0,21	0,43	2,49	-
14. Kab. Purwakarta	92,23	0,31	1,33	5,97	0,16
15. Kab. Karawang	95,02	1,02	0,99	1,71	1,25
16. Kab. Bekasi	97,78	0,58	-	1,52	0,12
17. Kota Bogor	98,43	0,17	1,05	0,35	-
18. Kota Sukabumi	99,75	-	0,25	-	-
19. Kota Bandung	98,72	0,17	0,85	0,17	0,09
20. Kota Cirebon	99,18	0,33	-	0,49	-
21. Kota Bekasi	99,19	-	-	0,81	-
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-
Jawa Barat	93,89	1,14	1,10	3,61	0,27

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Persentase rumahtangga di Jawa Barat yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN kurang dari 90 persen hanya terdapat di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Di kedua kabupaten ini sumber penerangan dengan listrik PLN masing-masing sebesar 86,40 persen dan 77,25 persen. Umumnya masyarakatnya masih menggunakan pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan rumah, yaitu masing-masing sebesar 10,93 persen dan 14,82 persen. Kemungkinan program listrik masuk desa belum menjangkau seluruh wilayah di kedua kabupaten ini.

8.3.2. Rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri

Secara umum tingkat kesejahteraan rumahtangga cenderung dikatakan semakin baik jika proporsi atau persentase rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri semakin besar. Perbandingan proporsi rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri di

Jawa Barat pada periode 1998-2000 menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada periode 1999-2000 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, meningkat sebesar 4,05 poin bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya meningkat 0,49 poin.

Tabel 8.3.2a
Persentase Rumahtangga yang Mempunyai Fasilitas Air Minum Sendiri
di Provinsi Jawa Barat Periode 1998, 1999 dan 2000

Tahun	Persentase
(1)	(2)
1998	54,74
1999	55,23
2000	59,28

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999 dan 2000

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, ternyata masih banyak rumahtangga yang tidak mempunyai fasilitas air minum. Persentase tertinggi menurut hasil Susenas 2000 untuk rumahtangga yang tidak mempunyai fasilitas air minum terdapat di Kabupaten Indramayu, yaitu mencapai 14,77 persen. Kabupaten ini agak "tertinggal" dalam hal memahami arti pentingnya hidup sehat. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan tingkat pendidikan di kabupaten ini yang cenderung rendah. Begitu pula bila dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) dan komponennya di kabupaten ini, ternyata Kabupaten Indramayu menempati posisi ke-26 dengan angka IPM sebesar 56,5, terendah se-Propinsi Jawa Barat dan Banten (BPS Jawa Barat dan Bapeda Jawa Barat, 2001: Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia).

Tabel 8.3.2b
Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Air Minum
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kab. Bogor	72,52	13,82	12,31	1,34
02. Kab. Sukabumi	48,35	20,22	28,49	2,94
03. Kab. Cianjur	46,58	27,03	25,38	1,02
04. Kab. Bandung	58,30	27,61	13,12	0,96
05. Kab. Garut	42,43	31,39	24,63	1,55
06. Kab. Tasikmalaya	49,69	24,60	25,15	0,56
07. Kab. Ciamis	53,25	24,66	20,29	1,80
08. Kab. Kuningan	64,47	26,38	6,99	2,16
09. Kab. Cirebon	59,40	24,98	12,73	2,88
10. Kab. Majalengka	54,29	29,04	15,78	0,89
11. Kab. Sumedang	57,73	18,82	22,15	1,29
12. Kab. Indramayu	47,71	25,02	12,50	14,77
13. Kab. Subang	63,66	21,46	9,25	5,63
14. Kab. Purwakarta	67,06	20,00	11,63	1,31
15. Kab. Karawang	48,06	35,22	13,57	3,15
16. Kab. Bekasi	66,89	24,78	5,74	2,58
17. Kota Bogor	85,17	8,73	4,71	1,39
18. Kota Sukabumi	73,43	12,06	13,44	1,07
19. Kota Bandung	67,04	21,98	5,96	5,03
20. Kota Cirebon	72,76	20,15	4,44	2,64
21. Kota Bekasi	82,51	6,67	4,06	6,76
22. Kota Depok *)	-	-	-	-
Jawa Barat	59,28	22,94	14,90	2,88

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

8.3.3. Rumahtangga yang menggunakan air bersih

Proporsi atau persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih merupakan indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kondisi kesehatan rumahtangga di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan air bersih di sini adalah air dalam kemasan, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung.

Tabel 8.3.3a
Persentase Rumahtangga yang Menggunakan Air Bersih di Provinsi Jawa Barat
Periode 1998-2000

Tahun	Persentase
(1)	(2)
1998	81,87
1999	80,05
2000	80,93

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999 dan 2000

Pada periode 1998-2000, menurut hasil Susenas, proporsi rumahtangga yang menggunakan air bersih di Jawa Barat menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada periode 1998-1999 persentasenya cenderung menurun, sedangkan pada periode 1999-2000 persentasenya cenderung meningkat walaupun secara perlahan. Kemungkinan penyebabnya adalah karena harga air bersih, terutama di perkotaan, semakin mahal. Apalagi harga air dalam kemasan cenderung meningkat. Selain itu juga kemungkinan semakin berkurangnya sarana air bersih yang tersedia, misalnya di perkotaan, untuk sarana air bersih yang berasal dari ledeng sudah semakin sulit diperoleh. Seringkali kucuran air ledeng tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena "mampet" atau sama sekali tidak mengalir, sehingga masyarakat cenderung beralih ke sumber air bersih lainnya, misalnya pompa. Untuk pompa pun tidak semudah dibayangkan. Kadang-kadang sumber air tanah yang disedot oleh pompa ini kering. Hal ini turut mempengaruhi penggunaan air bersih lainnya.

Tabel 8.3.3b.
Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Air Bersih	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kab. Bogor	79,35	18,51	1,88	-	-	0,27
02. Kab. Sukabumi	71,85	15,71	9,27	3,04	-	0,12
03. Kab. Cianjur	62,53	14,67	22,39	0,30	-	0,10
04. Kab. Bandung	86,39	10,39	2,50	0,12	0,24	0,36
05. Kab. Garut	69,30	16,51	12,68	1,41	-	0,10
06. Kab. Tasikmalaya	58,53	23,05	18,11	0,21	-	0,10
07. Kab. Ciamis	70,04	18,54	10,22	1,10	0,10	-
08. Kab. Kuningan	84,65	8,75	5,60	-	-	1,00
09. Kab. Cirebon	89,77	10,06	0,17	-	-	-
10. Kab. Majalengka	86,39	11,68	1,93	-	-	-
11. Kab. Sumedang	74,91	10,24	14,85	-	-	-
12. Kab. Indramayu	87,94	4,83	0,14	3,78	2,78	0,54
13. Kab. Subang	86,17	6,91	4,95	0,22	-	1,76
14. Kab. Purwakarta	66,46	25,71	5,95	1,88	-	-
15. Kab. Karawang	91,46	6,81	-	-	1,73	-
16. Kab. Bekasi	84,04	15,49	-	-	-	0,46
17. Kota Bogor	95,53	2,38	1,92	-	-	0,17
18. Kota Sukabumi	94,47	3,68	1,24	-	-	0,61
19. Kota Bandung	97,10	2,47	-	-	0,09	0,34
20. Kota Cirebon	99,17	0,33	-	-	-	0,50
21. Kota Bekasi	95,04	4,69	-	-	-	0,27
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	80,93	12,31	5,63	0,58	0,26	0,29

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Walaupun secara keseluruhan rumahtangga di Jawa Barat sudah banyak yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minumannya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada rumahtangga yang menggunakan sumber air minum selain air bersih,

misalnya sumber air minum dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya.

Sumber air minum yang kurang memenuhi syarat higienis di antara semua sumber air minum tersebut adalah air sungai karena tingginya tingkat pencemaran bagi air sungai ini. Selain itu air sungai juga tidak hanya digunakan untuk minum, tetapi juga kegiatan rumahtangga lainnya seperti mencuci, mandi, buang air kecil atau air besar, dan sebagainya. Kabupaten Indramayu merupakan yang tertinggi persentasenya dalam hal penggunaan air sungai sebagai sumber air minum sehari-hari, yaitu sebesar 3,78 persen di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

8.3.4. Rumahtangga yang menggunakan air minum tanah

Fokus analisis dalam topik ini adalah rumahtangga yang menggunakan sumber air minum dari sumber dalam tanah yang jarak sumber air minum tersebut ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama dengan 10 meter. Sebagaimana diketahui jika jarak sumber air minum dari dalam tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama dengan 10m maka tingkat higienitas air minum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada periode 1998-2000 persentasenya cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat Jawa Barat cenderung memiliki sumber air minum relatif lebih sehat.

Tabel 8.3.4a
Persentase Rumahtangga yang Menggunakan Air Minum Tanah
Dan Jarak Ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat \leq 10 m
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Tahun	Persentase
(1)	(2)
1998	48,31
1999	47,74
2000	32,27

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998, 1999 dan 2000

Tabel 8.3.3b menunjukkan bahwa ternyata Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mempunyai proporsi atau persentase paling kecil untuk rumahtangga yang menggunakan air minum dari dalam tanah yang sumbernya ke jarak penampungan kotoran/tinja terdekat \leq 10 meter, yaitu masing-masing sebesar 18,50 persen, 6,73 persen, 10,45 persen dan 4,98 persen. Walaupun demikian, masih banyak rumahtangga yang menjawab "tidak tahu" berapa meter jarak sumber air minum tanah yang dipergunakan ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat. Bisa saja di antara mereka yang menjawab "tidak tahu" ini beberapa di antaranya atau malah sebagian besar adalah rumahtangga yang menggunakan air minum tanah yang jarak sumber air minum tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama dengan 10 meter. Kita belum dapat menarik kesimpulan yang pasti.

Tabel 8.3.4b.
Persentase Rumahtangga Pengguna Air Minum Tanah menurut Kabupaten/Kota
dan Jarak Ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	≤ 10 m	> 10 m	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	43,18	12,71	44,11
02. Kab. Sukabumi	32,02	25,79	42,19
03. Kab. Cianjur	35,23	17,38	47,39
04. Kab. Bandung	32,09	25,59	42,31
05. Kab. Garut	48,95	24,28	26,76
06. Kab. Tasikmalaya	32,84	23,98	43,18
07. Kab. Ciamis	37,71	34,39	27,91
08. Kab. Kuningan	46,97	20,74	32,30
09. Kab. Cirebon	34,62	24,17	41,21
10. Kab. Majalengka	32,94	24,55	42,51
11. Kab. Sumedang	37,23	21,28	41,49
12. Kab. Indramayu	18,50	7,23	74,28
13. Kab. Subang	26,92	16,41	56,66
14. Kab. Purwakarta	54,85	25,04	20,11
15. Kab. Karawang	6,73	6,85	86,41
16. Kab. Bekasi	10,45	6,62	82,94
17. Kota Bogor	70,25	5,40	24,35
18. Kota Sukabumi	18,17	11,70	70,13
19. Kota Bandung	32,27	11,20	56,52
20. Kota Cirebon	69,82	10,87	19,31
21. Kota Bekasi	4,98	4,66	90,37
22. Kota Depok	-	-	-
Jawa Barat	32,27	18,47	49,26

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

BAB IX KETENAGAKERJAAN

Daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja dapat digambarkan melalui indikator ketenagakerjaan. Jika perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial. Indikator tenaga kerja selain dapat menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut wilayah dan sektor, yang tentunya berguna bagi para investor untuk menyusun strategi investasi dan bagi pemerintah daerah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

9.1 Komposisi Penduduk Usia Kerja

Batasan usia kerja yang dipakai BPS dalam setiap survei/sensus adalah 10 tahun ke atas. Batasan ini tidak sesuai dengan batasan yang dipakai oleh lembaga internasional (ILO) yaitu 15 tahun. Oleh karenanya dalam penulisan profil kependudukan hasil survei kependudukan tahun 2000 digunakan batasan usia kerja 15 tahun, sehingga datanya tidak dapat dibandingkan dengan

Tabel 9.1.1:
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Total
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus rt	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kab. Bogor	47,83	5,99	9,08	27,57	9,54	100,00
02. Kab. Sukabumi	55,07	3,59	4,59	30,34	6,41	100,00
03. Kab. Cianjur	61,59	2,68	4,78	26,42	4,52	100,00
04. Kab. Bandung	50,83	5,33	7,95	28,03	7,86	100,00
05. Kab. Garut	48,46	4,89	6,30	29,58	10,77	100,00
06. Kab. Tasikmalaya	56,86	3,52	4,69	25,75	9,18	100,00
07. Kab. Ciamis	61,66	3,29	5,56	22,37	7,11	100,00
08. Kab. Kuningan	54,44	3,50	7,32	26,62	8,11	100,00
09. Kab. Cirebon	55,14	3,06	7,35	28,58	5,87	100,00
10. Kab. Majalengka	60,59	2,04	5,31	26,48	5,58	100,00
11. Kab. Sumedang	52,13	4,31	5,70	27,68	10,19	100,00
12. Kab. Indramayu	54,25	5,59	5,43	27,04	7,69	100,00
13. Kab. Subang	54,30	4,14	5,36	28,37	7,83	100,00
14. Kab. Purwakarta	51,20	5,57	6,02	29,27	7,95	100,00
15. Kab. Karawang	47,33	6,32	8,19	32,33	5,82	100,00
16. Kab. Bekasi	48,35	2,78	10,68	31,58	6,61	100,00
17. Kota Bogor	46,45	6,47	13,10	27,64	6,35	100,00
18. Kota Sukabumi	40,86	7,44	7,29	32,92	11,49	100,00
19. Kota Bandung	46,10	5,59	15,54	29,54	3,23	100,00
20. Kota Cirebon	48,50	6,04	10,54	29,68	5,24	100,00
21. Kota Bekasi	48,99	5,53	7,84	29,86	7,78	100,00
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	52,09	4,62	7,65	28,22	7,41	100,00

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Bab IX. Ketenagakerjaan

keadaan sebelumnya karena keterbatasan waktu untuk melakukan pengolahan ulang data periode sebelumnya. Namun, khusus untuk analisis pekerja menurut jam kerja, pekerja menurut lapangan usaha, dan pekerja menurut status pekerjaan, agar dapat dilihat kecenderungan atau pergeserannya antar periode maka data ketenagakerjaan hasil survei kependudukan SP2000 menyesuaikan dengan keadaan data periode sebelumnya, yaitu mengambil batasan usia pekerja 10 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tabel 9.1.1 menunjukkan persentase angkatan kerja dan bukan angkatan kerja penduduk di Jawa Barat usia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota berdasarkan hasil survei kependudukan tahun 2000.

Persentase penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dan mempunyai kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu (berdasarkan referensi waktu survei) lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur perekonomian antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan, di mana kegiatan ekonomi di perdesaan lebih bersifat informal sedangkan di perkotaan sifatnya lebih ke arah formal. Sehingga kegiatan memasuki pasar kerja akan lebih mudah terjadi di perdesaan, tanpa harus memenuhi syarat kualitas yang tinggi.

Tabel 9.1.2
Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Perkotaan/Perdesaan	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus rt	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	48,40	5,68	10,56	28,42	6,94	100,00
Perdesaan	55,92	3,52	4,64	28,02	7,90	100,00
K + D	52,09	4,62	7,65	28,22	7,41	100,00

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

9.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 9.2.1 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang dibedakan menurut jenis kelamin. TPAK dihitung dengan cara membandingkan penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, dalam analisis ini digunakan usia 15 tahun ke atas. TPAK ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial dan ekonomi antara lain faktor umur, status perkawinan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, hal ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. TPAK perempuan masih senantiasa lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari faktor sosial-budaya, di mana seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga, dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah bagi keluarga. Kewajiban mencari nafkah atau bekerja bagi laki-laki ini sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak dulu, bahkan sejak jaman nenek moyang kita. Kewajiban perempuan adalah mengurus anak-anak dan rumahtangga. Kontribusi kaum perempuan terhadap dunia kerja memang masih kurang.

Tabel 9.2.1.
TPAK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	76,49	30,79	53,82
02. Kab. Sukabumi	85,69	30,25	58,66
03. Kab. Cianjur	86,38	41,02	64,28
04. Kab. Bandung	78,33	34,65	56,16
05. Kab. Garut	77,27	29,04	53,35
06. Kab. Tasikmalaya	80,00	40,80	60,38
07. Kab. Ciamis	84,06	46,44	64,95
08. Kab. Kuningan	77,45	38,69	57,95
09. Kab. Cirebon	81,78	34,72	58,20
10. Kab. Majalengka	81,55	44,27	62,63
11. Kab. Sumedang	77,81	35,66	56,44
12. Kab. Indramayu	78,62	40,45	59,83
13. Kab. Subang	81,18	36,28	58,44
14. Kab. Purwakarta	81,42	31,96	56,76
15. Kab. Karawang	80,65	26,74	53,65
16. Kab. Bekasi	77,53	25,08	51,13
17. Kota Bogor	75,71	29,83	52,92
18. Kota Sukabumi	72,69	24,60	48,30
19. Kota Bandung	69,84	32,39	51,69
20. Kota Cirebon	77,00	33,97	54,54
21. Kota Bekasi	80,94	26,97	54,52
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	79,21	34,09	56,71

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

TPAK perempuan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Angka TPAK perempuan di perdesaan adalah sekitar 40 persen (misalnya Kabupaten Cianjur), sedangkan di perkotaan hanya sekitar 20-30 persen (hampir seluruh kota di Jawa Barat). Rendahnya partisipasi perempuan perkotaan di dalam angkatan kerja tidak hanya disebabkan oleh masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor non pertanian, tetapi juga karena sifat dari pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan perempuan meninggalkan rumah. Keadaan yang demikian sering menimbulkan konflik antara tugas perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga di satu pihak, dengan tugasnya sebagai pekerja di lain pihak. Sebaliknya di perdesaan umumnya perempuan bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja tidak dibayar, atau lebih terkenal dengan istilah "pekerja keluarga", dan mereka tidak perlu bekerja di luar lingkungan keluarga ataupun di dalam lingkungan yang asing bagi mereka. Sehingga tugas rumah tangga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka.

9.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang berusaha mendapatkan atau mencari pekerjaan, serta bersedia menerima pekerjaan. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat berdasarkan hasil survei kependudukan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 8.4 berikut.

Tabel 9.3.1a
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat
menurut Jenis Kelamin Tahun 2000

Jenis Kelamin	TPT
(1)	(2)
Laki-laki (L)	7,54
Perempuan (P)	9,57
L + P	8,15

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Dari Tabel 9.3.1a terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 9,57 persen dan 7,54 persen. Gejala ini menunjukkan keinginan perempuan untuk bekerja di luar rumah semakin tinggi, atau angkatan kerja perempuan sedang berada pada posisi transisi yaitu dari status pekerja keluarga menjadi pekerja umum dengan tujuan untuk memperoleh upah. Faktor lain penyebab tingginya TPT perempuan dibandingkan TPT laki-laki adalah karena kesempatan kerja bagi laki-laki lebih luas dibandingkan untuk perempuan.

Sayang sekali data tenaga kerja hasil survei kependudukan tahun 2000 ini tidak dapat dibandingkan dengan data periode sebelumnya, karena adanya perubahan batasan usia kerja dari 10 tahun ke atas menjadi 15 tahun ke atas. Namun demikian dibandingkan keadaan tahun-tahun sebelumnya, nampaknya TPT periode 2000 ini di seluruh kabupaten/kota mengalami perubahan. Beberapa kabupaten/kota mengalami kenaikan, dan beberapa lainnya mengalami penurunan. Penurunan angka TPT diduga karena adanya peralihan sektor pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal, misalnya banyak buruh/karyawan yang tadinya bekerja di sektor formal lalu terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka pun beralih pekerjaan ke sektor informal. Peralihan tersebut terlihat dengan maraknya bermunculan para pedagang kaki lima, menjamurnya tukang ojek, tukang becak, serta pekerjaan informal lainnya. Peningkatan TPT terjadi antara lain karena adanya PHK dan atau karena usahanya terhenti atau gulung tikar.

Sedangkan peningkatan TPT di beberapa kabupaten/kota, khususnya di daerah perdesaan, kemungkinan disebabkan oleh banyaknya penduduk kota yang "mudik." Karena di kota mereka rasakan sudah tidak mungkin lagi bekerja, sedangkan kesempatan kerja yang ada di perdesaan tidak begitu diminatinya karena sudah terbiasa bekerja di kota, akhirnya mereka hanya menanti kesempatan yang datang.

Tabel 9.3.1b.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	9,85	14,36	11,13
02. Kab. Sukabumi	5,77	7,17	6,12
03. Kab. Cianjur	4,54	3,35	4,17
04. Kab. Bandung	9,45	9,58	9,49
05. Kab. Garut	7,53	13,61	9,17
06. Kab. Tasikmalaya	6,27	4,96	5,82
07. Kab. Ciamis	4,57	5,94	5,07
08. Kab. Kuningan	5,13	7,85	6,05
09. Kab. Cirebon	4,82	6,30	5,26
10. Kab. Majalengka	3,19	3,39	3,26
11. Kab. Sumedang	8,55	5,70	7,64
12. Kab. Indramayu	9,20	9,62	9,34
13. Kab. Subang	5,64	10,24	7,09
14. Kab. Purwakarta	8,46	13,26	9,81
15. Kab. Karawang	10,48	15,68	11,78
16. Kab. Bekasi	3,87	10,26	5,44
17. Kota Bogor	11,43	14,27	12,23
18. Kota Sukabumi	15,34	15,58	15,40
19. Kota Bandung	9,80	13,14	10,82
20. Kota Cirebon	10,06	13,18	11,07
21. Kota Bekasi	8,55	15,15	10,15
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	7,54	9,57	8,15

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Gambaran di atas dapat ditafsirkan bahwa memperoleh pekerjaan saat ini semakin sulit, dan bisa dikatakan sebagai akibat dari adanya kekurangcocokkan kualifikasi dari para pencari kerja dengan kebutuhan yang ditawarkan atau memang penciptaan kesempatan kerja yang semakin kecil. Kekurangcocokkan kualifikasi dapat diatasi dengan menyesuaikan sistem pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk hal lainnya kemungkinan berkaitan dengan penanaman modal (investasi).

9.4 Setengah Pengangguran

Tingkat pengangguran akan lebih tinggi lagi jika angka setengah pengangguran (*under unemployment*) juga diperhitungkan. Ada beberapa definisi yang digunakan untuk konsep setengah pengangguran, antara lain setengah pengangguran karena jam kerja kurang, karena

Bab IX. Ketenagakerjaan

pendapatan rendah dan karena pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan (*mismatch*). Tetapi dalam pembahasan ini hanya akan digunakan definisi yang pertama, yaitu setengah pengangguran dengan jam kerja kurang. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya selama ini batasan (*cut off point*) jam kerja normal yang biasa digunakan adalah 35 jam per minggu.

Tabel 9.4.1a menunjukkan bahwa pada tahun 2000, penduduk Jawa Barat yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu mencapai 54,83 persen. Sementara pada tahun 1980 tingkat setengah pengangguran hanya 32,98 persen. Berarti tingkat setengah pengangguran cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat di masa krisis ini bukan saja sulit mendapatkan pekerjaan tetapi juga minimnya jam kerja untuk menambah penghasilan. Sehingga secara keseluruhan tingkat pengangguran dan setengah pengangguran meningkat menjadi 62,37 persen. Hal ini harus diwaspadai karena spektrum permasalahan pengangguran dan setengah pengangguran akan berkembang ke hal-hal yang lebih substansial sifatnya yang berakibat pada perubahan sikap dan perilaku kehidupan. Bukan mustahil kenyataan inilah yang telah memicu agresi massa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Tabel 9.4.1a :
Persentase Pekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 1980 dan 2000

Jenis Kelamin/Jam Kerja	Tahun	
	1980	2000
(1)	(2)	(3)
Laki-laki		
< 35 jam	32,98	54,83
35 Jam dan lebih	67,02	45,16
Total	100,00	100,00
Perempuan		
< 35 jam	57,82	67,09
35 Jam dan lebih	42,18	32,91
Total	100,00	100,00

Sumber: BPS, SP 1980 dan Hasil Pengolahan SP2000-M

Setengah pengangguran pada pekerja perempuan di Jawa Barat juga lebih tinggi daripada laki-laki masing-masing 67,09 persen dan 54,83 persen. Tingginya setengah pengangguran pada pekerja perempuan karena mereka cenderung bekerja di sektor informal sebagai pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar lainnya terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Angka setengah pengangguran ini mungkin akan meningkat lagi kalau seluruh konsep yang ada dipakai untuk menghitungnya.

9.5 Pekerja menurut Lapangan Usaha

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan biasa dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Indikator tersebut juga biasa digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Di Jawa Barat, lapangan pekerjaan pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Tingginya lapangan pekerjaan di sektor pertanian adalah kenyataan historis dan juga di sektor ini tidak banyak membutuhkan tenaga terdidik dan terampil. Pada tahun 2000 sektor pertanian menyerap tenaga kerja laki-laki sekitar 28,49 persen pekerja perempuan sebesar 33,65 persen.

Namun demikian, Tabel 9.5.1a menunjukkan bahwa struktur pekerja di Jawa Barat telah mengalami pergeseran dari pekerja pertanian (*agriculture*) menuju sektor *manufacture* (M) dan *service* (S) pada periode 1990-2000. Baik untuk laki-laki maupun perempuan pada periode tersebut, pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, sedangkan untuk sektor industri dan perdagangan cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 9.5.1a :
 Persentase Pekerja menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin dan Daerah Perkotaan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 1990 dan 2000

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	1990	2000	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Pertanian	7,9	7,1	5,0	4,8
Industri	22,2	23,1	29,5	32,2
Bangunan	9,2	7,1	0,4	0,3
Perdagangan	22,5	28,3	28,3	36,3
Angkutan	10,1	11,6	0,5	0,8
Jasa	22,7	20,6	31,0	24,3
Usaha lain	5,4	2,2	5,3	1,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Perdesaan				
Pertanian	48,9	48,0	55,7	58,4
Industri	11,2	9,4	14,9	11,3
Bangunan	7,4	6,1	0,2	0,1
Perdagangan	15,1	17,9	18,5	21,5
Angkutan	6,1	10,1	0,1	0,2
Jasa	8,8	7,4	8,3	8,3
Usaha lain	2,5	1,2	2,3	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Kota+Perdesaan				
Pertanian	35,7	28,5	39,5	33,7
Industri	14,4	15,9	19,6	20,9
Bangunan	8,0	6,6	0,2	0,2
Perdagangan	17,5	22,8	21,6	28,3
Angkutan	7,4	10,8	0,2	0,5
Jasa	13,3	13,7	15,6	15,7
Usaha lain	3,7	1,7	3,3	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS, SP 1990 dan Hasil Pengolahan SP2000-M

Dominasi masing-masing sektor akan lebih signifikan apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perdesaan baik laki-laki maupun perempuan persentase pekerja didominasi oleh sektor pertanian masing-masing mencapai 47,99 persen dan 58,37 persen, sementara di daerah perkotaan masing-masing hanya 7,05 persen dan 4,83 persen. Hal ini karena untuk daerah perkotaan justru didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri, perdagangan dan jasa.

Hal yang menarik adalah sektor perdagangan. Sektor ini baik menurut jenis kelamin maupun daerah perkotaan/perdesaan justru mengalami peningkatan pada periode tersebut. Sektor perdagangan merupakan salah satu andalan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Sektor informal yang memang cukup besar di sektor perdagangan tersebut merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang cukup bisa diandalkan di masa krisis ini sehingga sektor tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, bila dilihat menurut jenis kelaminnya, baik pada tahun 1990 maupun 2000, sektor perdagangan ini lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan.

9.6 Pekerja menurut Status Pekerjaan

Penduduk yang bekerja dapat dilihat menurut status pekerjaan sebagai indikator tidak langsung untuk mengetahui produktivitas kerja. Tabel 9.6.1a menunjukkan bahwa status pekerjaan utama dari penduduk Jawa Barat yang bekerja pada umumnya adalah sebagai buruh/karyawan baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 44,58 persen dan 46,32 persen. Pada periode 1995-2000 terdapat perbedaan pola yang signifikan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Untuk pekerja laki-laki, persentase status buruh/karyawan cenderung mengalami penurunan dari 48,3 persen pada tahun 1995 menjadi 44,58 persen pada tahun 2000, sementara pekerja perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 45,09 persen pada tahun 1995 menjadi 46,32 persen pada tahun 2000.

Sebaliknya untuk pekerja keluarga, pekerja wanita cenderung mempunyai persentase yang lebih tinggi daripada pekerja laki-laki. Bahkan pada periode tersebut, pekerja keluarga perempuan mengalami peningkatan dari 22,58 persen (tahun 1995) menjadi 26,16 persen (tahun 2000), sedangkan pekerja keluarga laki-laki justru mengalami penurunan dari 4,71 persen (tahun 1995) menjadi 3,71 persen (tahun 2000). Relatif tingginya proporsi pekerja keluarga terutama pekerja perempuan memberikan indikasi bahwa masih cukup banyak tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena umumnya pekerja keluarga tidak mendapatkan upah/gaji, atau sekalipun ada, balas jasa yang diterima sangat jauh dari memadai. Dengan demikian keberadaan pekerja keluarga belum dapat dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah.

Hal yang menarik, memang terdapat kecenderungan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. Pada pekerja laki-laki, untuk status bekerja sendiri dan bekerja dengan buruh tidak tetap mengalami peningkatan, sedangkan untuk status pekerja perempuan justru mengalami penurunan. Sementara untuk status pekerja buruh/karyawan dan pekerja keluarga untuk laki-laki mengalami penurunan, sedangkan pekerja perempuan justru mengalami kenaikan. Sementara itu untuk status bekerja dengan buruh tetap, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan.

Tabel 9.6.1a :
Persentase Pekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat
Tahun 1995 dan 2000

Status Pekerjaan	Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	1995	2000	1995	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bekerja Sendiri	27,42	29,26	19,94	16,18
Bekerja dengan Buruh tidak tetap	17,07	19,56	11,40	10,55
Bekerja dengan Buruh tetap	2,50	2,18	1,00	0,79
Buruh/Karyawan	48,30	44,58	45,09	46,32
Pekerja Keluarga	4,71	3,71	22,58	26,16
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, SUPAS 1995 dan Hasil Pengolahan SP2000-M

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Johny, 2001, **Penduduk dan Perumahan**, dalam makalahnya yang disampaikan dalam rangka "Pelatihan Penulisan Profil Kependudukan Hasil SP2000" di Lenteng Agung, 9-13 Juli 2001, BPS, Jakarta, Indonesia
- BPS, 1980, **Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Jawa**, Buku I. DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada dan Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1974, **Sensus Penduduk 1971: Penduduk Jawa Barat**, BPS, Jakarta, Indonesia
- BPS, 1983, **Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 1980**, BPS, Jakarta, Indonesia
- BPS, 1992, **Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 1990**, BPS, Jakarta, Indonesia
- BPS, 1993, **Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat**, BPS, Jakarta, Indonesia.
- BPS, 1998, **Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat : Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 1997, **Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia: Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995**, BPS, Jakarta, Indonesia.
- BPS, 1999, **Indikator Kesejahteraan Rakyat**, BPS, Jakarta, Indonesia.
- BPS, 1998, **Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1997**, BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 1999, **Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1998**, BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 2000, **Daerah Dalam Angka Jawa Barat 1999**, BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 1999, **Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1998**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 2000, **Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 1999**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 2001, **Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 1999, **Gambaran Sosial Ekonomi Jawa Barat Tahun 1998**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 2000, **Gambaran Sosial Ekonomi Jawa Barat Tahun 1999**, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia.
- BPS, 2000, **Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Barat 2000**, BPS Provinsi Jakarta, Indonesia.

- BPS, 2001, **Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia**, BPS Provinsi Jawa Barat dan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia
- BPS, 2001, **Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil SP2000**, Pedoman Materi Teknis, Pusklat BPS, 9-13 Juli 2001.
- BPS, DHS dan Departemen Kesehatan, 1998, **Indonesia: Survei Demografi dan Kesehatan 1997**, BPS, DHS, Departemen Kesehatan, Jakarta, Indonesia.
- Castles, L., 1989, **Jakarta: The Growing Centre**, in Hill (ed) "Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970," Oxford University Press, Singapore, p. 233-253.
- Daroesman, Ruth, 1972, **An Economic Survey of West Java**, Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol. 8 No.2.
- Davis, K and Blake J., 1956, **Social Structure and Fertility: An Analytic Framework, Economic Development and Cultural Change**, Vol. IV, No. 2 (April), p. 221-235.
- Department van Economische Zaken, 1934, **Volkstelling 1930**, Overzicht Voor Nederlandsch-indie.
- Dharmaputri & Firman, T., 1992, **Mega Urban Regions in Indonesia, The Case of Botabek and Bandung Metropolitan**, Paper Presented Mega Urban Region of ASEAN Countries, Policy Changes and Responses, AIT, Bangkok, Thailand.
- Firman, T., 1994, **Migrasi Antar Provinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia**, Prisma, Juli, h. 3-15.
- Femina, 1993, **Jakarta Ah Jakarta: Tak Adil Pada Wanita Bekerja**, No. 23/XXI, Juni, h. 38-85.
- Hasbullah, Jousairi, 1992, **Migrasi Penduduk dan Tenaga Kerja**, Beberapa Pengertian Teoritis dan Kasus Empirik, disampaikan pada "Pelatihan Instruktur SDM," Bapenas, Jakarta, Indonesia.
- Hasbullah, Jousairi, 1996, **Mamang dan Belanda: Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan**, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hasbullah, Jousairi, 2001, **Tinjauan Hasil SP2000 (Modul Kependudukan) dan Implikasinya Terhadap Program KB di Jawa Barat**, makalah pada "Pembahasan Program KB Nasional," BKKBN Provinsi Jawa Barat, Bandung, 13-14 Agustus 2001.
- Hugo, Graeme, J., 1978, **Population Mobility in West Java**, PPSK, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Hugo, et.al., 1987, **Demographic Dimension in Indonesia Development**, Oxford University Press, Kualalumpur, Malaysia.
- Hugo, Graeme, J., 1992, **Women on the Move: Changing Pattern of Population Movement of Women in Indonesia**, in Chant S. (ed) "Gender and Migration in Developing Countries," Belhaven Press, London.

- Surbakti, Soedarti dan Jousairi Hasbullah, 2000, **Indikator Demografi dan Ekonomi Kaitannya dengan Pembangunan Kesehatan: Pemanfaatan Data BPS**. Makalah pada "Lokakarya Penyusunan Indikator Kesehatan untuk Manajemen Kesehatan." Departemen Kesehatan-WHO, Bandung.
- Urip, S., 1995, **Changing Migration Differentials and Regional Economic Inequality in Indonesia 1971-1990**, Unpublished PhD Thesis in Population Studies and Human Resources, Flinders University, South Australia.

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 1930 – 2000

No	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk				
		1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bogor	1,95	2,44	4,52	4,13	2,17
2	Kab. Sukabumi	1,40	2,32	2,51	1,99	1,09
3	Kab. Cianjur	1,72	2,29	2,33	1,82	1,51
4	Kab. Bandung	1,40	2,23	3,31	1,83	2,62
5	Kab. Garut	1,04	2,67	2,35	1,66	1,56
6	Kab. Tasikmalaya	0,44	2,61	2,15	1,31	1,22
7	Kab. Ciamis	3,43	1,93	1,21	0,78	0,79
8	Kab. Kuningan	1,03	2,28	1,97	1,27	0,95
9	Kab. Cirebon	0,93	1,44	2,73	2,16	1,48
10	Kab. Majalengka	1,21	1,52	2,01	1,40	0,80
11	Kab. Sumedang	1,52	1,94	1,40	1,40	1,52
12	Kab. Indramayu	1,71	1,36	2,53	1,58	0,92
13	Kab. Subang	-	-	1,89	1,25	0,90
14	Kab. Purwakarta	2,13	1,59	2,32	2,09	2,17
15	Kab. Karawang	2,04	1,90	2,31	1,89	1,69
16	Kab. Bekasi	0,83	1,85	3,57	6,29	-2,67
17	Kota. Bogor	2,80	2,45	2,60	0,94	10,90
18	Kota. Sukabumi	2,80	1,83	1,48	0,87	7,94
19	Kota. Bandung	5,85	2,15	2,20	3,47	0,39
20	Kota. Cirebon	3,53	1,22	2,51	1,31	0,54
21	Kota. Bekasi	-	-	-	-	-
22	Kota. Depok	-	-	-	-	-
Jawa Barat		1,68	2,05	2,61	2,30	1,90

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 10 Desember 1996

Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, sehingga rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi tahun 1990-2000 menjadi -2,67 persen. Sedangkan di Kota Bogor rata-rata pertumbuhan penduduk cukup tinggi (10,90 persen) disebabkan adanya perluasan wilayah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 6 Februari 1995), yaitu sebanyak 46 desa yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Bogor menjadi wilayah Kota Bogor.

Sumber : BPS, Hasil SP1930, SP1961, SP1971, SP1980, SP1990, dan SP2000-M

Tabel 2. Angka Putus Sekolah (APTS) menurut Kabupaten/Kota dan Usia Sekolah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Usia Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	0,93	13,04	37,07
02. Kab. Sukabumi	1,99	17,06	42,20
03. Kab. Cianjur	1,79	11,06	38,19
04. Kab. Bandung	1,59	6,92	12,59
05. Kab. Garut	1,20	9,76	37,95
06. Kab. Tasikmalaya	1,31	2,76	17,89
07. Kab. Ciamis	0,63	0,59	8,25
08. Kab. Kuningan	0,00	2,90	9,50
09. Kab. Cirebon	1,01	8,12	32,67
10. Kab. Majalengka	1,10	6,03	23,51
11. Kab. Sumedang	0,00	1,68	1,08
12. Kab. Indramayu	3,76	16,86	70,47
13. Kab. Subang	0,60	7,82	18,11
14. Kab. Purwakarta	1,29	7,87	25,92
15. Kab. Karawang	1,02	5,52	16,37
16. Kab. Bekasi	1,08	3,28	13,69
17. Kota Bogor	1,06	5,78	9,38
18. Kota Sukabumi	0,85	4,10	6,05
19. Kota Bandung	1,15	2,61	5,91
20. Kota Cirebon	0,35	7,03	16,08
21. Kota Bekasi	0,61	1,52	2,23
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	1,24	7,51	20,84

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

**Tabel 3. TPAK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Bogor	76,49	30,79	53,82
02. Kab. Sukabumi	85,69	30,25	58,66
03. Kab. Cianjur	86,38	41,02	64,28
04. Kab. Bandung	78,33	34,65	56,16
05. Kab. Garut	77,27	29,04	53,35
06. Kab. Tasikmalaya	80,00	40,80	60,38
07. Kab. Ciamis	84,06	46,44	64,95
08. Kab. Kuningan	77,45	38,69	57,95
09. Kab. Cirebon	81,78	34,72	58,20
10. Kab. Majalengka	81,55	44,27	62,63
11. Kab. Sumedang	77,81	35,66	56,44
12. Kab. Indramayu	78,62	40,45	59,83
13. Kab. Subang	81,18	36,28	58,44
14. Kab. Purwakarta	81,42	31,96	56,76
15. Kab. Karawang	80,65	26,74	53,65
16. Kab. Bekasi	77,53	25,08	51,13
17. Kota Bogor	75,71	29,83	52,92
18. Kota Sukabumi	72,69	24,60	48,30
19. Kota Bandung	69,84	32,39	51,69
20. Kota Cirebon	77,00	33,97	54,54
21. Kota Bekasi	80,94	26,97	54,52
22. Kota Depok *)	-	-	-
Jawa Barat	79,21	34,09	56,71

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan SP2000-M

Tabel 4. Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Hunian di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Hunian (m2)				
	< 20	20-49	50-99	100-149	150+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Bogor	3,79	37,03	46,13	9,73	3,32
02. Kab. Sukabumi	2,65	62,32	32,72	1,62	0,70
03. Kab. Cianjur	2,94	51,37	40,96	2,97	1,75
04. Kab. Bandung	8,16	49,46	31,71	6,60	4,07
05. Kab. Garut	3,37	70,96	21,06	3,82	0,78
06. Kab. Tasikmalaya	4,06	57,65	29,37	7,17	1,76
07. Kab. Ciamis	1,35	47,31	45,30	5,39	0,65
08. Kab. Kuningan	0,27	18,93	72,74	6,24	1,82
09. Kab. Cirebon	0,42	30,43	55,44	11,26	2,45
10. Kab. Majalengka	2,13	46,69	47,53	2,83	0,82
11. Kab. Sumedang	2,45	59,46	28,70	5,65	3,74
12. Kab. Indramayu	1,90	49,03	44,35	3,27	1,46
13. Kab. Subang	1,08	52,78	43,22	2,49	0,43
14. Kab. Purwakarta	1,25	49,47	43,63	3,88	1,77
15. Kab. Karawang	1,94	55,20	34,39	6,16	2,31
16. Kab. Bekasi	0,24	39,03	52,45	7,47	0,82
17. Kota Bogor	2,44	25,93	48,58	17,47	5,58
18. Kota Sukabumi	1,87	42,28	33,64	12,82	9,39
19. Kota Bandung	14,31	34,67	34,50	11,75	4,77
20. Kota Cirebon	7,77	29,53	37,58	13,54	11,57
21. Kota Bekasi	0,27	27,61	48,95	19,83	3,34
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,67	46,22	40,44	7,20	2,47

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber : BPS Jawa Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat 2000

Tabel 5. Persentase Balita di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir Periode 1998-2001

Kabupaten/Kota	Tenaga Medis			Tenaga Nonmedis		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kab. Bogor	42,65	51,84	54,28	57,35	48,16	45,72
02. Kab. Sukabumi	19,38	22,19	20,88	80,62	77,81	79,12
03. Kab. Cianjur	14,82	20,05	31,57	85,18	79,95	68,43
04. Kab. Bandung	36,17	47,97	54,27	63,83	52,03	45,73
05. Kab. Garut	25,74	24,42	43,01	74,26	75,58	56,99
06. Kab. Tasikmalaya	40,08	37,1	45,9	59,92	62,9	54,1
07. Kab. Ciamis	38,71	40,41	40,96	61,29	59,59	59,04
08. Kab. Kuningan	59,46	71,87	76,17	40,54	28,13	23,83
09. Kab. Cirebon	51,92	61,15	66,28	48,08	38,86	33,72
10. Kab. Majalengka	51,94	59,45	55,99	48,06	40,55	44,01
11. Kab. Sumedang	32,33	51,08	51,22	67,67	48,92	48,78
12. Kab. Indramayu	37,38	34	50	62,62	66	50
13. Kab. Subang	44,29	59,46	61,66	55,71	40,54	38,34
14. Kab. Purwakarta	29,11	32,79	43,97	70,89	67,21	56,03
15. Kab. Karawang	63,64	57,95	63,94	36,36	42,05	36,06
16. Kab. Bekasi	70,06	70,61	62,76	29,94	29,39	37,24
17. Kota Bogor	36,79	69,02	79,25	63,21	30,98	20,75
18. Kota Sukabumi	55,68	55,27	66,95	44,32	44,73	33,05
19. Kota Bandung	73,39	85	82,33	26,61	15	17,67
20. Kota Cirebon	84,12	87,15	89,32	15,88	12,85	10,68
21. Kota Bekasi	-	91,63	82,13	-	8,37	17,87
22. Kota Depok *)	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	43,34	51,17	54,14	56,66	48,83	45,86

*) Datanya masih tergabung dengan Kab. Bogor

Sumber: BPS, Susenas Tahun 1998, 1999, dan 2000